



GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR

NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa mendasari Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa terjadi dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian sesuai pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 berupa :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 - b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 namun juga sekaligus masih mempertimbangkan dan mengakomodir beberapa kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Hal ini didasari oleh Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Sehingga Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; Pengendalian inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 mendorong dan berdampak pada diperlukannya penyesuaian pada RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang telah disesuaikan dan mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan Gubernur Terpilih. Perubahan RKPD juga dilakukan untuk mengakomodir arahan Pemerintah terkait dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 adalah "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Arah Kebijakan Pembangunan ini disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024 – 2026. Dengan dilantikannya Gubernur terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, maka Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

Arah kebijakan pembangunan tersebut didukung dengan 5 (lima) Fokus Arah Kebijakan, yaitu: Insfrastruktur Jalan; Insfrastuktur Jembatan; Infrastruktur Teknologi dan Data; Infrastruktur Sekolah; dan Infrastruktur Penyediaan Air Untuk Petani. Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 masih tetap tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional termasuk konflik geopolitik, yang menyebabkan gejolak ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Terbitnya kebijakan baru pada beberapa sektor melalui terbitnya regulasi baru yang berkaitan dengan efisiensi anggaran pada Kementerian/Lembaga, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan kondisi dinamika diatas dan hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Penyesuaian terhadap perencanaan juga perlu dilakukan guna mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 pada program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dilakukan melalui penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Dalam prosesnya, perubahan RKPD tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan beberapa hal yaitu:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU daerah, IKU OPD, IKD, IKP); dan/atau
3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025.

Sedangkan proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

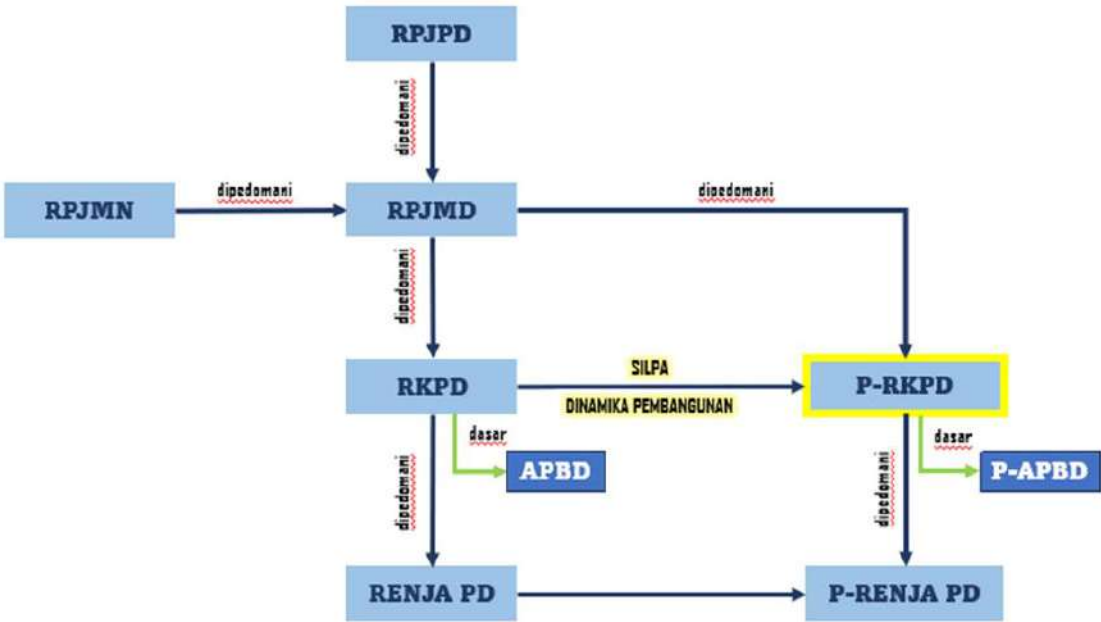
1.3. Hubungan Antardokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Dinamika pembangunan yang terjadi baik dari sisi anggaran maupun non anggaran akan berdampak pada dibutuhkannya penyesuaian pada dokumen perencanaan, yaitu RKPD Tahun 2025. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan upaya penyesuaian dengan Asta Cita dan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga perlu diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 pada program/kegiatan pembangunan maka perlu

penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran. Penyesuaian pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah dilatarbelakangi dengan terbitnya arahan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dalam rangka mengakomodir penyesuaian dalam tahap perencanaan daerah. Perubahan RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). KUPA PPAS ini akan menjadi bahan pembahasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). RKPD Perubahan yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Hubungan antar dokumen – dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Sumber: diolah

Selain itu, penyusunan dokumen Perubahan RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025, Asta Cita dan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional, termasuk efisiensi baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi sistematika sebagai berikut:

BUKU I, yang berisi narasi dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan, serta program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025; serta arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas tahun 2025 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BUKU II, yang memuat Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan sebagai suatu gambaran penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2025 yang tengah berjalan. Perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 agar dapat disesuaikan dengan program-program mendukung Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilukada Serentak Tahun 2024. Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan membandingkan target RKPD dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil dari evaluasi sampai dengan Triwulan I ini yang akan menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2025. Selanjutnya hasil evaluasi akan disinergikan dengan program Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029 dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, untuk kemudian akan menjadi dasar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Hasil evaluasi saat ini masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat periode pelaporan baru mencakup Triwulan I tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, sebagian besar program dan kegiatan masih dalam tahap awal implementasi dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Realisasi capaian yang dilaporkan hingga Triwulan I menunjukkan progres yang belum optimal. Kondisi ini wajar mengingat bahwa sebagian besar inisiatif dan target yang ditetapkan masih dalam fase permulaan pelaksanaan. Dampak dan hasil yang diharapkan dari berbagai program dan kegiatan diperkirakan akan lebih terlihat pada triwulan-triwulan berikutnya seiring dengan berjalannya waktu dan intensifikasi implementasi.

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73	45,2 (Th. 2024)	91,68	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
2	Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,58 (Th. 2024)	100,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,362-0,367	0,364 (Th. 2024)	100,82	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60	4,96	101,22	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	1,5 - 3,5	1,66	166,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42	4,33	111,09	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	111,67	103,86	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,87 (Th. 2024)	99,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24-62,31	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93 (Th. 2024)	99,86	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	63,9 (Th. 2024)	99,73	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	69,46 (Th. 2024)	102,83	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	8,64 (Th. 2024)	216,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50	85,36 (Th. 2024)	102,23	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian kinerja Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja . Dari 14 indikator kinerja tersebut terdapat 13 indikator berskala sangat tinggi meskipun beberapa indikator menggunakan realisasi Tahun 2024 dikarenakan realisasi triwulan I belum tersedia, dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2

Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73	45,2 (Th. 2024)	91,68	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,58 (Th. 2024)	100,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,362 – 0,367	0,364 (Th. 2024)	100,82	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60	4,96	101,22	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,66	166,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42	4,33	111,09	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	111,67	103,86	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,87 (Th. 2024)	99,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24- 62.31	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93 (Th. 2024)	99,86	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	63,9 (Th. 2024)	99,73	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum						
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	PENDIDIKAN						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07	12,86	98,39	Sangat Tinggi	Disdikbud
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,14	8,02	98,53	Sangat Tinggi	Disdikbud
	KESEHATAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,65	74,91	100,35	Sangat Tinggi	Dinkes
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2,00	20,7	1035,00	Sangat Tinggi	Dinkes
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	74,28	17,14	23,07	Sangat Rendah	Dinkes
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan <i>stunting</i>	%	85,00	65	76,47	Tinggi	Dinkes
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	82,00	25	30,49	Sangat Rendah	Dinkes
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	51,69	50,16	97,04	Sangat Tinggi	Dinkes
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	88,97	88,24	99,18	Sangat Tinggi	Dinkes
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,50	92,08	101,75	Sangat Tinggi	Dinkes
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	91,11	91,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	89,00	92,03	103,40	Sangat Tinggi	Dinkes
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,75	98,75	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,20	96,9	98,68	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100,00	98,88	98,88	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100,00	NA	NA	NA	RSUD Kelet Donorejo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	89,46	89,93	100,53	Sangat Tinggi	BMCK
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	46,55	47,09	101,16	Sangat Tinggi	BMCK
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	83,38	84,53	101,38	Sangat Tinggi	BMCK
4	Persentase akses air minum aman	%	42,93	40,86	95,18	Sangat Tinggi	BMCK
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	12,50	9,72	77,76	Tinggi	Pusdataru
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	61,65	51,36	83,31	Tinggi	Pusdataru
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	62,08	61,67	99,34	Sangat Tinggi	Pusdataru
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	64,07	61,78	96,43	Sangat Tinggi	Pusdataru
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	41,57	31,76	76,40	Tinggi	Disperakim
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20,22	20,34	100,59	Sangat Tinggi	Disperakim
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	39,78	35,56	89,39	Tinggi	Disperakim
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85,00	NA	NA	NA	Satpol PP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,75	0,74	98,67	Sangat Tinggi	BPBD
	SOSIAL						
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	3,1	0,39	12,58	Sangat Rendah	Dinsos
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	TENAGA KERJA						
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,64	2,21	7,72	Sangat Rendah	Disnakertran s
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68,57	0	0,00	Sangat Rendah	Disnakertran s
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,50	0	0,00	Sangat Rendah	Disnakertran s
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,15	1,12	11,03	Sangat Rendah	Disnakertran s
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,06	0	0,00	Sangat Rendah	Disnakertran s
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,58	91,07	99,44	Sangat Tinggi	Disnakertran s
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,96	11,3	716,46	Sangat Tinggi	Disnakertran s
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan	%	35,00	0	0,00	Sangat Rendah	DP3AKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	ekonomi menjadi wirausaha						
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,20	0,62	677,42	Sangat Tinggi	DP3AKB
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67,00	64,34	104,13	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PANGAN						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,05	85,34	102,76	Sangat Tinggi	Dishanpan
	PERTANAHAN						
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Disperakim
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Disperakim
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Air	Angka	68,71	52,03	75,72	Tinggi	DISLHK
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,91	84,91	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,35	3,35	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,3696	0,32	86,58	Tinggi	DISLHK
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4,00	4	100,00	Sangat Tinggi	Dispermasde sdukcakil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7618	0,7486	98,27	Sangat Tinggi	Dispermasde sdukcakil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,12	2,03	104,43	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PERHUBUNGAN						
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,274	6,12	97,55	Sangat Tinggi	Dishub
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,411	0,33	80,29	Tinggi	Dishub
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,333	15,53	101,28	Sangat Tinggi	Dishub
4	On time performance layanan transportasi	%	85,05	84,6	99,47	Sangat Tinggi	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,50	4,2	93,33	Sangat Tinggi	Diskominfo
	KOPERASI DAN UKM						
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,99	14,9	114,70	Sangat Tinggi	Dinkop UKM
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,38	-30,77	- 8097,37	Sangat Rendah	Dinkop UKM
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,39	9,78	132,34	Sangat Tinggi	Dinkop UKM
	PENANAMAN MODAL						
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,25	14,83	348,94	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100,00	110,41	110,41	Sangat Tinggi	DPMPTSP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,00	98,87	108,65	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,45	0,4	88,89	Tinggi	Disporapar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	58,25	58,33	100,14	Sangat Tinggi	Disporapar
	STATISTIK						
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	64,00	16	25,00	Sangat Rendah	Diskominfo
	PERSANDIAN						
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638,00	0	0,00	Sangat Rendah	Diskominfo
	KEBUDAYAAN						
1	Angka Melek Budaya	%	53,82	52,61	97,75	Sangat Tinggi	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15,62	15,14	96,93	Sangat Tinggi	Disarpus
	KEARSIPAN						
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	95,00	97,09	102,20	Sangat Tinggi	Disarpus
	URUSAN PILIHAN						
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Produksi perikanan	Ton	952.718	216.127,7 6	22,69	Sangat Rendah	Dislutkan
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,50	100,97	95,71	Sangat Tinggi	Dislutkan
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,50	106,74	96,60	Sangat Tinggi	Dislutkan
	PARIWISATA						
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,26	8,01	96,97	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.737.000. 000.000	0	0,00	Sangat Rendah	Disporapar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	PERTANIAN						
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,10	1,06	34,19	Sangat Rendah	Disnakeswan
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,80	98,06	97,28	Sangat Tinggi	Distanbun
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,16	0,96	600,00	Sangat Tinggi	Distanbun
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,57	109,57	103,79	Sangat Tinggi	Distanbun
5	NTP Hortikultura	Angka	108,49	120,18	110,78	Sangat Tinggi	Distanbun
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,97	166,51	164,91	Sangat Tinggi	Distanbun
	KEHUTANAN						
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	59,46	48,37	81,35	Tinggi	DISLHK
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1022457	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21,32	18,55	87,01	Tinggi	DISESDM
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kap ita	807	214,47	26,58	Sangat Rendah	DISESDM
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,63	3,73	102,75	Sangat Tinggi	DISESDM
4	Persentase penerapan <i>Good Mining Practice</i>	%	57,00	42,92	75,30	Tinggi	DISESDM
	PERDAGANGAN						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,83	4,16	86,13	Tinggi	Disperindag
	PERINDUSTRIAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,9	3,52	90,26	FALSE	Disperindag
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,10	39,93	107,63	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80,00	39,8	49,75	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00	96,83	107,59	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90,00	93,72	104,13	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD						
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	91,00	91,68	100,75	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	76,00	76,87	101,14	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	76,00	75	98,68	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	25	25,00	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100,00	25	25,00	Sangat Rendah	BAPPEDA
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100,00	25	25,00	Sangat Rendah	BAPPEDA
	KEUANGAN						
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-6,19	-11,41			BAPENDA
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	3,19	1,11	34,80	Sangat Rendah	BAPENDA
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,91	74,7	131,07	Sangat Tinggi	BPKAD
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89,86	89,86	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	KEPEGAWAIAN						
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,87	0,86	98,85	Sangat Tinggi	BKD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08	3282	106558,44	Sangat Tinggi	BPSDMD
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17,34	0,58	3,34	Sangat Rendah	BPSDMD
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100,00	0	0,00	Sangat Rendah	BPSDMD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,00	0	0,00	Sangat Rendah	BRIDA
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,00	86	101,18	Sangat Tinggi	BANHUB
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,905	3,03 (Th. 2024)	104,30	Sangat Tinggi	BAKESBANG POLINMAS
C	Aspek Daya Saing						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	69,46	91,78	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	8,64 (Th. 2024)	216,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50	85,36	102,23	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 126 indikator kinerja . Dari 126 indikator kinerja tersebut terdapat 87 indikator berskala sangat tinggi meskipun beberapa indikator menggunakan realisasi Tahun 2024 dikarenakan realisasi triwulan I belum tersedia, 13 indikator berskala tinggi, 24 indikator berskala sangat rendah dan 2 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	75	86,71	115,61	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36,86	0,91	2,47	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67,8	78,89	116,36	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	56	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase angka putus sekolah SMA	%	2,28	1,1	207,27	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase angka putus sekolah SMK putus sekolah SMK	%	0,024	0,03	80,00	Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	65	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMK
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0,6	0,55	91,67	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	58,82	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	53,49	49,64	92,80	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	13,16	18,09	137,46	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	15	0,81	5,40	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	24,82	248,20	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68,18	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Diksus

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase angka putus sekolah SLB	%	3,2	4,49	71,27	Sedang	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	84,1	83	98,69	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	20	10,93	54,65	Rendah	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	20	11,76	58,80	Rendah	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1,7	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN I
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi minimal akreditasi B CABDIN I	%	0,95	86,34	9.088,42	Sangat Tinggi	CABDIN I
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90,9	84,9	93,40	Sangat Tinggi	CABDIN II
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76,84	76,84	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN II
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40,41	40,41	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2,89	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN III
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69,9	85,71	122,62	Sangat Tinggi	CABDIN III
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	76,06	78,52	103,23	Sangat Tinggi	CABDIN III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25,85	75,07	290,41	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1,5	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN IV
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	71,25	70	98,25	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1,93	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN V
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78,9	99,5	126,11	Sangat Tinggi	CABDIN V
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	94,23	82,73	87,80	Tinggi	CABDIN V
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	80,17	80,64	100,59	Sangat Tinggi	CABDIN VI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	93	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN VI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	93	79,82	85,83	Tinggi	CABDIN VI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2,75	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN VII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85,6	87,1	101,75	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72,84	111,61	153,23	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77,25	77,22	99,96	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2,3	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN VIII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76,13	76,2	100,09	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3,24	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN IX
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79,2	88,14	111,29	Sangat Tinggi	CABDIN IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54,6	81,22	148,75	Sangat Tinggi	CABDIN IX
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	78,06	86,32	110,58	Sangat Tinggi	CABDIN X
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	32,14	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN X
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	85,17	77,01	90,42	Sangat Tinggi	CABDIN X
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	88,14	79,46	90,15	Sangat Tinggi	CABDIN XI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,84	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN XI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	48,73	75,32	154,57	Sangat Tinggi	CABDIN XI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	2,08	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN XII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	83	80,54	97,04	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81,4	79,18	97,27	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88,26	80,22	90,89	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2,53	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN XIII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79,5	79,5	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89,56	88,51	98,83	Sangat Tinggi	CABDIN I
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81,72	81,72	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83,77	82,8	98,84	Sangat Tinggi	CABDIN III
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	82,27	80,96	98,41	Sangat Tinggi	CABDIN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88,84	88,19	99,27	Sangat Tinggi	CABDIN V
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86,99	85,93	98,78	Sangat Tinggi	CABDIN VI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	89,33	87,81	98,30	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89,53	88,1	98,40	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	86,35	86,04	99,64	Sangat Tinggi	CABDIN IX
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82,71	70,49	85,23	Tinggi	CABDIN X
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83,77	82,47	98,45	Sangat Tinggi	CABDIN XI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85,8	84,58	98,58	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86,56	84,65	97,79	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	78,2	77,9	99,62	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	16	2	12,50	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	94,29	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CABDIN II
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN III
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	15	14,81	98,73	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	25	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN V
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CABDIN VI
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CABDIN VII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN IX
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	35	5,41	15,46	Sangat Rendah	CABDIN X
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,76	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN XI
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	CABDIN XII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
			100	25	25,00		
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%				Sangat Rendah	CABDIN XIII

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 87 indikator kinerja. Dari 87 indikator kinerja tersebut terdapat 47 indikator berskala sangat tinggi, 4 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah dan 33 indikator berskala sangat rendah. 33 Indikator yang berskala rendah dikarenakan kegiatan banyak yang belum terlaksana pada periode Triwulan I.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	40	17,14	42,85	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	57,14	25,71	44,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	74,28	17,14	23,07	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	74,3	17,1	23,01	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	74,3	14,28	19,22	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	68,5	66,77	97,47	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	85	70,81	83,31	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	85	81	95,29	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57,14	14,28	24,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	71,42	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	85,71	14,28	16,66	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57,14	14,28	24,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	71,42	14,28	19,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	85	82	96,47	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	1,75	1,75	Sangat Rendah	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	12,5	12,50	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	82	96,47	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	99,91	101,95	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	35	25	71,43	Sedang	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	70	17	24,29	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	80	75	93,75	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	85,71	25	29,17	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	14,28	24,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	10,71	24,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	14,28	24,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,86	14,28	33,32	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	20	20,00	Sangat Rendah	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 45 indikator kinerja. Dari 45 indikator kinerja tersebut terdapat 13 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang dan 30 indikator berskala sangat rendah.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	62,5	61,31	98,10	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,31	64,31	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Irigasi dan Air Baku
	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,11	69,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52,41	52,37	99,92	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62,68	62,68	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34,78	34,78	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53,26	53,26	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71,54	71,51	99,96	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	63,64	63,61	99,95	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50,08	50,02	99,88	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62,85	15,72	25,01	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	12,5	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67,36	67,35	99,99	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	67,35	16,84	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92,23	92,21	99,98	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72,65	72,65	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76,5	76,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
	Persentase akses air minum layak	%	93,94	92,29	98,24	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	57,82	52,48	90,76	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
	Persentase akses air limbah domestik layak	%	95,18	92,42	97,10	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	1,46	25,04	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	12,23	1,94	15,86	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	77,26	75,79	98,10	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47,91	48,31	100,83	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	45,07	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	91,57	89,22	97,43	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	77,37	77,53	100,21	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	89,44	87,86	98,23	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	86,19	87,05	101,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	90,1	92,06	102,18	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	87,57	88,38	100,92	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	91,47	93,58	102,31	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,47	91,56	107,13	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	90,2	92,23	102,25	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	71,44	75,17	105,22	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan	%	90,92	90,45	99,48	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	mantap di BPJ Wilayah Wonosobo						Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,66	92	99,29	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	86,43	89,15	103,15	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	87,66	87,68	100,02	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	87,39	85,83	98,21	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	67,34	68,19	101,26	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	89,45	91,03	101,77	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	91,47	91,56	100,10	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	18,07	14,46	80,02	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	73,04	37,97	51,99	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	66,67	16,67	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	48,42	43,49	89,82	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	76	69	90,79	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase tertib ruang	%	48	48	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	68,21	45,55	66,78	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 66 indikator kinerja. Dari 66 indikator kinerja tersebut terdapat 41 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator bertatus tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah dan 21 indikator berskala sangat rendah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0,73	0,53	72,60	Sedang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	6,64	4,2	63,25	Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	13,9	39,33	282,95	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	60	40	66,67	Sedang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala sedang dan 1 indikator berskala rendah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	56,07	0	0,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan Masyarakat
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	65,69	16,06	24,45	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Ketentraman Masyarakat
	Persentase penegakan produk hukum daerah	%	86,67	46,67	53,85	Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	64,54	54,4	84,29	Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0,12	0,02	16,67	Sangat Rendah	Sekretariat Badan Penanggulangan an Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulang an Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Badan Penanggulang an Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2,86	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Badan Penanggulang an Bencana Daerah - Bidang Logistik dan Peralatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi,1 indikator berskala rendah dan 6 indikator berskala sangat rendah.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15,41	11,23	72,87	Sedang	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	3,84	3,84	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0,14	0,14	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,15	0,15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,16	0,04	25,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang	%	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu						Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,12	0,06	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,17	0,17	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,15	0,15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,17	0,17	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,16	0,16	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,13	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,24	0,24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,25	0,25	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu						
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,13	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo						Sosial Pamardi Utomo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,11	0,03	27,27	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,1	0,1	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2,26	2,26	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0,04	0,01	25,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja. Dari 35 indikator kinerja tersebut terdapat 30 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, dan 4 indikator berskala sangat rendah.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	68,57	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	30,59	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,6	0,08	1,74	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,35	1,12	47,66	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3,2	0,99	30,94	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,5	1,6	16,84	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	13,22	0,67	5,07	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan	%	46,9801	10,28	21,88	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	produktivitas dan/atau kewirausahaan						Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	71,05	55,11	77,57	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,3	11,39	16,68	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98,2	98,1	99,90	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,77	49,75	99,96	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	45,54	44,33	97,34	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,69	81,33	84,11	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,59	12,77	14,25	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,67	8,45	31,68	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, dan 11 indikator berskala sangat rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	65	80	123,08	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	22	31,42	142,82	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Perempuan dan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	22,85	114,25	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	22,86	114,30	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	30	25,71	85,70	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82,86	82,86	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11,8	1,7	694,12	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator berskala tinggi.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	1,4	112,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,38	0,47	123,68	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	55	71,43	129,87	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,7	87,8	100,11	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,7	87,8	100,11	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
PROGRAM PENANGANAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
KERAWANAN PANGAN							
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	92	89,93	97,75	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	100	125,00		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja. 6 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator masih berskala sangat rendah.

4. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanian
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanian
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	38,46	38,46	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,5	94,54	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2,85	2,5	87,72	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	40,53	40,53	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	33,85	33,85	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	4,76	4,76	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)							
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0,4	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2,6	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	27,5	34,38	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	54	54,00	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	53,85	107,70	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10,5	2,5	23,81	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	33	7,36	22,30	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	25	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Persentase sampah yang tertangani	%	43	22,85	53,14	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala rendah ,dan 9 indikator berskala sangat rendah.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	98	99,32	101,35	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0- 17 diatas 98%	%	99	80	80,81	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	66,67	6	9,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi dan 1 indikator masih berskala sangat rendah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENATAAN DESA							
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	59,32	27,4	46,19	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan Desa
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	kompetensi pemerintahan desa						Pencatatan Sipil - Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	13,24	36,19	273,34	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja tersebut 4 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sangat rendah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	57	83,33	146,19	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	65,99	68,93	104,46	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
	Unmetneed	%	9,9	6,75	68,18	Sedang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	30,68	95,88	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sedang.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,39	0,39	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,985	0,98	99,49	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas
	Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,56	0,51	91,07	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	67,34	43,28	64,27	Rendah	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,229	0,22	96,07	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,52	0,51	98,08	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,25	0,24	96,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wilayah I Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,95	0,97	102,11	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,84	0,83	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,94	0,97	103,19	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,84	0,83	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wilayah III Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,95	0,98	103,16	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,84	0,83	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,24	0,24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,94	0,97	103,19	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,84	0,83	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,18	0,17	94,44	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wilayah V Kelas B
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,95	0,98	103,16	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,84	0,82	97,62	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,22	0,21	95,45	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,95	0,97	102,11	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,84	0,82	97,62	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,483	0,51	105,59	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	53	52,22	98,53	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,378	0,33	87,30	Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,4	0,2	50,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,08	0,04	50,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 29 indikator kinerja. Dari 29 indikator kinerja tersebut terdapat 24 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala rendah,dan 3 indikator berskala sangat rendah.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	81	20	24,69	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	33	10	30,30	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	74	72,5	97,97	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	47	15	31,91	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang E-Government

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi dan 3 indikator berskala sangat rendah.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	Persentase koperasi berkualitas	%	26,74	4,15	15,52	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	11,5	11,53	100,26	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
	Persentase koperasi provinsi produktif	%	48,53	24,35	50,18	Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase usaha mikro mandiri	%	82,3	19,43	23,61	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	25	-91,9	-367,60	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Persentase UMKM siap bermitra	%	23,08	13,66	59,19	Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala rendah, dan 3 indikator berskala rendah.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	67	18,37	27,42	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Promosi PM
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	12,5	25,00	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Promosi PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91	99,62	109,47	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	22	42,38	192,64	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	3,01	30,10	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, dan 4 indikator berskala sangat rendah.

13. **Kepemudaan dan Olahraga**

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Kepemudaan
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	75	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
	Persentase peningkatan perolehan medali	%	31,25	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Keolahragaan
	Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	105	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Keolahragaan
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL							
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	48	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja yang berskala sangat rendah.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	50	10	20,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat rendah.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	20,78	22,08	106,26	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	26,16	23,76	90,83	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	52,38	47,61	90,89	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
	Tingkat partisipasi seni tradisi	%	11,1	9,1	81,98	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
	Persentase akses literasi sejarah	%	53,1	53,1	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	13,15	13,15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	26,73	25,57	95,66	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89,9	90,08	100,20	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator berskala tinggi.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	88,89	83,33	93,75	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam kebudayaan gemar membaca	%	61,54	23,08	37,50	Sangat Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	85	106,25	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	92,25	88,18	95,59	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator masih berskala sangat rendah.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ko ta dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	30,26	26,36	87,11	Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	21,23	21,23	Sangat Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	79	39	49,37	Sangat Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	20	12,5	62,50	Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase arsip yang diselamatkan	%	65,92	79,32	120,33	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator. Dari 3 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 2 indikator berskala sangat rendah.

C. Urusan Pilihan
1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase produksi garam	%	2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2,93	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Selatan Kelas A
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7,8	4,09	52,44	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,54	122,67	113,02	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	44,44	88,88	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	70	96,26	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	100	122,22	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71,72	81,81	114,07	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	81	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjava	%	72,27	81,81	113,20	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjava Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	63	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Produksi perikanan budidaya	Ton	609.000	129278,62	21,23	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,55	131,44	117,83	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	71	101,43	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160.800	74121,25	46,10	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	1	25,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 32 indikator. Dari 32 indikator kinerja tersebut terdapat 16 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala rendah,dan 14 indikator berskala sangat rendah.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	26,67	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	54.069.703	8,4	0,000016	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/Kota	8	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
EKONOMI KREATIF							
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33,87	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat, 1 indikator berskala rendah, 2 indikator berskala sangat rendah dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	93	16,05	17,26	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Sarana Pertanian
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Produksi kedelai	Ton	52762	6598	12,51	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi jagung	Ton	3583730	1377423	38,44	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi padi	Ton	9613469	2911924	30,29	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi bawang merah	Ton	527875	105369,56	19,96	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Produksi cabai	Ton	346115	66688,64	19,27	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi durian	Ton	153410	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi jahe	Ton	35908	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi melati	Ton	25120	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi kopi	Ton	26005	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Perkebunan
	Produksi tebu	Ton	2562216	45346	1,77	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Perkebunan
	Produksi kelapa	Ton	167187	36934	22,09	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Perkebunan
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan nilai	%	1,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	tambah produk tanaman pangan						Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	12	1	8,33	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	12	1	8,33	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	12	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	12	3	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
	Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3.745.066	2892396	77,23	Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	113.440	75713	66,74	Sedang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	247.848	159267	64,26	Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Bidang Budidaya
	Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	1	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	1	25,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,02	2,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	-0,23	-23,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	-0,72	-72,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	0,8	80,00	Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7.420.274	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	12	4	33,33	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner semarang
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	12	4	33,33	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner boyolali
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	12	0	0	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	12	1,98	16,50	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	1	25,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	7	8,11	115,86	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	3,5	48,08	1373,71	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	1	25,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner semarang
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	1	25,00	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner boyolali
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1,08	0,25	23,15	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3,62	0,45	12,43	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2,29	0,35	15,28	Sangat Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	2,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	1,5	1,50	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - BALAI PELATIHAN PERTANIAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 50 indikator. Dari 50 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang , 1 indikator berskala rendah dan 42 indikator berskala sangat rendah.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	45,99	10	21,74	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,22	0,15	68,18	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0,01	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0,01	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0,01	0,02	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
							Kehutanan - CDK 3
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0,03	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	0	0	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0,01	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Persentase peningkatan produksi bibit	%	-90	-99	110,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0,03	0,01	33,33	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	1	10,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	60	1	1,67	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	71	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0,3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0,3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase peningkatan kelas kelompok	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	masyarakat di wilayah CDK 9						Kehutanan - CDK 9
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0,3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 33 indikator. Dari 33 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, dan 24 indikator berskala sangat rendah.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27,6	26,8	102,99	Sangat Tinggi	Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,7	1,58	107,59	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,5	3,29	106,38	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,9	1,59	119,50	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2,3	2	115,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4,2	3,96	106,06	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,9	0,51	372,55	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,5	2,26	110,62	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1,7	1,41	120,57	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,8	2,61	107,28	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	25	25	Sangat Rendah	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	3	2,92	102,74	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,9	2,67	108,61	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,7	1,49	114,09	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	45	12,34	27,42	Sangat Rendah	Bidang Mineral dan Batubara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	45	10,27	22,82	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	45	11,11	24,69	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	45	9,12	20,27	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	45	10,38	23,07	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	45	21,95	48,78	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan	%	45	12,06	26,80	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Wilayah Ungaran Telomoyo						Ungaran - Telomoyo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	45	10,02	22,27	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	45	11	24,44	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	45	12,31	27,36	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	45	20,32	45,16	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	45	13,45	29,89	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	45	17,37	38,60	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	91370,61	30,58	0,03	Sangat Rendah	Bidang Energi Baru Terbarukan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	30,58	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	18,35	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	39241,43	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	61,17	0	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	61,17	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	45,88	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	61,17	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	61,17	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	39259,78	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	30,58	30,58	100,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	61,17	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	30,58	0,00	0,00	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	65,04	76,57	117,73	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49,77	50,81	102,09	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51,27	53,15	103,67	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	50,08	51,04	101,92	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan	%	49,42	49,75	100,67	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	(K2) Wilayah Serayu Selatan						
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	50,05	51,68	103,26	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	50,05	50,61	101,12	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49,74	50,38	101,29	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49,64	50,35	101,43	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49,66	51,49	103,69	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	52,13	52,89	101,46	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49,72	50,62	101,81	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan	%	49,12	49,43	100,63	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah						

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator. Dari 54 indikator kinerja tersebut terdapat 27 indikator berskala sangat tinggi, dan 27 indikator berskala sangat rendah.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8,6	4,26	49,53	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	15	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	9	7,32	81,33	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	4,05	6,07	149,88	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1,05	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	0,1	3,86	3860,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	94,85	948,50	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	15	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, dan 7 indikator berskala sangat rendah.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2,5	4,62	184,80	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2,5	1,66	66,40	Sedang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	6,67	2,86	42,88	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	99,33	116,86	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,39	3,13	71,30	Sedang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan	%	9	3,64	40,44	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan						Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	0,6	6,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	6,95	2,34	33,67	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan :
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala sedang, dan 5 indikator berskala sangat rendah.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,71	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,71	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan skala indikator sangat rendah.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan	%	70	18	25,71	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	organisasinya dalam kategori tinggi						
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88,57	23	25,97	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	22,5	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36,59	10	27,33	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48,57	13	26,77	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69,05	17,26	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	23	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91,01	22,75	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	25	26,32	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan	%	95	25	26,32	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	umum yang ditindaklanjuti						DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	25	26,32	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	83	10	12,05	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84	10	11,90	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60	10	16,67	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	68,42	70,54	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	97	26,2	27,01	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	14,15	14,74	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	25,17	26,22	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
DAN PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	29,57	33,98	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	42,37	49,85	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	36	42,35	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	20	23,81	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	19,75	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	10	11,63	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	15	18,29	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	45	80,36	Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	44,92	49,36	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	42,31	51,60	Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	22,15	27,01	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,8	19,3	19,53	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	8,79	9,20	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	86	85	98,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 34 indikator kinerja. Dari 34 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator

berskala sedang, 1 indikator berskala rendah dan 30 indikator berskala sangat rendah.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
	Persentase layanan bagian humas	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Humas
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Persidangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya						
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Perekonomian
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Perekonomian
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase dokumen evaluasi yang diamankan regulasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut seluruhnya berskala sangat rendah.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Akuntansi
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	89,86	89,86	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	73	0	0	Sangat Rendah	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	3,19	1,11	34,80	Sangat Rendah	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	-17	-33,49	50,76	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	4,34	-2,22	-51,15	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	13,17	6,91	52,47	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	14,69	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	-29,99	-53,64	55,91	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	-12,96	-30,5	42,49	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	-0,21	-0,36	58,33	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	18,67	8,15	43,65	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	13,55	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	-19,28	-34,76	55,47	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III						Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	-21,14	-38,74	54,57	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	19,63	5,79	29,50	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	17,95	11,85	66,02	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	13,55	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-26,14	-45,84	57,02	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-13,7	-23,96	57,18	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	-11,35	-19,48	58,26	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	21,18	8,66	40,89	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Kabupaten Semarang						Kabupaten Semarang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	13,33	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	-31,07	-54,91	56,58	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	-6,82	-19,6	34,80	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	2,58	0,67	25,97	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	12,37	4,36	35,25	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	12,67	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-8,84	-15,27	57,89	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-6,82	-12,41	54,96	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	32,23	11,76	36,49	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	11,16	-0,13	-1,16	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	13,45	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-15,64	-27,92	56,02	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-12,89	-18,62	69,23	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	5,28	1,42	26,89	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	14,09	5,61	39,82	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	13,67	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor	%	-15,78	-26,27	60,07	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	(PKB) UPPD Kabupaten Grobogan						Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-9,14	-12,82	71,29	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-11,08	-19,71	56,22	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	15,03	4,17	27,74	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	13,66	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	-32,48	-59,31	54,76	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	-10,64	-29,29	36,33	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	0,55	0,15	27,27	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	13,93	4,42	31,73	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	13,57	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-15,94	-29,01	54,95	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-16,34	-39,79	41,07	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	-1,14	-2,04	55,88	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	7,6	2,26	29,74	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	13,67	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-19,81	-34,59	57,27	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-22,66	-41,57	54,51	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air	%	-4,52	-8,45	53,49	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen						Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	6,99	4,11	58,80	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	13,54	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-17,6	-30,44	57,82	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-14,9	-27,23	54,72	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-16,09	-28,95	55,58	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	10,38	2,58	24,86	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	13,62	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	-22,78	-41,14	55,37	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri						Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-7,55	-39,86	18,94	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KABUPATEN Wonogiri	%	-21,29	-35,34	60,24	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	15,75	4,17	26,48	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	13,46	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-10,91	-17,1	63,80	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-22,6	-41,26	54,77	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-0,41	-0,71	57,75	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	23,37	9,4	40,22	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Kabupaten Karanganyar						Kabupaten Karanganyar
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	13,52	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-16,92	-30,01	56,38	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-13,53	-26,19	51,66	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	14,18	3,31	23,34	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	6,13	2,24	36,54	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	13,53	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-19,95	-35,46	56,26	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor	%	-15,98	-42,64	37,48	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	(BBNKB) UPPD Kabupaten Pati						
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	-6,74	-11,93	56,50	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	20,59	6,92	33,61	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	13,46	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-22,72	-39,53	57,48	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-13,35	-24,7	54,05	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	14,7	3,46	23,54	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	21,32	12,27	57,55	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	13,64	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-23,29	-41,73	55,81	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-9,37	-37,68	24,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	7,95	2,05	25,79	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	27,65	10,73	38,81	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	14,95	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-22,3	-38,89	57,34	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-17,98	-32,48	55,36	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	-11,69	-22,47	52,02	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	%	12,52	5,32	42,49	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	daerah UPPD Kabupaten Kudus						Kabupaten Kudus
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	13,63	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-15,04	-25,75	58,41	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-18,29	-32,62	56,07	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	-4,88	-8,96	54,46	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-35,43	-60,15	58,90	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	13,32	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-50,2	-91,09	55,11	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-21,25	-33,73	63,00	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	18,98	4,82	25,40	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	13,51	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-4,14	-7,91	52,34	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-14,89	-26,95	55,25	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-14,86	-23,86	62,28	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	17,76	4	22,52	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12,72	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-3,73	-6,85	54,45	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-19,2	-35,18	54,58	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	4,69	1,51	32,20	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	9,37	3,19	34,04	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	15,87	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-10,34	-17,58	58,82	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-8,82	-16,18	54,51	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	7,36	2,39	32,47	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	9,48	2,97	31,33	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi	%	13,37	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang						Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-50,2	-92,58	54,22	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	3,51	-10,36	-295,16	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	78,96	15,11	19,14	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19,19	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	13,68	2,66	19,44	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	2,02	0,11	5,45	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	12,3	5,04	40,98	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	13,63	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	11,08	3,31	29,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	2,01	0,52	25,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	9,72	0,74	7,61	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	13,3	3,27	24,59	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	12,68	4,82	38,01	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	13,72	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-15,84	-30,28	52,31	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-11,67	-29,27	39,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-10,17	-17,68	57,52	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	9,36	2,8	29,91	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	13,46	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-17,17	-31,94	53,76	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-10,5	-30,19	34,78	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	2,39	0,71	29,71	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	31,53	10,19	32,32	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	13,57	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-21,96	-40	54,90	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-17,71	-37,62	47,08	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	4,55	1,42	31,21	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	22,05	8,56	38,82	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13,41	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-0,46	-0,83	55,42	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-14,93	-31,88	46,83	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP)	%	4,31	1,23	28,54	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	UPPD Kabupaten Banjarnegara						Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6,97	2,8	40,17	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13,21	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-67,77	-100	67,77	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	-24,5	-45,33	54,05	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	-4,53	-7,98	56,77	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21,75	10,11	46,48	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	13,43	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-5,76	-8,1	71,11	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-11,38	-28,32	40,18	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	19,12	5,05	26,41	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	11,24	4,96	44,13	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	13,58	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-13,87	-24,4	56,84	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-7,41	-22,15	33,45	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-6	-10,21	58,77	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20,73	7,36	35,50	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	%	13,59	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	daerah UPPD Kabupaten Kebumen						Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-27,79	-49,11	56,59	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-7,4	-35,26	20,99	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-2,81	-4,75	59,16	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	32,02	13,86	43,29	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	13,71	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-9,56	-16,5	57,94	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-13,52	-25,22	53,61	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	11,47	2,85	24,85	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	19,39	8,39	43,27	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	13,36	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-15	-25,43	58,99	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24,1	-44	54,77	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-3,04	-5,26	57,79	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	5,55	1,32	23,78	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	13,46	0	0	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Kabupaten Wonosobo						

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 194 indikator kinerja. Dari 194 indikator kinerja tersebut terdapat 9 indikator berskala sangat tinggi, 5 indikator berskala sedang 71 indikator berskala rendah dan 109 indikator berskala sangat rendah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Kepegawaian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	melalui pengadaan CASN						
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	25	50,00	Sangat Rendah	Bidang Informasi Kepegawaian
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator. Dengan rincian 7 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sangat rendah.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3,5	3,52	100,57	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator. Dengan rincian 4 indikator berskala sangat tinggi dan 2 indikator sangat rendah.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Kebijakan Pembangunan,

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	pembangunan hasil riset dan inovasi						Riset dan Inovasi
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah.

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaraan unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Penghubung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan :
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	84	97,12	115,62	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	86	50	58,14	Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	86	3,16	3,67	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	86	40,15	46,69	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	86	38,36	44,60	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	12,24	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	12,24	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 5 indikator berskala sangat rendah.

2.5. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
	Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3,1	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
	Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	76	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	Indeks kinerja ormas	Nilai	77,87	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Indeks toleransi	%	74,3	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Bangsa
	Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3,1	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	73,5	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
 Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja seluruhnya berskala NA dikarenakan data belum tersedia.

2.6. Penunjang Urusan

Kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 45
Capaian Kinerja Penunjang Urusan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	75	75	Sedang	Biro Adm. Bangda
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Biro Adm. Bangda
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	99,10	120,85	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	83	92,69	113,04	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)		
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	49,91	83,3	166,90	Sangat Tinggi	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	40	68	170	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	31,79	73,93	Sedang	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	39,44	119,51	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	45,6	57,98	127,15	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator berskala sangat tinggi dan 2 indikator berskala sedang.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Hal tersebut ke depan diperkirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan resiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang semakin meningkat.

Bank Indonesia dalam dokumen Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 menyebutkan bahwa perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Setidaknya terdapat 5 (lima) kecenderungan yang perlu diamati yaitu tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia, terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya suku bunga dan risiko utang Pemerintah, berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi keuangan dunia, serta cepatnya digitalisasi antarnegara dan peningkatan risiko operasional, khususnya yang terkait dengan keamanan siber.

3.1.2 Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen (c-to-c). Kemudian pada Triwulan I 2025 ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global sebesar 4,87 persen (y-o-y). Beberapa negara mitra dagang utama mengalami tekanan: ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,0 persen, Jepang 1,8 persen, Singapura 3,8 persen, sementara Korea Selatan justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen pada triwulan I-2025.

Pertumbuhan pada Triwulan I 2025 ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh *double digit*, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi. Selain itu, Ramadan dan Idul Fitri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh solid sebesar 6,78 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas barang nonmigas seperti lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja; mesin dan peralatan listrik; serta kendaraan dan bagiannya. Peningkatan kunjungan wisatawan

mananegara juga turut mendorong ekspor jasa. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 1,38 persen karena normalisasi belanja pemerintah, dimana pada triwulan I tahun lalu terdapat belanja pemerintah yang besar terkait Pemilu. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan 2,12 persen, melambat di tengah ketidakpastian global.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Kemudian pada April 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,47. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 1,59% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok *volatile food (VF)* mencatat inflasi rendah 0,11% (yoy), didukung oleh terjaganya pasokan pangan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta pengaruh efek dasar harga pangan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Kemudian TPT per Februari 2025 tercatat 4,76 persen, turun dari 4,82 persen pada Februari 2024. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa jumlah penganggur secara absolut meningkat dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta orang, atau jumlah penganggur meningkat sebesar 80 ribu orang. Hal ini terjadi karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Proporsi pekerja informal tercatat juga meningkat dari 59,17 persen pada Februari 2024 menjadi 59,40 persen pada Februari 2025.

Sementara, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2024 tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global yang tumbuh sebesar 4,95 persen sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Kemudian pada Triwulan I 2025 ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global sebesar 4,96 persen (y-o-y) diatas capaian nasional sebesar 4,87 persen (y-o-y). Secara q-to-q pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tertinggi diantara Provinsi se-Pulau Jawa yaitu sebesar 1,80 persen. Provinsi Jawa Tengah berkontribusi sebesar 14,47 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan I 2025 didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,98 persen (y-o-y), ekspor tumbuh 10,96 persen (y-o-y), investasi tumbuh 4,18 persen (y-o-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh

kenaikan sektor pertanian, listrik dan gas serta Infokom. Sektor pertanian tumbuh sebesar 15,24 persen (y-o-y), sejalan adanya panen raya di Jawa Tengah. Listrik dan gas tumbuh sebesar 12,09 persen (y-o-y) dan Infokom tumbuh sebesar 10,68 persen (y-o-y).

Inflasi Jawa Tengah selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,67% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Kemudian pada April 2025 terjadi inflasi Jawa Tengah sebesar 1,94 persen (y-o-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74. Andil inflasi April 2025 adalah (1) Emas sebesar 0,40 persen; (2) Minyak Goreng sebesar 0,14 persen; (3) Kopi Bubuk sebesar 0,13 persen. Kemudian Andil Deflasi adalah (1) Daging Ayam Ras sebesar -0,23 persen; (2) Tomat sebesar -0,08 persen; (3) Telepon Seluler sebesar -0,05 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp. 45,17 juta Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 47,97 juta Tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,33% pada Februari 2025 setelah sebelumnya sebesar 4,39% pada Februari 2024. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 9,58% pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 – 5,60	4,80 – 5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	49,30 – 49,73	49,30 – 51,10
3	Inflasi	%	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 – 4,42	4,81 – 4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00	9,66 – 9,00
6	Rasio Gini	Angka	0,362 – 0,367	0,362 – 0,367

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan

- memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 - 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
 - 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

Arah Kebijakan Pembangunan ini disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024 – 2026. Dengan dilantiknya Gubernur terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, maka Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

Arah kebijakan pembangunan tersebut didukung dengan 5 (lima) Fokus Arah Kebijakan, yaitu: Infrastruktur Jalan; Infrastruktur Jembatan; Infrastruktur Teknologi dan Data; Infrastruktur Sekolah; dan Infrastruktur Penyediaan Air Untuk Petani. Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan adanya dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola

pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat, akan tetapi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 18,23 persen pada tahun 2025 yang disebabkan oleh penurunan PKB sebesar 33,08 persen dan BBNKB sebesar 22,50 persen. Pemberlakuan UU HKPD juga membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target dan realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 66,91% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah dan apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2023 PAD mengalami kenaikan sebesar 638,42 miliar rupiah atau 3,75%.

Pendapatan Pajak Daerah tercapai 91,85%, walau tidak melampaui target namun mengalami kenaikan sejumlah 233,59 miliar rupiah atau 1,67% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Penyumbang belum tercapainya target adalah realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (84,16%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (93,27%), Pajak Air Permukaan (87,82%) dan Pajak Rokok

(95,25%). Selain Pajak Daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti Retribusi Daerah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan 1.563,70%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan 7,73% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anomali terjadi dikarenakan perpindahan pengakuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah yang tahun sebelumnya di Lain-lain PAD yang Sah dan tahun ini masuk dalam Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer 2024 sebesar 8,701 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 5,10% dari realisasi 2023. Kenaikan pendapatan transfer terjadi karena terlampauinya bagi hasil PPh dan Cukai Hasil Tembakau serta naiknya Dana Alokasi Umum untuk pendidikan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 51,95 miliar rupiah atau sebesar 66,35% dari tahun 2023 karena hibah dari luar negeri tidak ada lagi.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(4)	(4)	(6)
PENDAPATAN DAERAH	24.167.935.634.127	25.369.733.556.675	26.378.719.626.419
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.264.618.583.852	17.012.509.421.006	17.650.936.913.504
Pajak Daerah	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Retribusi Daerah	115.116.614.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	546.717.113.900	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591	434.060.698.944
PENDAPATAN TRANSFER	7.810.882.578.787	8.278.928.086.424	8.701.438.866.795
Dana Bagi Hasil Pajak	7.749.530.078.787	601.686.290.991	570.985.609.000
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	302.028.750.700	331.425.232.000	325.246.959.000
Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028
Dana Alokasi Khusus (fisik)	371.734.785.185	425.034.850.842	473.940472.839
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	3.013.508.989.317	3.275.155.012.091	3.474.257.466.928
Dana Insentif Daerah	61.352.500.000	87.197.945.000	37.997.568.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.434.201.488	78.296.049.245	26.343.846.120
Pendapatan Hibah	92.161.740.403	77.972.123.308	25.600.169.638
Lain lain pendapatan	272.461.085	323.925.937	743.676.482

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2022-2023 Audited, 2024 Anaudited.

Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah walau secara realisasi meningkat namun mengalami penurunan porsi pendapatan dari 2023 karena kenaikan realisasi Pendapatan Transfer. Menilik potensi yang dimiliki dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, target pendapatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,008 triliun dari tahun 2023 atau mengalami kenaikan 3,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi s/d Tw. I 2025	
		RKPD 2025	APBD 2025	Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	15.519.788.406.000	15.542.692.866.000	2.964.123.521.473	19,07
1.1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.650.725.636.000	1.963.134.071.262	15,52
1.2.	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000	1.807.585.183.000	585.165.551.440	32,37
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000	707.349.144.000	331.976.292.975	46,93
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000	23.476.500.000	83.847.605.796	22,24
2.	Pendapatan Transfer	8.006.377.888.000	8.792.464.010.000	1.289.517.100.709	14,67
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000	8.792.464.010.000	1.289.517.100.709	14,67
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.476.500.000	23.476.500.000	46.206.421	0,20
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.549.642.794.000	24.358.633.376.000	4.253.686.828.603	17,46

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 cenderung rendah. Hal ini dikarenakan mulai diterapkannya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Salah satu kebijakan daerah yang ditetapkan adalah melalui program Jateng Untuk Merah Putih. Program tersebut merupakan salah satu kebijakan daerah terkait insentif perpajakan yang bertujuan untuk meringankan dan mengurangi beban Masyarakat, mendorong Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Program Jateng Untuk Merah Putih berlaku sejak 5 Januari sampai dengan 31 Maret 2025.

Tabel 3.4.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1.	Pendapatan Asli Daerah	15.519.788.406.000	15.542.692.866.000	15.619.284.656.000
1.1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.650.725.636.000	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000	1.807.585.183.000	2.092.596.928.000

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000	707.349.144.000	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000	377.032.903.000	377.228.145.000
2.	Pendapatan Transfer	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.476.500.000	23.476.500.000	163.185.839.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.549.642.794.000	24.486.526.112.000	24.574.934.505.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, *Samsat Corporate*, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (*Samsat Budiman*);
- c. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (*Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat*, *Podcast Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi (CHIPS)*, *Lets Activate New Sakpole and Signal (LANS)*, kerja sama dengan para *influencer* Jawa Tengah di media sosial) dan pelaksanaan *door to door*;
- d. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- e. Menyelenggarakan *Auto Show* di Kabupaten dan Kota serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAS) 2025*;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota (program sengkuyung pajak kendaraan dan optimalisasi opsen MBLB), serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- g. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- h. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- i. Optimalisasi pendataan dan pemungutan objek pajak baru berupa pajak alat berat serta reuiu Nilai Jual Alat Berat yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah;
- j. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait pemungutan pajak alat berat, retribusi dan pendapatan lain;
- k. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan

sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

- 1. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2024, anggaran belanja daerah mengalami peningkatan sejumlah 1,084 triliun rupiah atau 3,94% apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Belanja operasi mendapat porsi terbesar, di ikuti belanja transfer yang berisi bantuan keuangan dan dana bagi hasil. Realisasi APBD Tahun 2024 sampai dengan 31 Desember telah optimal, mengingat sisa Kas di RKUD per 31 Desember 2024 sebesar 130 miliar rupiah dan Kas pada BLUD sebesar 435 miliar rupiah. Dengan manajemen kas sampai dengan akhir 31 Desember 2024, tidak ada pengajuan belanja yang tidak dibayar. Sebagian besar realisasi belanja mengalami kenaikan. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN melalui PPPK, peningkatan belanja barang dan jasa, dan naiknya Hibah.

Belanja Operasi digunakan untuk pelayanan sehari-hari pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi mengalami kenaikan realisasi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sejumlah 16,083 triliun rupiah atau 97,18% mengalami peningkatan sejumlah 8,03% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 61,77 miliar rupiah atau sebesar 3,44% dari tahun 2023. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sejumlah 10,22 miliar rupiah yang digunakan untuk penanganan bencana di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal serta dukungan Pelaksanaan PEPARNAS XVII. Belanja Transfer terealisasi sejumlah 9,359 triliun rupiah mengalami kenaikan 2,67% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian (1)	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	23.926.642.335.690	25.800.341.207.782	27.187.126.497.803
BELANJA OPERASI	13.456.887.671.949	14.887.780.012.763	16.083.865.301.964
Belanja Pegawai	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845
Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.896	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506
Belanja Subsidi	4.958.884.836	5.350.753.069	1.399.999.100
Belanja Hibah	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054
Belanja Bantuan Sosial	78.894.181.648	118.686.467.885	45.008.996.459
BELANJA MODAL	1.713.641.630.081	1.794.862.778.298	1.733.084.096.994
BELANJA TAK TERDUGA	16.545.479.100	740.000.000	10.225.800.500
BELANJA TRANSFER	8.763.165.716.275	9.116.958.416.721	9.359.951.298.345
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	804.934.393.793	653.134.590.053	1.045.686.246.124

Uraian (1)	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000
Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2022-2024 (Audited).

Perubahan RKPD Tahun 2025 mengarahkan kebijakan belanja daerah diperuntukkan dalam rangka:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2025 meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
 - h. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20 persen untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai

untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;

4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun anggaran 2025 diproyeksikan sesuai kebutuhan riil dan termasuk penambahan belanja pegawai untuk CPNS dan PPPK;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; Belanja subsidi digunakan untuk subsidi bahan pangan guna penanganan stunting dan kemiskinan serta subsidi kepada BUMD sebagai penjamin agar Kelompok Penerima SPAM dapat memperoleh pinjaman untuk pengembangan tanpa menggunakan agunan;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,

- serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2025 terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1.	Belanja Operasi	15.389.713.402.000	16.100.551.735.000	16.053.711.560.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000	5.889.922.014.000	6.479.243.286.000
1.3.	Belanja Subsidi	9.274.000.000	9.274.000.000	12.413.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.428.133.221.000	2.449.434.836.000	2.093.048.950.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	32.600.000.000
2.	Belanja Modal	1.253.873.852.000	1.449.835.221.000	1.996.418.166.000
3.	Belanja Tak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
4.	Belanja Transfer	7.243.355.540.000	7.273.439.156.000	7.076.818.456.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.046.794.308.000	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	23.911.942.794.000	24.848.826.112.000	25.151.948.182.000

Sumber: BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian (1)	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	1.909.773.865.813	1.330.794.071.071	1.406.058.065.812
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.909.773.865.813	1.330.794.071.071	1.406.058.065.812
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.435.692.146.361	1.236.470.622.932	900.123.938.112
Pencairan dana Cadangan	-	94.130.600.000	505.869.400.000
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	474.081.719.452	192.848.139	64.727.700
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	891.000.000.000	-	20.700.000.000
Pembentukan dana cadangan	400.000.000.000	-	-
Penyertaan modal	491.000.000.000	-	20.700.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2023 (Audited).

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan pada Penggunaan SILPA tahun 2023 serta pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan digunakan untuk Penyertaan Modal sebagai bentuk penyehatan BUMD. Sedangkan untuk Proyeksi Pembiayaan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1.	Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	70.000.000.000	0
2.1.	Pembentukan dana cadangan	0	0	0
2.2.	Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	0
	Jumlah Pembiayaan Netto	362.300.000.000	362.300.000.000	577.013.677.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah pada perubahan tahun anggaran 2025 berasal dari penyesuaian SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah untuk penyertaan modal kepada BUMD dilakukan realokasi berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal kepada BUMD.

Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan RKPD 2025 (Rp)
1.	PAD	15.519.788.406.000	15.542.692.866.000	15.619.284.656.000
1.1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.650.725.636.000	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000	1.807.585.183.000	2.092.596.928.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	707.349.144.000	707.349.144.000	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000	377.032.903.000	377.228.145.000
2.	Pendapatan Transfer	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.476.500.000	23.476.500.000	163.185.839.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.549.642.794.000	24.486.526.112.000	24.574.934.505.000
1.	Belanja Operasi	15.389.713.402.000	16.100.551.735.000	16.053.711.560.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000	5.889.922.014.000	6.479.243.286.000
1.3.	Belanja Subsidi	9.274.000.000	9.274.000.000	12.413.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.428.133.221.000	2.449.434.836.000	2.093.048.950.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	32.600.000.000
2.	Belanja Modal	1.253.873.852.000	1.449.835.221.000	1.996.418.166.000
3.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
4.	Belanja Transfer	7.243.355.540.000	7.273.439.156.000	7.076.818.456.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	3.046.794.308.000	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	23.911.942.794.000	24.848.826.112.000	25.151.948.182.000
	Surplus (defisit)	(362.300.000.000)	(362.300.000.000)	(577.013.677.000)
1	Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
	SiLPA	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	70.000.000.000	0

NO	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan RKPD 2025 (Rp)
	Pembentukan Dana Cadangan	0	-	0
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	0
3	Pembiayaan Daerah	362.300.000.000	362.300.000.000	577.013.677.000
	SILPA	0	0	0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Akan tetapi dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan beberapa diblokir oleh Pemerintah Pusat. Sehingga gambaran untuk realisasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah
Triwulan I Tahun 2025

NO	SKPD PELAKSANA	PAGU	BLOKIR	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
DEKONSENTRASI		21.161.191.000	17.891.043.000	209.144.500	1,17	1,81
ATRIBUTIF		3.740.069.000	3.708.069.000	32.000.000	0,86	0,85
1	BAPPEDA	452.663.000	452.663.000	-	0,00	
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	470.000.000	470.000.000	-	0,00	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA	218.617.000	218.617.000	-	0,00	
4	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193.541.000	193.541.000	-	0,00	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	392.845.000	392.845.000	-	0,00	
6	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.012.403.000	1.980.403.000	32.000.000	1,62	1,59
DELEGATIF		17.421.122.000	14.182.974.000	177.144.500	1,25	2,06
1	BAPPEDA	1.105.856.000	1.105.856.000	-	0,00	
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	102.007.000	102.007.000	-	0,00	
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	85.000.000	85.000.000	-	0,00	
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.752.000.000	5.290.590.000	-	0,00	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA	611.657.000	611.657.000	-	0,00	
6	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.021.680.000	797.675.000	129.144.500	16,19	15,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.203.775.000	4.203.775.000	-	0,00	
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.539.147.000	1.985.414.000	48.000.000	2,42	8,68
TUGAS PEMBANTUAN		186.982.638.000	55.282.155.000	11.987.337.257	21,68	16,91
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.680.512.000	1.678.512.000	1.970.000	0,12	0,12
2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATA	58.989.297.000	400.000.000	12.008.857	3,00	27,48
3	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	101.373.322.000	47.690.623.000	10.301.689.400	21,60	18,80
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.331.475.000	196.868.000	459.670.000	233,49	29,82
5	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	20.527.718.000	3.235.838.000	1.211.999.000	37,46	6,56
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	38.574.000	38.574.000	-	0,00	
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	2.041.740.000	2.041.740.000	-	0,00	

Sumber: Biro Bangda, April 2025.

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Realisasi TJSLP Jawa Tengah hingga Triwulan II Tahun 2025 mencapai 16,582 miliar rupiah. Angka ini masih akan berkembang hingga akhir tahun mengingat proses pelaksanaan TJSLP di Provinsi Jawa Tengah masih terus berjalan.

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2024
dan Tahun 2025 Triwulan II

No	Bidang Pokja	Realisasi 2024		TW.II Tahun 2025	
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	584	4.656.967.243	80	337.950.625
2	Bidang Kesejahteraan Sosial	654	32.094.992.135	163	5.087.517.744
3	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	338	17.273.879.877	49	1.121.519.552
4	Bidang Pendidikan	518	19.215.722.050	106	1.954.086.661
5	Bidang Kedaruratan	151	2.922.080.955	36	480.557.820
6	Bidang Keagamaan	352	8.114.734.227	85	1.690.764.273
7	Bidang Pendampingan Umum	175	4.430.298.895	34	500.691.000
8	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185	7.762.381.159	40	2.782.094.000
9	Bidang Kesehatan	277	5.371.961.428	40	233.678.300
10	Bidang Infrastruktur	341	20.726.384.145	96	2.381.460.650
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	56	3.659.337.600	3	11.996.320
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	10	1.100.418.497	5	-
TOTAL		3641	127.329.158.211	734	16.582.316.945

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 11 Juli 2025.

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 Triwulan II

NO	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
1	PT Telkom Indonesia	82	5.262.755.296
2	Bank Jateng	21	3.731.300.000
3	PT Semen Gresik Tbk	77	2.618.091.812
4	PT Bhimasena Power Indonesia	137	784.350.000
5	PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH	17	453.279.000
6	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	27	441.130.000
7	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	24	440.000.000
8	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	23	304.940.113

NO	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
9	PT. Tirta Investama -Pabrik Klaten	3	288.120.000
10	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	11	271.567.985
11	PT BPR Surya Yudhakencana	14	267.575.000
12	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12	223.820.000
13	PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)	43	213.025.000
14	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	19	195.627.650
15	PT BPR BKK KENDAL (PERSERODA)	42	180.719.900
16	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	4	163.924.000
17	PT. DUA KELINCI	86	134.860.000
18	PT. Dan Liris	18	114.984.506
19	BPR BKK KARANGMALANG	3	111.100.000
20	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)	7	93.000.000
21	PT Nojorono Tobacco International	6	92.191.140
22	PT BPR BKK UNGARAN	20	82.396.500
23	PT KAYU LAPIS INDONESIA	20	74.559.043
24	PT PLN INDONESIA POWER SEMARANG PGU	1	13.600.000
25	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	5	9.310.000
26	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3	5.405.000
27	PT KENLEE INDONESIA	4	2.750.000
28	PT BPR BKK KOTA SEMARANG	2	2.665.000
29	PT. SRI REJEKI ISMAN TBK	1	2.270.000
30	PT Siba Surya	1	2.000.000
31	PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)	1	1.000.000
TOTAL		734	16.582.316.945

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 11 Juli 2025.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026

Dasar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Jawa Perencanaan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 yang ditetapkan pada tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2025. Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah mewujudkan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah diukur dengan indikator tujuan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Rasio Gini, dan Angka Kemiskinan.

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025, dalam RPD Tahun 2024-2026 juga ditetapkan empat sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai meliputi:

- 1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani;
- 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Keluarga;
- 3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana;
- 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari					
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73	49,30 -51,10
		Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,66 – 9,00*
		Rasio Gini	Angka	0,362 - 0,367	0,362 - 0,367*

Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan				
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60	4,80-5,60
		Inflasi	%	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 - 4,42	4,81 - 4,42
		Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	107,52
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif				
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,99
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24 – 62,31	62,31
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93,45
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	64,25
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	75,68
		Indeks Risiko Bencana	Angka	4,00	96,18*
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis				
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50	91,5

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Keterangan:

*) Target tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

4.2Penjabaran Visi, Misi, Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Seiring dengan dilantiknnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Februari 2025, serta sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640 SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka rencana pembangunan daerah tahun 2025 harus dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang dirumuskan menjadi visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut didukung dengan 6 misi yang terdiri atas:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Visi dan misi tersebut berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Jateng”. Dalam rangka menjabarkan visi misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Keberhasilan pencapaian visi misi program unggulan daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2029 diukur dengan 11 indikator pembangunan daerah yang meliputi 8 indikator kinerja utama dan 3 indikator kinerja pembangunan lainnya yaitu:

1. Angka Kemiskinan;
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Indeks Modal Manusia;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Indeks Reformasi Birokrasi;
6. Indeks Integritas Nasional;
7. Otonomi Fiskal Daerah; dan
8. Indeks Demokrasi Indonesia;
9. PDRB per Kapita;
10. Inflasi; dan
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran pada perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Tahun 2025. Pokok-pokok pikiran tersebut ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

- a. Netralitas dan profesionalisme serta tanggung jawab seluruh aparat birokrasi pada semua tingkatan dalam menghadapi tahun politik guna melahirkan kualitas berdemokrasi yang lebih kuat, kokoh dan mapan;
- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan dengan terobosan melakukan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa serta sekaligus peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparat desa demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas;
- c. Sosialisasi terhadap undang-undang, peraturan daerah dan berbagai peraturan gubernur terutama yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi atau terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat;
- d. Sosialisasi yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah pertanian, pupuk, bibit, permodalan, peternakan, UMKM serta koperasi, mengingat kepentingan ekonomi mayoritas masyarakat desa sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini;
- e. Menjaga stabilitas harga dan stok pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan terus melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan modal, penguatan pertumbuhan ekonomi, karang taruna, dan penguatan pariwisata;
- g. Peningkatan prasarana digitalisasi desa serta perbaikan fasilitas desa;
- h. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan di Jawa Tengah;
- i. Pembuatan kebijakan dan inovasi daerah dalam peningkatan kemudahan berusaha di Provinsi Jawa Tengah;
- j. Pemerintah Jawa Tengah melakukan update data induk kemiskinan di desa dengan sebaik-baiknya, agar masalah bantuan apapun dari pemerintah (baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang seringkali dianggap tidak tepat sasaran dapat diatasi secara tuntas;
- k. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengeluarkan regulasi agar semua lembaga pendidikan melakukan pembelajaran cara penggunaan hp android yang baik dan produktif bagi peningkatan kualitas siswa/siswi;
- l. Perlu disusunnya regulasi terkait dengan:
 - 1) Tata kelola pupuk yang jelas dan berpihak pada rakyat;
 - 2) Pemanfaatan media pembelajaran elektronik;
 - 3) Larangan membuang sampah di sembarang tempat.

2. Aspek Perekonomian

- a. Peningkatan kesejahteraan kaum tani dengan memberikan kemudahan berusaha/berproduksi di bidang pertanian;
- b. Modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan profesional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan

yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai *entrepreneur*/usahawan di bidang ini;

- c. Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk-produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri kearifan daerah (kabupaten/kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki produk-produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri khasnya;
- d. Pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik terhadap potensi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pemberian sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan trucking yang angkutan barangnya melebihi tonase, memblacklist kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan/atau tidak memenuhi standar; dan
- f. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendalami masalah praktek jual beli jabatan dan jika terdapat laporan resmi dari masyarakat agar segera di proses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pembagian BOSDa harus ditingkatkan dan disamakan sehingga tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah/madrasah, karena hanya bernaung di kementrian yang berbeda;
- b. Adanya insentif/honor terhadap tenaga kependidikan keagamaan (nonformal) ke depan hendaknya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan cakupan dan nilai nominalnya;
- c. Pemberian bantuan secara signifikan dan terus menerus kepada sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan sangat diperlukan sebagai upaya percepatan untuk meningkatkan kualitas agar sejajar dengan sekolah-sekolah negeri pada khususnya;
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan juga meningkatkan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara memadai, dengan meningkatkan kuantitas dan melakukan monitoring penyaluran dana BSM secara tepat sasaran;
- e. Penguatan sarana dan prasarana terhadap Sekolah Luar Biasa, khususnya pemenuhan terhadap rasio guru Sekolah Luar Biasa;
- f. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan program peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih, serta program rumah layak huni untuk masyarakat;
- g. Peningkatan penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang membuka akses dan peluang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau;
- h. Bantuan pendidikan lebih diperbesar karena dampak yang dihasilkan sangat baik untuk generasi ke depan;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan di desa-desa;
- j. Peningkatan terhadap kemudahan akses disabilitas pada ruang-ruang publik dan pelayanan masyarakat.

4. Aspek Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan pembangunan yang diarahkan atau lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di wilayah pedesaan, pinggiran dan perbatasan, jalan penghubung antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten/kota;
- b. Terkait dengan kondisi jalan di Jawa Tengah yang rusak sehingga diperlukan koordinasi penanganan kerusakan jalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Jawa Tengah diharapkan lebih merata di 35 kabupaten/kota dan 7.809 desa, hal ini sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup yang layak;
- d. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat di segala bidang untuk ditingkatkan.

5. Aspek Keuangan Daerah

Fokus utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa terutama pada anggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah khususnya pada alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Target indikator sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,6 persen;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 8,0 - 7,0 persen;
- d. Tingkat Kemiskinan Ekstrem sebesar 0 persen;
- e. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382;
- f. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
- g. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 persen;
- h. Nilai Tukar Petani (kumulatif) sebesar 115 - 120; dan
- i. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) sebesar 105 – 108.

Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
8. Optimalisasi penerimaan negara.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dalam RKP Tahun 2025 juga ditetapkan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90 - 5,60 persen;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,42 – 4,81 persen;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,66 – 9,00 persen;
- d. Tingkat Kemiskinan Ekstrem sebesar 0 persen;
- e. Rasio Gini sebesar 0,362 – 0,367;
- f. Indeks Modal Manusia sebesar 0,59; dan
- g. Persentase Intensitas Emisi GRK sebesar 0,32 persen.

4.3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2025, selain dengan tema dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 juga difokuskan pada kebijakan **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2025

terutama untuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, teknologi dan data, sekolah, dan penyediaan air untuk petani.

Penjabaran prioritas daerah (PD) Jawa Tengah tahun 2025 lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. PD 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025	Target P-2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 – 5,60	4,80 – 5,60
Inflasi	%	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 – 4,42	4,81 – 4,42
Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	107,52

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, difokuskan pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber

- pembiayaan alternatif;
- 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
 - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan roadmap pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 67 program, dilaksanakan oleh 17 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Pengembangan Perumahan;
- 5) Program Kawasan Permukiman;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 9) Program Pemberdayaan Sosial;
- 10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 11) Program Rehabilitasi Sosial;
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 13) Program Penanganan Bencana;
- 14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 18) Program Penataan Desa
- 19) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 20) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 22) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 23) Program Pengelolaan Pelayaran;
- 24) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- 25) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 26) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- 27) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 28) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 29) Program Pengembangan UMKM;
- 30) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 31) Program Promosi Penanaman Modal;
- 32) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 33) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 34) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 35) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 36) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 37) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- 38) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 39) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 40) Program Pemasaran Pariwisata;
- 41) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 42) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 43) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 44) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 45) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 46) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 47) Program Penyuluhan Pertanian;
- 48) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 49) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 50) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 51) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 52) Program Pengembangan Ekspor;
- 53) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 54) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 55) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 56) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 57) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 58) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 59) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 60) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 61) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 62) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 63) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 64) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 65) Program Hubungan Industrial;
- 66) Program Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
- 67) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2. PD 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025	Target P-2025
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,99
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24 – 62,31	62,31
Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93,45
Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	64,25

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, difokuskan pada:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan *surveilans* berbasis laboratorium; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan prasarana sarana olahraga memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet;
- d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan;
- e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota,

penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 26 program, dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
- 10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 11) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 13) Program Pembinaan Sejarah;
- 14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 15) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 16) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 21) Program Perlindungan Perempuan;
- 22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 23) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 24) Program Pengendalian Penduduk;
- 25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3. PD 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025	Target P-2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	75,68
Indeks Risiko Bencana	%	4,00*)	96,18

*keterangan:
merupakan angka target dengan indikator **Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana** (RPD 2024 – 2026)

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, difokuskan pada:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan prasarana sarana pengolah limbah dan persampahan (percepatan penyelesaian *readiness criteria* TPST regional dan fasilitasi proses pembangunan IPLT regional), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak, serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat miskin) terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi

- air tanah, pengembangan SPAM regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 22 program, dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 11) Program Pengelolaan Persampahan;
- 12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 15) Program Pengelolaan Hutan;
- 16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- 18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 19) Program Pengelolaan Aspek Gegeologian;

- 20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- 21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
- 22) Program Penanggulangan Bencana.

4. PD 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025	Target P-2025
Indeks Risiko Birokrasi	Angka	83,50	91,50

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, difokuskan pada:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 41 program, di dalamnya termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/ lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

- 8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*;
- 10) Program Pendaftaran Penduduk;
- 11) Program Pencatatan Sipil;
- 12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- 17) Program Pengelolaan Arsip;
- 18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- 19) Program Penataan Organisasi;
- 20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 21) Program Kesejahteraan Rakyat;
- 22) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- 23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
- 26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 31) Program Kepegawaian Daerah;
- 32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 34) Program Pelayanan Penghubung;
- 35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan dan program prioritas, diukur dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam

RKPD Tahun 2025, IKU ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 sebanyak 14 indikator. Sejalan dengan visi misi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah menetapkan juga 11 indikator pembangunan daerah, maka dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2025	Target P-2025
1	2	3	4
1	PDRB per Kapita 1)	49,30 - 49,73	49,30 - 51,10 *)
2	Angka Kemiskinan 1)	9,66 – 9,00	9,66 – 9,00
3	Rasio Gini 2)	0,362 – 0,367	0,362 – 0,367
4	Pertumbuhan Ekonomi 1)	4,90 – 5,60	4,80 – 5,60 *)
5	Inflasi 1)	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50
6	Tingkat Pengangguran Terbuka 1)	4,81 – 4,42	4,81 – 4,42
7	Nilai Tukar Petani	107,52	107,52
8	Indeks Pembangunan Manusia 2)	73,99	73,99
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan 2)	62,24 – 62,31	62,31 *)
10	Indeks Pembangunan Gender 2)	93,13	93,45 *)
11	Indeks Pembangunan Keluarga 2)	64,07	64,25 *)
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1)	75,68	75,68
13	Indeks Risiko Bencana 1)	4,00	96,18*)
14	Indeks Reformasi Birokrasi 1)	83,50	91,5 *)
15	Indeks Modal Manusia 3)	-	0,59 *)
16	Otonomi Fiskal Daerah 3)	-	63,47 *)
17	Indeks Integritas Nasional 3)	-	80,97 *)
18	Indeks Demokrasi Indonesia 3)	-	83,72 *)

Keterangan:

1) IKU dalam RPD Tahun 2024-2026 dan Indikator dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;

2) IKU dalam RPD Tahun 2024-2026;

3) Indikator dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

*) Target sesuai dengan target IKD dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

4.3.4 Program Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 (Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah)

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, didukung dengan kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut sebagai berikut.

A. Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
2. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren;
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
6. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di Kawasan Industri;
8. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

B. Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

1. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni;
2. *Smart Response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam “Jateng Nglakoni”;
3. Kantor Gubernur Rumah Rakyat;
4. Digitalisasi Manajemen Arsip;
5. Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD;
6. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa;
7. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*);

9. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru;
10. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;
11. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening;
12. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa;
13. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal;
14. Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
15. Percepatan penanganan *stunting* melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
16. Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet);
17. Peningkatan Bantuan Keuangan Desa;
18. Jambanisasi 100%;
19. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
20. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
21. Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);
22. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru.

C. Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

1. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah;
2. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
3. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan;
4. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;
5. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta;
6. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
7. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;

8. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata;
9. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*);
10. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
11. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
12. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter;
13. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte);
14. Memastikan Integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi;
15. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global;
16. Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);
17. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
18. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api;
19. Menyiapkan Sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
20. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali;
21. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan;
22. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
23. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
24. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
25. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
26. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
27. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian;
28. Pendirian Koperasi Buruh;
29. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora;
30. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO;
31. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
32. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri;
33. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. Spesialis keliling, puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
35. Mendorong penyediaan 1 Dokter 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
36. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit;

37. *Event* olahraga memancing terbesar Asia;
38. Petani milenial gajian;
39. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi;
40. BOSDa Madrasah Aliyah;
41. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta;
42. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja;
43. Transformasi tata kelola tambang Galian C;
44. Pengembangan Investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya;
45. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
46. Pengembangan peterna lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
47. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal;
48. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD;
49. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional;
50. Pengembangan *Sister Province*;
51. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK;
52. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
53. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa;
54. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
55. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
56. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
57. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
58. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
59. Program Kerjasama Forkopimda;
60. Pengembangan pertanian yang terintegrasi;
61. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial.

D. Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima;
2. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan;
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah;
4. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
5. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi;

6. Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha);
7. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
8. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
9. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jateng);
10. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk penyediaan air bersih;
11. Revitalisasi embung;
12. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
13. Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
14. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau;
15. Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral;
16. Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan;
17. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
18. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
19. Subsidi pangan murah;
20. Penguatan dan pembinaan *E-Sport* Jawa Tengah;
21. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan;
22. Penyediaan benih yang berkualitas;
23. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian;
24. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang disabilitas;
25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;
26. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
27. Pap smear gratis (skrining Ca Serviks);
28. Peningkatan operasional kader posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba;
31. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah;
32. Penanganan bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah *Zero Bullying* melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
33. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa;
34. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalannya partisipasi berbasis Hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan);
35. Regulasi pengembangan kawasan industri;
36. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha;
37. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah;

38. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
39. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*);
40. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”;
41. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional;
42. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

Rencana pendanaan daerah tahun 2025 mendukung kinerja pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2025, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun memperhatikan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih dan paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan, serta adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan tahun 2025 meliputi:

- a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2025 sebesar 23,549 triliun rupiah, pada APBD Tahun 2025 menjadi sebesar 24,486 triliun rupiah, dan pada perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar 24,574 triliun rupiah;
- b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebesar 23,911 triliun rupiah, APBD Tahun 2025 menjadi sebesar 24,848 triliun rupiah, dan pada rencana perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar 25,151 triliun rupiah;
- c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 sebesar 362,3 miliar rupiah, dan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 tetap sebesar 577,013 miliar rupiah.

Proyeksi kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan RKPD 2025 (Rp)
1.	PAD	15.519.788.406.000	15.542.692.866.000	15.619.284.656.000
1.1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.650.725.636.000	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000	1.807.585.183.000	2.092.596.928.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	707.349.144.000	707.349.144.000	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000	377.032.903.000	377.228.145.000
2.	Pendapatan Transfer	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.476.500.000	23.476.500.000	163.185.839.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.549.642.794.000	24.486.526.112.000	24.574.934.505.000
1.	Belanja Operasi	15.389.713.402.000	16.100.551.735.000	16.053.711.560.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000	5.889.922.014.000	6.479.243.286.000
1.3.	Belanja Subsidi	9.274.000.000	9.274.000.000	12.413.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.428.133.221.000	2.449.434.836.000	2.093.048.950.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	32.600.000.000
2.	Belanja Modal	1.253.873.852.000	1.449.835.221.000	1.996.418.166.000

NO	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan RKPD 2025 (Rp)
3.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
4.	Belanja Transfer	7.243.355.540.000	7.273.439.156.000	7.076.818.456.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	3.046.794.308.000	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	23.911.942.794.000	24.848.826.112.000	25.151.948.182.000
	Surplus (defisit)	(362.300.000.000)	(362.300.000.000)	(577.013.677.000)
1	Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
	SiLPA	432.300.000.000	432.300.000.000	577.013.677.000
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	70.000.000.000	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	0
3	Pembiayaan Daerah	362.300.000.000	362.300.000.000	577.013.677.000
	SILPA	0	0	0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi perluasan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan berorientasi kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI); peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara adaptif; percepatan implementasi kurikulum adaptif; perbaikan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi; peningkatan pembinaan potensi siswa; penguatan pengelolaan *boarding* dan semi *boarding* dengan sasaran siswa dari keluarga kurang mampu; penyediaan layanan pendidikan jarak jauh (sekolah virtual dan kelas jarak jauh); pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDa Reguler, Kemitraan dan BOP serta siswa melalui BSM (Basiswa Siswa Miskin) dan seragam miskin; Seleksi Basiswa Luar Negeri dan Identifikasi pemetaan Sekolah Unggulan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan *softskill* melalui internalisasi kurikulum, muatan lokal dan ekstra kurikuler serta

adanya upaya perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI).

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan; pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan usia produktif, kesehatan lansia, melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP), peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar, pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; peningkatan kesehatan lingkungan melalui pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; Bantuan jamban sehat; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota, pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi, penyusunan rencana epidemiologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan, penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan primer dan rujukan melalui fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) serta pemenuhan layanan unggulan KJSU (kanker, jantung, *stroke* dan urologi), pendampingan institusi layanan primer, pelayanan pengujian kalibrasi; pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD; Pelayanan dokter spesialis keliling; pengelolaan sistem informasi kesehatan melalui implementasi sistem analisis kesehatan berbasis *Big Data* dan *AI* (kecerdasan buatan); distribusi dan pengadaan alat kesehatan, obat bahan habis pakai, vaksin, makan dan minuman di fasilitas kesehatan melalui pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota. Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program

prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta. Peningkatan operasional kader Posyandu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional Pelabuhan di Kabupaten Kendal dan Pelabuhan Asemdayong di Kabupaten Pemasang.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, SPAM Desalinasi dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui fasilitasi proses pembangunan Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Purbalingga-Banjarnegara, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi melalui pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang. Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial (Kartu Jateng Ngopeni) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery*, *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebaran informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas. Bantuan hukum bagi perempuan (Kecamatan Berdaya).

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak. Bantuan hukum bagi anak dan disabilitas.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, serta fasilitasi perdes tentang pelestarian lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim, serta pendampingan kelompok masyarakat dalam program kampung iklim (Proklam).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan

lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (Adiwiyata).

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain fasilitasi persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah, Produk unggulan *go internasional* bekerjasama dengan diaspora.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum (Trans Jateng) di 10 Wilayah Pengembangan; modernisasi sistem dan halte Trans Jateng; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap V dan peningkatan Terminal Sukoharjo; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diantaranya pada jalan akses menuju kawasan pariwisata dan *Geopark* Dieng, serta perlengkapan jalan lainnya (rambu pendahulu penunjuk jurusan/RPPJ, *warning light*, *guardrail*, marka dan rambu) di ruas jalan provinsi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antarkabupaten di Desa Yosorejo Kabupaten Batang (Sungai Kalikutho); penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan (rambu dan marka) perlintasan kereta api di Kabupaten Cilacap serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center*, pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website*, dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake*, serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan monev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya integrasi aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni, mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III*, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang. Pengembangan koperasi pesantren.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi. Fasilitasi jaringan pemasaran *one pesantren one product*.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan

legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda (contoh: Kartu Zilenial).

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, peningkatan penyediaan prasarana sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, pelaksanaan event olahraga (contoh: *e-Sport*, Tarkam, Memancing, dan sebagainya); serta pembinaan dan pelatihan atlet.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pembinaan SDM/lembaga/pranata kebudayaan, dan evaluasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Peningkatan kualitas kebudayaan melalui upaya perlindungan dengan penguatan pendataan dan pemanfaatan kesenian tradisional, termasuk peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan; pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, peningkatan kelestarian arsip statis sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), peningkatan kualitas layanan kearsipan Provinsi Jawa Tengah melalui Pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, peningkatan pemanfaatan arsip oleh masyarakat melalui digitalisasi manajemen kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi manajemen kearsipan.

6.2.1 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan (wisata alam, budaya dan religi) berdasarkan potensi wilayah; pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata

provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada

kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (*supra*).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi meliputi koordinasi, sinkronisasi dan

pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun melalui perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan yang meliputi penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, dan pembangunan sumber benih.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi melalui pengamanan kawasan TAHURA provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi, pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi, kerja sama penyelenggaraan TAHURA provinsi, perencanaan pengelolaan TAHURA; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan daerah provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; penyusunan studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; Program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2025 akan dilaksanakan jelajah *Geopark/ Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan dan keandalan pelayanan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan *geopark* global sebagai dukungan pemenuhan dossier *geopark* di Jawa Tengah. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui penyusunan regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan mineral melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) bersama Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumih dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi dan perhitungan Indeks Ketahanan Energi Jawa Tengah, penyusunan kajian potensi EBT untuk mendukung evaluasi Rencana Umum

Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi, pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; pengembangan pesantren mandiri energi melalui pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan di Pondok Pesantren; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan

barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/ *Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM). Regulasi Pengembangan kawasan industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi

berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

6.2.2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi melalui penyusunan pergub SOTK baru; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui

kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

6.2.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan

disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

6.2.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

6.2.5 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada lampiran Buku II. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5.2.
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.195.506.393.000	10.461.261.268.000	10.484.606.265.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.487.532.030.000	3.406.967.260.000	3.362.824.753.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.484.266.030.000	3.403.728.560.000	3.360.891.269.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	896.000.000	896.000.000	458.646.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.250.000.000	1.222.700.000	851.994.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.120.000.000	1.120.000.000	622.844.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		409.338.725.000	636.239.309.000	641.578.351.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.763.705.000	630.951.273.000	637.500.860.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.151.000.000	1.907.491.000	1.106.370.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.394.000	300.394.000	164.329.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.123.626.000	3.080.151.000	2.806.792.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		280.107.972.000	378.853.185.000	1.170.825.620.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.151.387.000	93.978.363.000	201.975.653.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.919.053.000	77.997.506.000	88.554.782.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	674.105.000	674.105.000	364.039.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	38.166.603.000	37.488.149.000	45.795.822.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	129.159.390.000	158.677.628.000	827.223.417.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.335.641.000	5.335.641.000	3.742.711.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.701.793.000	4.701.793.000	3.169.196.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		29.735.000.000	29.735.000.000	27.593.680.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.290.000.000	25.290.000.000	24.128.017.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.765.000.000	3.765.000.000	2.950.611.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	480.000.000	480.000.000	398.605.000
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	200.000.000	116.447.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		6.038.000.000	10.038.000.000	7.960.621.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.090.000.000	6.090.000.000	4.444.003.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.850.000.000	3.850.000.000	3.462.028.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	98.000.000	98.000.000	54.590.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		158.281.087.000	276.902.583.000	254.478.110.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.721.000.000	10.721.000.000	9.395.763.000
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	200.000.000	129.351.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	72.868.427.000	81.743.657.000	74.889.094.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.447.160.000	180.193.426.000	164.746.610.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.584.500.000	3.584.500.000	4.929.673.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	460.000.000	460.000.000	387.619.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		11.639.281.000	19.139.281.000	14.867.470.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	246.740.000	246.740.000	143.155.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.664.754.000	11.164.754.000	10.052.222.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.319.000.000	2.319.000.000	1.561.617.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.908.787.000	1.908.787.000	1.160.639.000
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000	3.500.000.000	1.949.837.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.701.060.000	3.101.720.000	3.573.583.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000.000	1.000.000.000	990.325.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.550.000	1.177.880.000	1.445.555.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	135.000.000	135.000.000	93.683.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	150.000.000	89.590.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	185.000.000	185.000.000	596.431.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	253.510.000	453.840.000	357.999.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		20.853.888.000	32.853.888.000	27.788.583.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.623.888.000	14.623.888.000	18.903.525.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.930.000.000	3.930.000.000	7.055.935.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.300.000.000	14.300.000.000	1.829.123.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.475.000.000	1.475.000.000	989.390.000
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000	380.000.000	246.991.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	570.000.000	570.000.000	411.546.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	525.000.000	525.000.000	330.853.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		6.040.501.000	6.040.501.000	4.283.775.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	434.000.000	434.000.000	322.986.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.353.388.000	2.353.388.000	1.734.292.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	745.000.000	745.000.000	681.509.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	25.331.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564.000.000	564.000.000	291.345.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.305.113.000	1.305.113.000	773.364.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	200.000.000	123.428.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	389.000.000	389.000.000	331.520.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		624.000.000	624.000.000	444.837.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.000.000	220.000.000	156.622.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.000.000	210.000.000	154.154.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	194.000.000	194.000.000	134.061.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4.868.170.000	4.868.170.000	5.362.557.000
	PROGRAM PENATAAN DESA	20.850.000	20.850.000	10.669.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	602.000.000	602.000.000	353.476.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.540.320.000	1.540.320.000	1.072.724.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.705.000.000	2.705.000.000	3.925.688.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		965.000.000	1.165.000.000	1.087.611.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	195.000.000	195.000.000	112.524.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	450.000.000	650.000.000	479.426.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	320.000.000	320.000.000	495.661.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		132.525.554.000	138.611.634.000	147.689.917.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.646.680.000	136.732.760.000	145.840.735.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	779.100.000	779.100.000	774.340.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.099.774.000	1.099.774.000	1.074.842.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		44.567.195.000	59.567.195.000	67.240.389.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.459.750.000	24.459.750.000	24.442.986.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	20.107.445.000	35.107.445.000	42.797.403.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		9.913.542.000	9.913.542.000	7.167.999.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.499.384.000	1.499.384.000	740.384.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	734.908.000	734.908.000	564.392.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.606.604.000	1.606.604.000	1.149.690.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.494.064.000	3.494.064.000	2.645.647.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.578.582.000	2.578.582.000	2.067.886.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.939.212.000	4.939.212.000	3.274.080.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	560.640.000	560.640.000	350.519.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.612.500.000	1.612.500.000	1.030.991.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.654.602.000	1.654.602.000	1.104.042.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	561.470.000	561.470.000	365.326.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	550.000.000	550.000.000	423.202.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		400.011.000.000	400.011.000.000	290.788.213.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.225.000.000	11.675.000.000	12.326.093.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	388.786.000.000	474.827.875.000	278.462.120.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1.210.829.000	1.210.829.000	877.083.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.210.829.000	1.210.829.000	877.083.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		3.000.000.000	3.000.000.000	2.451.930.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.000.000.000	3.000.000.000	2.451.930.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		36.306.000.000	26.411.000.000	33.347.185.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000	7.640.000.000	6.227.041.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	22.696.000.000	12.741.000.000	22.786.072.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	955.000.000	955.000.000	574.051.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.325.000.000	1.325.000.000	857.240.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.750.000.000	3.750.000.000	2.902.781.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.640.000.000	2.640.000.000	2.370.818.000
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.400.000.000	2.400.000.000	2.238.809.000
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	240.000.000	240.000.000	132.009.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		771.598.000	771.598.000	401.883.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	701.598.000	701.598.000	366.751.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000	70.000.000	35.132.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		30.967.567.000	72.270.069.000	60.732.067.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.106.110.000	3.336.310.000	1.663.292.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.581.928.000	45.955.734.000	42.883.560.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.581.048.000	18.885.544.000	13.231.856.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.756.361.000	2.150.361.000	1.360.226.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.942.120.000	1.942.120.000	1.593.133.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		15.785.000.000	16.285.000.000	14.033.162.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.200.000.000	6.500.000.000	6.686.674.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.660.000.000	5.860.000.000	4.810.816.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	550.000.000	550.000.000	388.352.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.375.000.000	3.375.000.000	2.147.320.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		126.730.189.000	227.441.263.000	259.261.394.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	66.224.053.000	139.473.203.000	146.536.292.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.160.000.000	18.913.124.000	57.590.157.000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	38.283.154.000	40.275.154.000	30.208.258.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	745.000.000	4.745.000.000	4.503.760.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	BENCANA PERTANIAN			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14.317.982.000	24.034.782.000	20.422.927.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		8.012.689.000	9.217.689.000	10.552.351.000
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.854.089.000	7.009.089.000	8.610.955.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	824.768.000	874.768.000	874.880.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.005.832.000	1.005.832.000	858.077.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	328.000.000	328.000.000	208.439.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		10.204.421.000	10.204.421.000	7.322.696.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.178.750.000	2.178.750.000	1.390.473.000
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.503.054.000	2.503.054.000	1.492.688.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.381.039.000	2.381.039.000	1.997.903.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.141.578.000	3.141.578.000	2.441.632.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		40.338.845.000	42.338.845.000	40.724.897.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	633.633.000	633.633.000	493.755.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	238.250.000	238.250.000	159.476.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.895.000.000	32.895.000.000	32.388.954.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.334.967.000	1.334.967.000	581.343.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.786.815.000	2.786.815.000	2.245.897.000
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.450.180.000	4.450.180.000	4.855.472.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		10.525.859.000	15.282.359.000	14.620.007.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.029.492.000	14.785.992.000	14.235.468.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	245.681.000	245.681.000	218.061.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	250.686.000	250.686.000	166.478.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		261.000.000	261.000.000	137.710.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	261.000.000	261.000.000	137.710.000
SEKRETARIAT DAERAH		419.633.425.000	419.148.425.000	429.077.791.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.780.528.000	1.780.528.000	1.936.969.000
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.478.000.000	3.478.000.000	3.246.217.000
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	402.293.148.000	400.058.148.000	413.371.924.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.918.000.000	2.918.000.000	2.810.651.000
	PROGRAM PEREKONOMIANDA NPEMBANGUNAN	4.775.260.000	6.275.260.000	4.235.260.000
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.348.489.000	2.598.489.000	1.761.081.000
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.040.000.000	2.040.000.000	1.715.689.000
SEKRETARIAT DPRD		380.153.260.000	348.513.564.000	345.746.422.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	380.153.260.000	348.513.564.000	345.746.422.000
PERENCANAAN		12.980.000.000	12.980.000.000	10.285.989.000
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.900.000.000	5.900.000.000	5.301.997.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.080.000.000	7.080.000.000	4.983.992.000
KEUANGAN		7.328.971.600.000	7.359.345.796.000	7.161.774.635.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.285.455.540.000	7.315.659.156.000	7.116.052.366.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.365.000.000	5.365.000.000	4.757.454.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	38.151.060.000	38.321.640.000	40.964.815.000
KEPEGAWAIAN		10.157.000.000	10.157.000.000	5.893.076.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.157.000.000	10.157.000.000	5.893.076.000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		15.836.640.000	35.095.555.000	30.731.723.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.836.640.000	35.095.555.000	30.731.723.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		4.675.000.000	4.675.000.000	3.414.678.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.675.000.000	4.675.000.000	3.414.678.000
PENGELOLAAN PENGHUBUNG		3.992.880.000	4.007.840.000	3.857.159.000
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.992.880.000	4.007.840.000	3.857.159.000
INSPEKTORAT DAERAH		8.903.799.000	9.403.799.000	6.885.846.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000	6.073.727.000	4.164.273.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.830.072.000	3.330.072.000	2.721.573.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		233.222.583.000	249.366.437.000	183.021.876.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.865.113.000	3.865.113.000	2.712.345.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.923.529.000	50.923.529.000	40.473.973.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	127.445.543.000	128.136.927.000	103.350.314.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.844.451.000	2.844.451.000	2.016.444.000

URUSAN	PROGRAM	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	48.143.947.000	63.596.417.000	34.468.800.000
TOTAL		23.911.942.794.000	24.848.826.112.000	25.151.948.182.000

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diukur menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian target beberapa indikator kinerja. Penyesuaian dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Koordinator
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73	49,30 – 51,10	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,66 – 9,00	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,362-0,367	0,362-0,367	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60	4,80 – 5,60	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42	4,81-4,42	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	107,52	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,99	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24-62,31	62,31	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93,45	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	64,25	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	75,68	Sekretariat Daerah
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	4,00	96,18	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50	91,5	Sekretariat Daerah

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Penyesuaian IKU Perangkat Daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73	49,30 – 51,10
2	Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,66 – 9,00
3	Rasio Gini	Angka	0,362 – 0,367	0,362 – 0,367
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60	4,80 – 5.60
5	Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42	4,81-4,42
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	107,52
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	73,99
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24-62.31	62.31
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13	93,45
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07	64,25
B	Aspek Pelayanan Umum			
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07	12,97
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,14	8,14
	Kesehatan			
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,65	74,65
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2,00	2,00
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	74,28	74,28
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan Stunting	%	85,00	85,00
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	82,00	82,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	51,69	51,69
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	88,97	88,97
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,50	90,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	91,11	91,11
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	89,00	89,00
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,75	98,75
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,20	98,20
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100,00	100,00
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100,00	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	89,46	93,08
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	46,55	48,18
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	83,38	82,15
4	Persentase akses air minum aman	%	42,93	42,93
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	12,50	12,50
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	61,65	61,65
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	62,08	62,08
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	64,07	64,07
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	41,57	41,57
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20,22	20,22
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	39,78	39,78
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85,00	85,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,75	0,76
	Sosial			
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	3,1	3,1
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Tenaga Kerja			
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,64	28,64
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68,57	68,57
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,50	56,50
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,15	10,15
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,06	71,06
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,58	91,58
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,96	80,96
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	35,00	40,00
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,20	4,20
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67,00	65,00
	Pangan			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,05	85,47
	Pertanahan			
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air	Angka	68,71	68,71
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,91	84,91
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,35	3,35
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,3696	0,3696
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4,00	4,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7618	0,7618
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13	2,10
	Perhubungan			
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,274	6,274
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,411	0,411
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,333	15,333
4	On time performance layanan transportasi	%	85,05	85,05
	Komunikasi dan Informatika			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,50	4,50
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,99	12,99
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,38	0,38
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,39	7,39
	Penanaman Modal			
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,25	4,25
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,00	91,00
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,45	0,45
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	58,25	58,25
	Statistik			
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	64,00	64,00
	Persandian			
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638,00	638,00
	Kebudayaan			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
1	Angka Melek Budaya	%	53,82	53,82
	Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15,62	15,62
	Kearsipan			
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	95,00	95,00
	Urusan Pilihan			
	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan	Ton	952.718	952.718
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,50	105,50
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,50	110,50
	Pariwisata			
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,26	8,26
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.737.000.000.000	1.737.000.000.000
	Pertanian			
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,10	3,10
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,80	100,80
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,16	0,16
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,57	105,57
5	NTP Hortikultura	Angka	108,49	108,49
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,97	100,97
	Kehutanan			
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	59,46	59,46
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457
	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21,32	21,32
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	807	826,11
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,63	3,63
4	Persentase penerapan <i>Good Mining Practice</i>	%	57,00	57,00
	Perdagangan			
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,83	4,83
	Perindustrian			
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,9	3,9
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,10	37,10
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80,00	80,00
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00	90,00
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90,00	90,00
	Sekretariat DPRD			
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	91,00	91,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	76,00	76,00
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	76,00	76,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Perencanaan			
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	100,00
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100,00	100,00
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100,00	100,00
	Keuangan			
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-6,19	-6,19
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	3,19	3,19
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,91	97,91
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89,86	89,86
	Kepegawaian			
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,87	0,87
	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08	3,08
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17,34	17,34
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100,00	100,00
	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,00	73,00
	Pengelolaan Penghubung			
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,00	85,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan			
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00	3,00
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00	3,00
	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,905	2,905
C	Aspek Daya Saing			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	75,68
2	Indeks Risiko Bencana	Angka	4,00*	96,18
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50	83,50

*keterangan: merupakan angka target dengan indikator **Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana** (RPD 2024 – 2026)

6.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	100	%	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	100	%	Seluruh Perangkat Daerah
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82	82	%	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	83	83	%	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	49,91	49,91	%	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	40	40	%	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43	43	%	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33	33	%	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	45,6	45,6	%	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	75	90	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36,86	1	Angka	
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,8	79,12	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	56	56	%	
	Persentase angka putus sekolah SMA	2,28	2,28	%	
	Persentase angka putus sekolah SMK	0,024	0,024	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	65	76,5	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,6	0,6	Angka	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	58,82	58,82	%	
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	53,49	54,5	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	13,16	18,56	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	15	0,85	Angka	
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	10	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	68,18	%	
	Persentase angka putus sekolah SLB	3,2	3,2	%	
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	84,1	84,1	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	20	20	%	
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	20	20	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,7	7,5	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,95	86,34	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,9	90,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,84	76,84	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	4,2	%	
	Persentase sekolah SMA,	40,41	83,73	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II				
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,89	9,5	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,9	85,71	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	76,06	77,96	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,85	25,85 75,10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,5	1,5	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	71,25	71,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,93	1,93	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,9	100	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,23	94,23	%	
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	80,17	80,17	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	93	4	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal	93	93	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	akreditasi B CABDIN VI				
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,75	2,75	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,6	89,62	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,84	72,84	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,25	77,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,3	8,7	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,13	76,13	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,24	5,5	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79,2	88,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,6	81,25	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	78,06	78,06	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	32,14	19,84	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	85,17	85,17	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	88,14	88,14	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,84	4,84	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	48,73	78,48	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	2,08	2,08	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	83	83	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81,4	81,4	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,26	88,26	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,53	2,53	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79,5	88,05	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,56	89,56	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,72	81,72	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,77	83,77	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK	82,27	82,27	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	dan SLB CABDIN IV				
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,84	88,84	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,99	86,99	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	89,33	89,33	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,53	89,53	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	86,35	86,35	Angka	
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,71	82,71	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,77	83,77	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,8	85,8	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,56	86,56	Angka	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	78,2	78,2	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	16	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	94,29	94,29	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	3	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	15	15	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	25	25	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA,	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	SMK dan SLB CABDIN VIII				
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	50	50	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	35	2,71	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	4,76	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	40	40	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	57,14	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal	74,28	74,28	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia				
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	74,3	74,3	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	74,3	74,3	%	
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	100	%	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	68,5	68,5	%	
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	85	85	%	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	85	85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14	57,14	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	71,42	71,42	%	
	Persentase pelayanan	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	tersertifikasi di Balkesmas Semarang				
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	85,71	85,71	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14	57,14	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	71,42	71,42	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	42,86	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	42,86	42,86	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	42,86	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	42,86	42,86	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	85	85	%	
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	100	100	%	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo				
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85	85	%	
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	98	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	35	35	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	70	70	%	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	80	80	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	85,71	85,71	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	42,85	%	
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	42,86	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	42,86	%	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	100	%	
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo				
	Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	62,5	62,5	%	
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	64,31	64,31	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	69,11	Angka	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,41	52,41	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,68	62,68	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air	34,78	34,78	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal				
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	53,26	53,26	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,54	71,54	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	63,64	63,64	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,08	50,08	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	62,85	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50	50	%	
	Persentase ketersediaan dokumen	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana				
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,36	67,36	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,35	67,35	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	60	60	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,23	92,23	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	72,65	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah	76,5	76,5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Balai PSDA Serayu Citanduy				
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air minum layak	93,94	93,94	%	
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82	57,82	%	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air limbah domestik layak	95,18	95,18	%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	5,83	%	
	Persentase komplek bangunan gedung	12,23	12,23	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase panjang jalan yang dileger	77,26	58,32	%	
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	100	%	
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	100	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,91	48,87	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,07	47,43	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	91,57	94,06	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,37	78,42	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	89,44	95,33	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ	86,19	83,56	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Wilayah Pekalongan				
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	90,1	94,89	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	87,57	88,84	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	91,47	94,78	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47	91,56	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	90,2	93,98	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	71,44	74,58	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	90,92	93,71	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,66	84,18	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	86,43	91,03	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi	87,66	78,13	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	baik di BPJ Wilayah Pati				
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	87,39	90,71	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	67,34	67,00	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	89,45	91,89	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	91,47	91,87	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	18,07	50,00	%	
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04	73,04	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67	66,67	%	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42	48,42	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	76	76	%	
	Persentase tertib ruang	48	48	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	68,21	68,21	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,73	0,73	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	6,64	8,32	%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	13,9	~~13,9~~ 49,49	%	
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	60	60	%	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	56,07	56,07	%	
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	65,69	65,69	%	
	Persentase penegakan produk hukum daerah	86,67	86,67	%	
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	64,54	64,54	%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	0,12	%	
	Persentase penanganan darurat bencana	100	100	%	
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2	2	%	
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86	2,86	%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					Satuan Polisi Pamong Praja

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,41	15,41	%	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	100	%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	3,84	3,84	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,14	0,14	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,15	0,15	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,16	0,16	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,21	0,21	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,12	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,12	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti	0,17	0,17	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo				
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,11	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,15	0,15	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,17	0,17	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,22	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,16	0,16	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang	0,13	0,13	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo				
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,24	0,24	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,08	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,25	0,25	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,22	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar	0,13	0,13	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara				
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,21	0,21	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,12	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,22	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,07	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,07	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial	0,08	0,08	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo				
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,11	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,1	0,1	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	100	%	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	2,26	2,26	%	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,04	0,04	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					Dinas Sosial
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					Dinas Sosial
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57	68,57	%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59	30,59	%	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,6	4,6	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35	2,35	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	3,2	3,2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,5	9,5	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22	13,22	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9801	46,9801	%	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05	71,05	%	
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,3	68,3	%	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,2	98,2	%	
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77	49,77	%	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54	45,54	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69	96,69	%	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59	89,59	%	
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67	26,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	65	80	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan	22	31,42	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	perempuan sesuai standar				
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	22,86	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	20	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30	30	%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86	82,86	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,8	11,8	per 100.000 penduduk	
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					Dinas Ketahanan Pangan
	Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	1,25	Angka	
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,38	0,45	Angka	
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	55	55	%	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,7	87,7	kg/kapita/tahun	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,7	87,7	kg/kapita/tahun	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	0,01	%	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	92	90	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80	80	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	100	%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	100	%	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	4,76	%	
	Persentase kabupaten/kota	2,85	2,85	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	yang meningkat kualitas udara ambiennya				
	Persentase pengujian kualitas air	100	100	%	
	Persentase pemantauan kualitas udara	100	100	%	
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	0,4	0,4	%	
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	2,6	%	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase limbah B3 yang terkelola	80	80	%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	100	%	
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	50	%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	10,5	10,5	%	
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	33	33	%	
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	25	%	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pengaduan yang ditangani	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sampah yang tertangani	43	43	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98	98	%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	99	99	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	66,67	66,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENATAAN DESA					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	59,32	59,32	%	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	100	%	
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan desa				
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	13,24	13,24	%	
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design	57	83,33	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan				
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65,99	69,47	%	
	Unmetneed	9,9	7,78	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	32	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Dinas Perhubungan
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,39	0,39	Angka	
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,985	0,985	Angka	
	Rasio trayek angkutan jalan	0,56	0,56	Angka	
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	67,34	67,34	%	
	Rasio pemanfaatan terminal	0,229	0,229	Angka	
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,52	0,52	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,25	0,25	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,95	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,84	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,02	0,02	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,94	0,94	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,84	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,21	0,21	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,95	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,84	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,24	0,24	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,94	0,94	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,84	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,18	0,18	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,95	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,84	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,22	0,22	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,95	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,84	0,84	Angka	
	Rasio konektivitas perkotaan	0,483	0,483	Angka	
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	53	53	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,378	0,378	Angka	
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,4	0,4	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					Dinas Perhubungan
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,08	0,08	Angka	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	81	81	Angka	
	Nilai keterbukaan informasi publik	33	33	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	74	74	%	
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	47	47	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
PROGRAM PENGAWASAN DAN					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PEMERIKSAAN KOPERASI					
	Persentase koperasi berkualitas	26,74	26,74	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	11,5	11,5	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi provinsi produktif	48,53	48,53	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase usaha mikro mandiri	82,3	82,3	%	
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	25	25	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase UMKM siap bermitra	23,08	23,08	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	50	%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	67	67	%	
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	50	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91	91	%	
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	%	
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	22	22	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah wirausaha muda mandiri	10	10	Orang	
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	75	75	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan perolehan medali	31,25	31,25	%	
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	105	105	Orang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	48	48	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	50	50	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	20,78	24,09	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	26,16	26,16	%	
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	52,38	52,38	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase cakupan pelestarian seni	100	100	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi seni tradisi	11,1	11,1	%	
PROGRAM PEMBINAAN Sejarah					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase akses literasi sejarah	53,1	53,1	%	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	13,15	13,15	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	26,73	26,73	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,9	89,9	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	88,89	88,89	%	
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam kebudayaan gemar membaca	61,54	61,54	%	
	Nilai survey kepuasan masyarakat	80	85,1	Nilai	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	92,25	92,25	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	30,26	42,1	%	
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	100	%	
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	79	79	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	20	20	%	
	Persentase arsip yang diselamatkan	65,92	65,92	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi garam	2	2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	5	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	4	4	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2,93	2,93	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	7,8	7,8	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan tangkap	5	5	%	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,54	108,54	Angka	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	50	50	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72	72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	72,72	72,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	81,82	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan	70	70	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	kepelabuhanan PPP Klidanglor				
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	71,72	71,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	81	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	72,27	72,27	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	100	%	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	5	%	
	Produksi perikanan budidaya	609.000	609.000	Ton	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,55	111,55	Angka	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA					Dinas Kelautan dan Perikanan

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	70	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja	2	2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Cabdin Wilayah Timur				
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	61	%	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan ikan	160.800	160.800	Ton	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	4	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	26,67	26,67	%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan	54.069.703	54.069.703	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	8	8	Kabupaten/Kota	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	33,87	33,87	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	2,5	%	
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	93	93	%	
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	2,5	%	
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	100	%	
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	3	%	
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	7420274	m	
	Produksi kedelai	52762	52762	Ton	
	Produksi jagung	3583730	3287481	Ton	
	Produksi padi	9613469	9287932	Ton	
	Produksi bawang merah	527875	527875	Ton	
	Produksi cabai	346115	346115	Ton	
	Produksi durian	153410	153410	Ton	
	Produksi jahe	35908	35908	Ton	
	Produksi melati	25120	25120	Ton	
	Produksi kopi	26005	26771	Ton	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Produksi tebu	2562216	3670565	Ton	
	Produksi kelapa	167187	166871	Ton	
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2	2	%	
	Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	1,5	1,5	%	
	Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	1,5	1,5	%	
	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	1,5	1,5	%	
	Persentase layanan sertifikasi benih	100	100	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	85	%	
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	3	%	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	1	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi	12	12	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong				
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	12	12	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	12	12	%	
	Jumlah populasi ternak potong	3.745.066	3.745.066	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak perah	113.440	113.440	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak petelur	247.848	247.848	(ST)/(AU)	
	Persentase fasilitasi obat hewan	1	1	%	
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	4	Dokumen	
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1	1	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1	1	%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7.420.274	7.420.274	m	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	12	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	12	12	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	12	12	%	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	4	Dokumen	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	7	7	%	
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	3,5	3,5	%	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	4	Dokumen	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	4	Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	10	10	%	
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	15	%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,08	1,08	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,62	3,62	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,29	2,29	%	
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	2,5	%	
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	45,99	45,99	%	
	Persentase lahan kritis tertangani	0,22	0,22	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	100	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,01	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,01	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,01	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,02	0,02	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,02	0,02	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,03	0,03	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,03	0,03	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,02	0,02	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	0	0	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,01	0,01	%	
	Persentase peningkatan produksi bibit	-90	-90	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,02	0,02	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,03	0,03	%	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	10	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	60	60	%	
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	71	71	Angka	
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	100	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase peningkatan	2,5	2,5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	kelas kelompok masyarakat				
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,3	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	0,3	%	
PROGRAM PENGELOLAAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,6	27,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,7	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,5	3,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,9	1,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,3	2,3	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,2	4,2	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,9	1,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,5	2,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,7	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,8	2,8	%	
	Persentase pelayanan	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pengujian air tanah di Jawa Tengah				
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	3	3	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,9	2,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,7	1,7	%	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	45	45	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	45	45	%	
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	100	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	45	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	45	45	%	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	91370,61	83109,33	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	30,58	32,19	SBM	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	18,35	19,32	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	39241,43	41306,77	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	61,17	64,39	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	61,17	64,39	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	45,88	48,29	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	61,17	64,39	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	61,17	64,39	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur	39259,78	41316,43	SBM	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan				
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	30,58	32,19	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	61,17	64,39	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	30,58	32,19	SBM	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	65,04	65,04	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,77	49,77	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,27	51,27	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan	50,08	50,08	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara				
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,42	49,42	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	50,05	50,05	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	50,05	50,05	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,74	49,74	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,64	49,64	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,66	49,66	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan	52,13	52,13	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	(K2) Wilayah Semarang Demak				
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,72	49,72	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,12	49,12	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8,6	8,6	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	10	10	%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan realisasi	15	15	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	transaksi di pusat sarana distribusi				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	9	9	%	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	91	0	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	10	0	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	4,05	4,05	%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1,05	1,05	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	0,1	0,1	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	1,57	%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi	15	15	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pameran dalam negeri				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,5	2,5	%	
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,5	2,5	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	6,67	6,67	%	
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85	85	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,39	4,39	%	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	9	9	%	
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	5	5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	6,95	6,95	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71	3,71	%	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71	3,71	%	
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	70	70	%	
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	88,57	88,57	%	
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis	90	90	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	jabatan secara efektif				
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	36,59	36,59	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	48,57	48,57	%	
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	69,05	69,05	%	
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	92	92	%	
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	91,01	91,01	%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					Sekretariat Daerah
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	95	%	
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	95	%	
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	95	%	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan	83	83	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	rakyat bidang pelayanan dasar				
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	84	84	%	
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	60	60	%	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	97	100	%	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	97	100	%	
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	100	%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	100	%	
PROGRAM PEREKONOMIANDAN PEMBANGUNAN					Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	87	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	85	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	85	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian	84	84	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	makro yang diusulkan sebagai kebijakan				
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	79	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86	86	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82	82	%	
	Persentase nilai kemandirian BLUD	56	56	%	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	91	91	%	
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	82	82	%	
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	82	82	%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					Sekretariat Daerah
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,8	98,8	%	
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	95,5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase realisasi bantuan keuangan	85	85	%	
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	86	86	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	100	%	
SEKRETARIAT DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					Sekretariat DPRD
	Persentase layanan bagian humas	95	95	%	
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	95	%	
PERENCANAAN					
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	100	%	
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	100	%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya				
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	100	%	
KEUANGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	100	%	
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	100	%	
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	100	%	
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	89,86	89,86	%	
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100	100	%	
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	100	%	
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	73	73	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	3,19	3,19	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	100	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	-17	-17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	4,34	4,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	13,17	13,17	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	14,69	14,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	-29,99	-29,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	-12,96	-12,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	-0,21	-0,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi	18,67	18,67	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II				
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	13,55	13,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	-19,28	-19,28	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	-21,14	-21,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	19,63	19,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	17,95	17,95	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	13,55	13,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	-26,14	-26,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan	-13,7	-13,7	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	-11,35	-11,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	21,18	21,18	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	13,33	13,33	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	-31,07	-31,07	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	-6,82	-6,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	2,58	2,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	12,37	12,37	%	
	Persentase penanganan piutang pajak	12,67	12,67	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	-8,84	-8,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	-6,82	-6,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	32,23	32,23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	11,16	11,16	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	13,45	13,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	-15,64	-15,64	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD	-12,89	-12,89	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Demak				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	5,28	5,28	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	14,09	14,09	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	13,67	13,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-15,78	-15,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-9,14	-9,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	-11,08	-11,08	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	15,03	15,03	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	13,66	13,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	-32,48	-32,48	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	-10,64	-10,64	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	0,55	0,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,93	13,93	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,57	13,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	-15,94	-15,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor	-16,34	-16,34	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	(BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	-1,14	-1,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	7,6	7,6	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	13,67	13,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	-19,81	-19,81	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	-22,66	-22,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	-4,52	-4,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	6,99	6,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan	13,54	13,54	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-17,6	-17,6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-14,9	-14,9	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-16,09	-16,09	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	10,38	10,38	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	13,62	13,62	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-22,78	-22,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD	-7,55	-7,55	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Wonogiri				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	-21,29	-21,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	15,75	15,75	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	13,46	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-10,91	-10,91	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-22,6	-22,6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	-0,41	-0,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	23,37	23,37	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	13,52	13,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-16,92	-16,92	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-13,53	-13,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	14,18	14,18	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	6,13	6,13	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	13,53	13,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	-19,95	-19,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea	-15,98	-15,98	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	-6,74	-6,74	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	20,59	20,59	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	13,46	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	-22,72	-22,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	-13,35	-13,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	14,7	14,7	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	21,32	21,32	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi	13,64	13,64	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	-23,29	-23,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	-9,37	-9,37	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	7,95	7,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	27,65	27,65	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	14,95	14,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	-22,3	-22,3	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	-17,98	-17,98	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	-11,69	-11,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	12,52	12,52	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	13,63	13,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	-15,04	-15,04	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	-18,29	-18,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	-4,88	-4,88	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-35,43	-35,43	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	13,32	13,32	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Jepara				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-50,2	-50,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	-21,25	-21,25	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	18,98	18,98	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	13,51	13,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-4,14	-4,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-14,89	-14,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	-14,86	-14,86	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan	17,76	17,76	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan				
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	12,72	12,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	-3,73	-3,73	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	-19,2	-19,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	4,69	4,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	9,37	9,37	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	15,87	15,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB)	-10,34	-10,34	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	UPPD Kabupaten Pemalang				
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-8,82	-8,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	7,36	7,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	9,48	9,48	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	13,37	13,37	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-50,2	-50,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	3,51	3,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	78,96	78,96	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,19	19,19	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	13,68	13,68	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	2,02	2,02	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	12,3	12,3	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	13,63	13,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	11,08	11,08	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	2,01	2,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD	9,72	9,72	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Brebes				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	13,3	13,3	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	12,68	12,68	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	13,72	13,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-15,84	-15,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-11,67	-11,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	-10,17	-10,17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	9,36	9,36	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	13,46	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-17,17	-17,17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-10,5	-10,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	2,39	2,39	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	31,53	31,53	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	13,57	13,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-21,96	-21,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea	-17,71	-17,71	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	4,55	4,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	22,05	22,05	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	13,41	13,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-0,46	-0,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-14,93	-14,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	4,31	4,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	6,97	6,97	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Banjarnegara				
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,21	13,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-67,77	-67,77	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	-24,5	-24,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	-4,53	-4,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	21,75	21,75	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	13,43	13,43	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	-5,76	-5,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama	-11,38	-11,38	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang				
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	19,12	19,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	11,24	11,24	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	13,58	13,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-13,87	-13,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-7,41	-7,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	-6	-6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	20,73	20,73	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Kebumen				
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	13,59	13,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-27,79	-27,79	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-7,4	-7,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	-2,81	-2,81	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	32,02	32,02	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	13,71	13,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-9,56	-9,56	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-13,52	-13,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	11,47	11,47	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	19,39	19,39	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	13,36	13,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-15	-15	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-24,1	-24,1	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	-3,04	-3,04	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan	5,55	5,55	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo				
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	13,46	13,46	%	
KEPEGAWAIAN					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	100	%	
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	100	%	
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	100	%	
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	dan kompetensi ASN				
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	100	%	
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	100	%	
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	3,5	Angka	
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	100	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	100	%	
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	100	%	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					Badan Penghubung
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	100	%	
INSPEKTORAT DAERAH					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					Inspektorat
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	84	84	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	86	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	86	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	86	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	86	86	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					Inspektorat
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	12,24	12,24	%	
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	12,24	12,24	%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ideologi Pancasila	3,1	3,1	Nilai	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	76	76	Nilai	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kinerja ormas	77,87	77,87	Nilai	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks toleransi	74,3	74,3	%	
	Indeks penguatan dampak ekonomi	3,1	3,1	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET		SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	RKPD -P 2025		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kewaspadaan Nasional	73,5	73,5	Angka	

BAB VII

PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika atas pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Perubahan terjadi pada kondisi baik dalam tataran global maupun nasional, turut memberi dampak terhadap kebijakan nasional maupun regional. Sehingga penyesuaian pada sisi kebijakan baik secara nasional maupun regional sangat diperlukan agar dapat mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Penyesuaian RKPD 2025 salah satunya adalah pada program/kegiatan sesuai Asta Cita dan Visi Misi Gubernur. Sehingga perlu adanya perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain pada Program/Kegiatan dan target kinerja. Penyesuaian pada beberapa target kinerja diharapkan dapat memperkuat beberapa hal yang akan menjadi daya ungkit terhadap pembangunan Jawa Tengah di tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 juga sebagai *baseline* RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Perubahan RKPD akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dokumen perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.

Pelaksanaan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Kerja sama dan kolaborasi oleh semua pihak dalam pembangunan akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									5.242.010.512.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75.07		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								5.177.452.197.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.25	5.177.452.197.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.177.452.197.000		
						Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.128.909.038.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.084.147.349.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.084.147.349.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.081.921.333.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32844	5.081.921.333.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.226.016.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.226.016.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					504.308.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	504.308.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.640.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	2.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.000.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				375.695.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	375.695.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.000.6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				95.365.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	5	95.365.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.000.7			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				30.608.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	30.608.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					252.611.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	252.611.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000.3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				133.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3	133.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.000.5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.791.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	25.791.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.001.0			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				14.388.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	80	14.388.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.001.1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				78.932.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	220	78.932.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.397.771.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.397.771.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				160.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				166.040.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	166.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				325.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				170.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				455.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	455.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				850.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				53.213.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	53.213.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				178.518.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	178.518.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.530.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	225	4.530.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				250.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.280.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	3.280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.916.572.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	34.916.572.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.825.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.825.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	97.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				32.987.372.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	32.987.372.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.160.427.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	407	2.160.427.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				218.975.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	218.975.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				45.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	200	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan	12	67.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				9.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				54.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	54.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.383.452.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.383.452.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				270.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	153	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				112.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	112.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.036.794.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					65.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				65.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.499.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	276.499.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.499.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	49.499.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					756.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	756.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				525.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	525.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				231.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	231.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					670.537.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	670.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.375.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				314.162.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	314.162.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.268.758.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	539	1.268.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.660.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	22.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	369	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.598.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	493	48.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.007.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.007.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.075.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	283.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	75.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					240.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				75.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				165.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	16	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					458.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	458.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				278.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	278.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	93.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	33	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.344.918.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.800.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					256.918.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	256.918.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.800.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.968.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	52.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.650.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	8.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					378.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	378.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	127.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	105	565.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				9.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	22	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	70	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				112.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				220.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	220.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				157.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	939.807.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.825.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	294.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.875.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.650.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	61.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					101.375.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	101.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.375.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	31	101.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					413.137.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	413.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.825.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				283.312.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	283.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.970.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	118.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.970.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	2.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	Unit	24	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	10	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.572.390.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.846.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	2.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.846.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					263.668.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	263.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.481.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	21.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.387.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	24.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.650.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.150.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	25.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					745.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	745.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				60.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				285.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					378.900.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	378.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				118.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	118.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				248.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	248.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.976.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	181.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.676.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	15.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	11.912.366.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					236.466.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	2	236.466.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.216.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	73.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Paket	12	41.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.270.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	10.270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.220.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	149	10.220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					880.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	880.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					525.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	280	525.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.200.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				27.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	210	114.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				54.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				261.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	261.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawiaan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.412.760.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					303.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	303.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.750.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	36.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					888.590.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	888.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				406.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	406.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				482.090.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	18	482.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					561.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	561.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	190.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	5.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				364.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	364.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.609.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	1.609.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				9.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.515.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.515.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.945.135.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.975.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	257.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				54.975.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	54.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.157.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	2.157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					425.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	425.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				184.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	184.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.760.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	95	103.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.260.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	27.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.613.960.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					623.480.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	623.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	43.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				83.760.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	83.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				267.940.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	267.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					957.280.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	23	957.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				190.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	190.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				766.780.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	766.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					431.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	431.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				265.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					571.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	571.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X-XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Unit	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.484.959.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					396.589.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	396.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.610.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	121.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.650.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	34.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.080.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	30.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114.249.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	114.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					885.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	885.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				14.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				393.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22	393.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				477.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	477.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.970.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.970.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				680.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	680.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.193.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	28	1.193.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				16.070.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	16.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	112.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				36.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				749.350.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	749.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.650.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	110.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.951.249.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					379.799.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	379.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				158.299.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	158.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					409.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	409.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				200.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	40	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					477.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	477.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	308.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	654.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				16.200.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				140.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				445.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	445.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.467.361.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					413.701.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	413.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.136.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.565.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	21.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.330.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	1.330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				750.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				580.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	580.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					343.160.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	343.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	54.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	24	350.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				267.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	267.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.032.690.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.390.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	421.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				56.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	56.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.524.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	57.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118.866.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	118.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					710.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	7	710.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				710.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	10	710.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.028.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.028.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				632.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	632.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.381.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.381.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.828.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	22	2.828.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	95.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.545.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.545.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.322.490.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					320.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	320.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	70.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					433.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	433.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				294.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	294.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.890.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	68.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.290.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	24.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	26.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.237.300.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					230.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	230.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				44.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					206.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				156.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	156.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					456.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	456.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	308.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				9.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				135.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.193.380.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					350.060.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	350.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	26.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.197.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	46.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	33.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.060.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	43.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.753.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	70.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.950.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	117.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					840.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	16	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				200.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				340.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					642.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	21	642.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.930.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				380.410.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	380.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				258.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.980.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	146	360.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	39.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.530.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	28.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								64.558.315.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.28	64.558.315.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						64.558.315.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	64.558.315.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					64.558.315.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Angka	100	64.558.315.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				63.801.116.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	63.801.116.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				757.199.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	757.199.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif									3.362.824.753.000		
						Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.96		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.14		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan								449.312.952.000		
						APK SMA, SMK dan SLB	%	83.29	449.312.952.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						447.838.114.000		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90.9	26.160.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.320.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	76.68	16.320.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				15.720.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	15.720.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				400.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				200.000.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					7.600.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	91	7.600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				7.100.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	1	7.100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.240.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90.08	2.240.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.240.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	2.240.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76.84	8.318.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.938.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	30.572	1.938.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				850.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	850.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				888.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	888.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					5.920.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	41.111	5.920.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				480.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	480.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				5.290.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	23	5.290.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					460.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	75	460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				460.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	77.96	23.112.410.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.441.360.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	72.4	16.441.360.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah				16.091.360.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	Ruang	69	16.091.360.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					5.911.050.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	88.5	5.911.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				5.511.050.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	24	5.511.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					760.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	81.8	760.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				760.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	760.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	75.1	35.733.002.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.706.502.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	73.7	21.706.502.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				679.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	679.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				20.578.165.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	90	20.578.165.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				243.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	108	243.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				206.337.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	206.337.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					11.702.500.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	43.95	11.702.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.627.500.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	3.627.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				735.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	744	735.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				7.340.000.000		
				Pengelolaan Pendidikan Khusus		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	32	7.340.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	42.98	2.324.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				204.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	204.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.020.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	9	2.020.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	81.25	23.866.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.930.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	81.02	13.930.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				13.930.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	26	13.930.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					9.786.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	88.43	9.786.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.000.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				500.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				546.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	546.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				800.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				6.940.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	18	6.940.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	86.94	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	94.23	44.391.798.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					28.367.505.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	69.37	28.367.505.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.000.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				27.169.725.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	119	27.169.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				197.780.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	197.780.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.595.003.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	88.09	15.595.003.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				94.500.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	94.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				15.500.503.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	67	15.500.503.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					429.290.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	92.52	429.290.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				429.290.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	429.290.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	80.17	19.385.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					14.460.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	85	14.460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				14.460.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	127	14.460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.835.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	89	2.835.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				105.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	105.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.730.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	42	2.730.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.090.200.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	88	2.090.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.090.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	23	2.090.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72.84	7.241.300.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					4.081.300.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	50.28	4.081.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				4.081.300.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	24	4.081.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.010.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	64.18	2.010.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.010.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	12	2.010.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	96.0101	1.150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	8	1.150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77.25	12.554.495.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.020.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	78.4	9.020.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.250.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	1.250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				7.070.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	32	7.070.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				600.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	5	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.650.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	89.6	2.650.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				300.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				150.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				150.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				300.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.600.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	8	1.600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					884.495.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	81.07	884.495.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				250.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				634.495.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	6	634.495.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	78.06	29.623.942.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					27.857.920.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	66.9	27.857.920.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				27.807.920.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	122	27.807.920.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				50.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.696.022.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	88.98	1.696.022.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.696.022.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	27	1.696.022.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					70.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	89.99	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				70.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	88.14	22.884.108.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.980.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	82.96	13.980.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				13.320.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	60	13.320.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				500.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	160.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.590.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	84.96	2.590.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				900.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.690.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	7	1.690.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					6.314.108.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	83.96	6.314.108.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	160.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				6.154.108.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	47	6.154.108.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81.4	70.957.183.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					48.787.183.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	80.5	48.787.183.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				48.187.183.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	229	48.187.183.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				600.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.860.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	88.2	15.860.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				400.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				400.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				15.060.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	64	15.060.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					6.310.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	88.7	6.310.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				6.310.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	28	6.310.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88.26	16.952.038.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.432.038.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	75.26	9.432.038.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				9.232.038.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	51	9.232.038.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					7.060.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	84.77	7.060.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				6.860.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	30	6.860.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					460.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	81.12	460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				460.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	460.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	18.56	1.317.270.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.317.270.000		
						Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	20	1.317.270.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				515.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	515.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				802.270.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	14	802.270.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	90	910.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					910.100.000		
						Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	570	910.100.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				510.100.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	5	510.100.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				400.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	131	400.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	76.5	71.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					71.200.000.000		
						Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	Angka	213	71.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				71.200.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	229	71.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	0.85	3.784.769.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.784.769.000		
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	Angka	2	3.784.769.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				3.784.769.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3.784.769.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	1	17.635.399.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.635.399.000		
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	Angka	5	17.635.399.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				17.635.399.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	17.635.399.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0.6	11.811.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					11.811.100.000		
						Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	Angka	3	11.811.100.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				11.811.100.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	11.811.100.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						851.994.000		
						Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	78.2	851.994.000	Bidang Ketenagaaan Dikbud	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					851.994.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Orang	24132	851.994.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.0001			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				851.994.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	4	851.994.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						622.844.000		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	46.173.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					46.173.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Dokumen	3	46.173.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				46.173.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	46.173.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	100	94.054.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					94.054.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	15	94.054.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				94.054.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	15	94.054.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	94.29	145.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					145.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen	75	145.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				145.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	75	145.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	26.713.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.756.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	10.370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.370.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	10.370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	10.386.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.386.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	10.386.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.957.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN I	Dokumen	2	5.957.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.957.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.957.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	20.217.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					15.300.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN II	Angka	3	7.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				7.650.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	7.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN II	Angka	3	7.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				7.650.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	7.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					4.917.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN II	Angka	1	4.917.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4.917.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	4.917.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	15	30.978.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					25.803.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN III	Dokumen	1	12.890.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12.890.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	12.890.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN III	Dokumen	2	12.913.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12.913.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	12.913.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.175.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN III	Dokumen	1	5.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.175.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	15	28.377.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					22.735.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IV	Dokumen	1	11.565.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				11.565.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	11.565.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN IV	Dokumen	2	11.170.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				11.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	11.170.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.642.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IV	Dokumen	1	5.642.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.642.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.642.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	50	55.440.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					47.830.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IX	Dokumen	1	22.030.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					22.030.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	22.030.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	Dokumen	8	25.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					25.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	25.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					7.610.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IX	Dokumen	1	7.610.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					7.610.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	7.610.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	25	21.965.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					19.330.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN V	Dokumen	1	10.080.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.080.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.080.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN V	Dokumen	1	9.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					9.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	9.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.635.000		
						Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	2.635.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2.635.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN V	Dokumen	1	2.635.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	25.260.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					19.885.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VI	Dokumen	1	9.940.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				9.940.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen	Dokumen	1	9.940.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VI	Dokumen	1	9.945.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				9.945.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	9.945.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.375.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VI	Dokumen	1	5.375.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.375.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.375.000		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	20.090.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					17.240.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VII	Dokumen	2	10.090.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.090.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	10.090.000		OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VII	Dokumen	2	7.150.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				7.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	7.150.000		OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.850.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VII	Dokumen	2	2.850.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2.850.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	2.850.000		OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	3.700.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.200.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	Dokumen	2	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	Dokumen	2	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					1.500.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	Dokumen	2	1.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	2.71	36.177.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					30.412.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN X	Dokumen	1	20.412.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.412.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.412.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN X	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.765.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN X	Dokumen	1	5.765.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.765.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.765.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,76	24.645.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					19.645.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XI	Dokumen	1	10.410.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.410.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.410.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XI	Dokumen	1	9.235.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				9.235.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	9.235.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XI	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	24.470.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					19.370.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XII	Dokumen	2	10.135.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.135.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.135.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XII	Dokumen	2	9.235.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				9.235.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	9.235.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.100.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XII	Dokumen	1	5.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	19.585.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					16.690.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	Dokumen	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	Dokumen	2	9.190.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				9.190.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	9.190.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.895.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	Dokumen	1	2.895.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2.895.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	2.895.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
	Meningkatnya mutu pendidikan								2.875.183.633.000		
						Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85.94	458.646.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						458.646.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89.56	33.512.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					25.572.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	45	13.222.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				13.222.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	13.222.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	126	12.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				12.350.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	12.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.940.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	8	7.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.940.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	7.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81.72	17.375.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					10.500.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	55	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				5.250.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	107	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				5.250.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					6.875.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	2	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				6.875.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	%	100	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83.77	41.755.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					33.925.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	45	12.925.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				12.925.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	12.925.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	70	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				21.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.830.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	7	7.830.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.830.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.830.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	82.27	24.020.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.035.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	6.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				6.725.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun	Dokumen	2	6.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	0	13.310.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				13.310.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen	2	13.310.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					3.985.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	3.985.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				3.985.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	3.985.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	86.35	42.225.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					36.875.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	66	15.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.725.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	15.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	154	21.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				21.150.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	21.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					5.350.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	14	5.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.350.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	5.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88.84	40.797.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					30.740.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	66	12.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				12.800.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	60	12.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	116	17.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				17.940.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	108	17.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					10.057.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Angka	32	10.057.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				10.057.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	29	10.057.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86.99	34.735.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					26.950.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	33	13.475.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				13.475.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun	Dokumen	1	13.475.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	26	13.475.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				13.475.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Yang Tersusun	Dokumen	1	13.475.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.785.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	4	7.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.785.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	Dokumen	1	7.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	89.33	28.243.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					22.984.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	60	10.104.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.104.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	10.104.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	80	12.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				12.880.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	12.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					5.259.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	24	5.259.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.259.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	5.259.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89.53	6.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					5.500.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	33	2.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				2.750.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	2.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	20	2.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				2.750.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	2.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					1.100.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	14	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				1.100.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	1.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	81.47	84.135.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					76.410.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	60	36.410.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				36.410.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	36.410.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	146	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				40.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.725.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	8	7.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.725.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	7.725.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83.77	50.829.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					42.692.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	41	12.860.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				12.860.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	12.860.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	112	29.832.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				29.832.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	29.832.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					8.137.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	4	8.137.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				8.137.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	8.137.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85.8	29.425.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					23.200.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	65	11.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				11.825.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	11.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	150	11.375.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				11.375.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	11.375.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					6.225.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	5	6.225.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				6.225.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	6.225.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86.56	24.995.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					19.240.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	56	9.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				9.620.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	9.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	80	9.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				9.620.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	9.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					5.755.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	8	5.755.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.755.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	5.755.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	67.25	2.874.724.987.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.874.724.987.000		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68.18	1.004.887.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.004.887.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	Angka	15	1.004.887.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.004.887.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	1.004.887.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	56	1.819.346.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.819.346.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	Angka	93	1.819.346.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.819.346.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	93	1.819.346.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	7.5	268.245.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					103.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	9	103.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				103.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	50	103.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					95.368.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	17	95.368.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				95.368.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	95.368.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					69.377.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	3	69.377.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				69.377.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2	69.377.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	4.2	296.950.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					139.053.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	3	139.053.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				139.053.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	150	139.053.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					131.147.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	131.147.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				131.147.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	150	131.147.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					26.750.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	26.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				26.750.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	26.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	9.5	241.427.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					67.681.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	7	67.681.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				67.681.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	67.681.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					117.114.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	15	117.114.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				117.114.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	117.114.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					56.632.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	2	56.632.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				56.632.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	56.632.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1.5	193.675.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					82.570.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	3	82.570.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				82.570.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	134	82.570.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					39.030.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	1	39.030.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				39.030.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	50	39.030.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					72.075.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	1	72.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				72.075.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	28	72.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	5,5	278.025.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					76.300.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	1	76.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				76.300.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	76.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					155.200.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	5	155.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				155.200.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	155.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					46.525.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	2	46.525.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				46.525.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	46.525.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1.93	277.678.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					121.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	9	121.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				121.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	121.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					106.450.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	106.450.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				106.450.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	6	106.450.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					49.728.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	49.728.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				49.728.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Unit	3	49.728.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	4	189.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					74.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	21	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				74.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					74.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	21	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				74.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					41.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	7	41.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				41.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	35	41.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2.75	105.486.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					38.565.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	22	38.565.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				38.565.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	38.565.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					39.376.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	8	39.376.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				39.376.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	39.376.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					27.545.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	7	27.545.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				27.545.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	27.545.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	8.7	111.987.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					40.400.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	40.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				40.400.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	40.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					50.387.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	8	50.387.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.387.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	50.387.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					21.200.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	6	21.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				21.200.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	21.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	19.84	205.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					116.700.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	116.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				116.700.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	116.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	146	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					28.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	3	28.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				28.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	28.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4.84	369.724.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					132.824.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	7	132.824.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				132.824.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	35	132.824.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					182.189.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	6	182.189.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				182.189.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	40	182.189.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					54.711.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	4	54.711.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				54.711.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	16	54.711.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	2.08	180.435.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					75.540.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	6	75.540.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.540.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA	Siswa	32	75.540.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					60.665.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	5	60.665.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				60.665.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	22	60.665.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					44.230.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	5	44.230.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				44.230.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	44.230.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2.53	234.695.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					71.635.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	12	71.635.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				71.635.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	5	71.635.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.385.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	100.385.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.385.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	74	100.385.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					62.675.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	62.675.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				62.675.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	25	62.675.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	58.82	1.406.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.406.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	Angka	2256	1.406.500.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.406.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	1130	1.406.500.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	20	676.086.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					305.195.000		
						Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	5000	305.195.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0057			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				305.195.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	5000	305.195.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					313.311.000		
						Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	9000	313.311.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0050			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				313.311.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	9000	313.311.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					57.580.000		
						Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	550	57.580.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0056			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				57.580.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	550	57.580.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	84.1	3.402.856.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					797.464.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	Angka	13996	797.464.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				797.464.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	13996	797.464.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.507.232.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	Angka	955	2.507.232.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.507.232.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	955	2.507.232.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					98.160.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	Angka	725	98.160.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				98.160.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	725	98.160.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	86.34	79.171.864.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					31.212.200.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	6	46.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				46.815.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	46.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	44120	31.091.065.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				31.091.065.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	110	31.091.065.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	14158	74.320.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				74.320.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	110	74.320.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					44.267.233.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	681200	44.214.114.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				44.214.114.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	206	44.214.114.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	681200	53.119.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				53.119.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	206	53.119.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.692.431.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	1930	3.673.491.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.673.491.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	25	3.673.491.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	4704	18.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.940.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	18.940.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	83.73	41.409.785.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.917.842.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	28645	18.867.932.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				18.867.932.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	57	18.867.932.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	8932	49.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				49.910.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	49.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.443.011.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	39086	20.384.011.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.384.011.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	105	20.384.011.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	11634	59.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				59.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	59.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.048.932.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	660	2.034.192.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.034.192.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	2	2.034.192.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	136	14.740.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				14.740.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	14.740.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	85.71	53.963.091.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					20.577.652.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	24	40.025.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				40.025.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	40.025.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	35163	20.485.145.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				20.485.145.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	56	20.485.145.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	Siswa	10945	52.482.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				52.482.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	56	52.482.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					30.119.653.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	104	30.179.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.179.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.179.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	54427	30.048.027.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				30.048.027.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	101	30.048.027.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	9079	41.447.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				41.447.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	41.447.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.265.786.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	11	13.167.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				13.167.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	13.167.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	1749	3.234.056.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.234.056.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	3.234.056.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	375	18.563.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.563.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	18.563.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	71.25	34.040.319.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					11.997.200.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	58	7.995.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.995.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.995.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	28262	11.938.938.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				11.938.938.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	58	11.938.938.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	8556	50.267.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				50.267.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	58	50.267.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.667.350.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	112	7.995.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.995.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.995.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	48891	20.599.608.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.599.608.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	111	20.599.608.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	14667	59.747.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				59.747.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	111	59.747.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.375.769.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	11	4.010.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4.010.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	4.010.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	1053	1.348.624.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.348.624.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	1.348.624.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	316	23.135.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				23.135.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	11	23.135.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	88.9	81.353.008.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					26.565.671.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	68	15.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.800.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	45261	26.515.646.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				26.515.646.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	66	26.515.646.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	15087	34.225.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				34.225.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	66	34.225.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					51.907.599.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	154	20.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.900.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	20.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	96914	51.781.819.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				51.781.819.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	154	51.781.819.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	30286	104.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				104.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	154	104.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.879.738.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	14	8.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				8.125.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	8.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	2218	2.853.438.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.853.438.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	14	2.853.438.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	738	18.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.175.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	14	18.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	99.5	52.848.365.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.757.390.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	62	39.140.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				39.140.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	39.140.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30217	22.676.820.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.676.820.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	59	22.676.820.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	11531	41.430.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				41.430.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	41.430.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					28.478.585.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	109	38.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				38.200.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	38.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30843	28.402.158.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				28.402.158.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	109	28.402.158.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	10645	38.227.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				38.227.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	38.227.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.612.390.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	32	26.089.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				26.089.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	26.089.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	314	1.568.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.568.516.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	32	1.568.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	100	17.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				17.785.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	17.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	93	57.279.325.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.198.192.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	15	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	27992	21.136.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				21.136.512.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	59	21.136.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	11853	56.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				56.680.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	33	56.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					33.025.749.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	15	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	29182	32.964.069.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				32.964.069.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	131	32.964.069.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	22630	56.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				56.680.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	56.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.055.384.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	886	3.031.740.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.031.740.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	3.031.740.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	175	18.644.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.644.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	18.644.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	89.62	34.339.297.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					14.781.310.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	30638	14.739.120.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				14.739.120.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	60	14.739.120.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10507	42.190.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				42.190.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	60	42.190.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.630.698.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	41457	17.591.603.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.591.603.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	80	17.591.603.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10507	39.095.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				39.095.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	80	39.095.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.927.289.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	518	1.909.857.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.909.857.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	24	1.909.857.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	448	17.432.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				17.432.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	24	17.432.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76.13	53.136.246.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					25.159.454.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Siswa	36385	25.120.124.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				25.120.124.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	89	25.120.124.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	11520	39.330.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				39.330.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	39.330.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					26.520.797.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	60855	26.466.617.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				26.466.617.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	122	26.466.617.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	19630	54.180.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				54.180.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	54.180.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.455.995.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	1505	1.437.870.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.437.870.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	1.437.870.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	446	18.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.125.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	18.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	85.17	55.914.014.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.882.838.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	79	24.401.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				24.401.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	24.401.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	39788	22.806.792.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.806.792.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	79	22.806.792.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	12940	51.645.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				51.645.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	79	51.645.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					31.388.512.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	147	61.126.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				61.126.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	61.126.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	90481	31.217.386.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				31.217.386.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	31.217.386.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	29188	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				110.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.642.664.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	10	6.040.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				6.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	6.040.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	361	1.616.143.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.616.143.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	1.616.143.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	361	20.481.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				20.481.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	8	20.481.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	78.48	38.134.389.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.269.549.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				25.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	28183	17.195.341.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				17.195.341.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	52	17.195.341.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	9099	49.208.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				49.208.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	42	49.208.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.479.376.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	8	52.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				52.175.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	52.175.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	54637	19.379.905.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.379.905.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	113	19.379.905.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	16406	47.296.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				47.296.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	111	47.296.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.385.464.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	2	12.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				12.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	12.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	644	1.352.269.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.352.269.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.352.269.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	165	20.695.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				20.695.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	20.695.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	83	58.613.926.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.663.300.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	65	22.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				22.800.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	22.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	34989	21.610.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				21.610.476.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	65	21.610.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	11663	30.024.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				30.024.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	65	30.024.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.475.627.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	146	22.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				22.300.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	22.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	93058	34.419.492.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.419.492.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	34.419.492.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	31020	33.835.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				33.835.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	33.835.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.474.999.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	5.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5.550.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	5.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	1700	2.460.479.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.460.479.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	5	2.460.479.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	566	8.970.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				8.970.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	8.970.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	88.05	42.043.216.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.044.459.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	24800	17.990.223.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				17.990.223.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	60	17.990.223.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	8050	54.236.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				54.236.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	60	54.236.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					22.198.011.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	46700	22.148.809.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				22.148.809.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	87	22.148.809.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	14040	49.202.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				49.202.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	89	49.202.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.800.746.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	1410	1.774.866.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.774.866.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	1.774.866.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	325	25.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				25.880.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	9	25.880.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	20	894.003.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					431.932.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	171	431.932.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0058			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				431.932.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	18	431.932.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					271.092.000		
						Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	319	271.092.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0051			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				271.092.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	22	271.092.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					190.979.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	38	190.979.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0057			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				190.979.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	14	190.979.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	85.340.497.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					85.340.497.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	Angka	21443	84.892.118.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				84.892.118.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Siswa	188	84.892.118.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	5	448.379.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				371.015.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	30	371.015.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				77.364.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	188	77.364.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	79.12	730.154.227.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					730.154.227.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	Siswa	426470	720.863.162.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				720.863.162.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Siswa	853	720.863.162.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	2	9.291.065.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				9.122.242.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	876	9.122.242.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				168.823.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	168.823.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	54.5	1.364.827.213.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.364.827.213.000		
						Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	Siswa	1276225	1.343.971.613.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.343.971.613.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	1528	1.343.971.613.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	Angka	1547	20.855.600.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.160.600.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1547	19.160.600.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.695.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1593	1.695.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun								38.328.168.000		
						Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70.97	38.328.168.000		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						38.328.168.000		
						Persentase angka putus sekolah SLB	%	3.2	2.869.555.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.869.555.000		
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB	Kegiatan	6	450.555.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0059			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				450.555.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10	450.555.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	0	2.014.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				2.014.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	2007	2.014.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
						Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	4707	405.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0038			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				405.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2700	405.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMA	%	2.28	13.982.663.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.982.663.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA	Kegiatan	1	119.423.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0060			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				119.423.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	119.423.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	Siswa	38995	13.863.240.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0039			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.947.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	32985	4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				8.916.240.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	6010	8.916.240.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMK	%	0.024	21.475.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					21.475.950.000		
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK	Kegiatan	4	100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0053			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	57257	21.375.950.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0031			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	50253	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				8.786.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	7893	8.786.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0060			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.052.000.000		
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	10000	5.052.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat									33.347.185.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan					Angka Melek Budaya	%	53.82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
									23.300.067.000		
						Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31.7	23.300.067.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						513.995.000		
						Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	52.38	513.995.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					513.995.000		
						Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	%	6.46	513.995.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				513.995.000		
						Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	2136	513.995.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						22.786.072.000		
						Tingkat partisipasi seni tradisi	%	11.1	22.786.072.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					22.786.072.000		
						Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	%	26.74	22.786.072.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.03.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				22.786.072.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	814	22.786.072.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
	Meningkatnya pelestarian budaya								7.316.432.000		
						Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16.89	7.316.432.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3.720.054.000		
						Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	2.506.083.000		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					2.506.083.000		
						Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	Kelompok	275	2.506.083.000		
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.506.083.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis	22	2.506.083.000		OPD Provinsi
						Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	24.09	1.213.971.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.213.971.000		
						Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	%	69.05	1.213.971.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.213.971.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Buah	29	1.213.971.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						693.597.000		
						Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	13.15	693.597.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					181.332.000		
						Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	%	8.77	181.332.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.01.000			Penetapan Cagar Budaya				181.332.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Buah	249	181.332.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					512.265.000		
						Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	%	93.23	512.265.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.000			Pemanfaatan Cagar Budaya				512.265.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Buah	27	512.265.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						2.902.781.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	90.11	2.902.781.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Pengelolaan Museum Provinsi					2.902.781.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	57500	2.902.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				804.521.000		
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Buah	2000	804.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.537.610.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan	7	1.537.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				560.650.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	560.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan								2.730.686.000		
						Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	23.44	2.730.686.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.992.992.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	26.16	1.992.992.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.992.992.000		
		2.22.02.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.992.992.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Buah	159	1.992.992.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						574.051.000		
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					574.051.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
						Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	%	53.55	574.051.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.04.1.01.0003			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				323.351.000		
						Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	Dokumen	545	323.351.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				250.700.000		
						Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	173	250.700.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						163.643.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	26.73	163.643.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					163.643.000		
						Persentase cagar budaya layak uji peringkat	%	8.55	163.643.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.000			Pelindungan Cagar Budaya				80.613.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Buah	281	80.613.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				83.030.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Buah	13	83.030.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
JUMLAH									8.638.182.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									451.798.510.000	Dinas Kesehatan	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.								445.114.754.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	51.69	445.114.754.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						443.992.790.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	68.5	381.678.570.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.450.000.000		
						Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100	2.450.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.450.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	2	2.450.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100	1.000.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				1.000.000.000		
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1.000.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					378.001.055.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar	%	99.49	377.656.114.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				377.656.114.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20	377.656.114.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	%	67.61	116.098.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				11.206.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	11.206.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0020			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				104.892.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25	104.892.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan	%	68.5	228.843.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				228.843.000		
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	27	228.843.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					227.515.000		
						Prosentase RS kelas B dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar	%	100	227.515.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				131.196.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	5	131.196.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				96.319.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	250	96.319.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	85	47.498.122.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					47.498.122.000		
						Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin	%	83	47.498.122.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.0025			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				218.533.000		
						Jumlah dokumen distribusi alkes, obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Dokumen	2	218.533.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				47.279.589.000		
						Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	Paket	9	47.279.589.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balikesmas Ambarawa	%	100	949.132.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					949.132.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balikesmas	%	100	949.132.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				79.525.000		
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	1	79.525.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				32.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	32.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				837.607.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	837.607.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	1.608.013.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					970.575.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	970.575.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				246.000.000		
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	2	246.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				140.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	1	140.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				62.400.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	62.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				522.175.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	522.175.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					637.438.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas	Angka	87	637.438.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	4	637.438.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	1.357.138.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					841.664.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	841.664.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				144.800.000		
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	1	144.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	40.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				656.864.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	656.864.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					515.474.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	88	515.474.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				515.474.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	515.474.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	1.421.879.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					770.579.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	770.579.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				194.050.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	194.050.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				576.529.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	576.529.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					651.300.000		
						Angka Kepuasan Pasien di balkesmas	Angka	84.5	651.300.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				651.300.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	651.300.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	708.350.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					550.719.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	550.719.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				199.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	199.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				351.719.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	351.719.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					157.631.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	88	157.631.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				157.631.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	157.631.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	85	1.823.861.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.583.672.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM	%	85	1.583.672.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				19.700.000		
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Paket	10	19.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				155.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	155.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.408.972.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	1.408.972.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					240.189.000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	86	240.189.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				240.189.000		
						Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM	Angka	2	240.189.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	100	6.723.311.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					5.522.843.000		
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi	%	100	5.522.843.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				3.164.150.000		
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara	Unit	80	3.164.150.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.358.693.000		
						Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	15	2.358.693.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.200.468.000		
						angka kepuasan pelanggan	Angka	91	1.200.468.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.200.468.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	5	1.200.468.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	85	224.414.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					224.414.000		
						Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	%	100	224.414.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				224.414.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	8	224.414.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						957.635.000		
						Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	308.100.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					308.100.000		
						Persentase SDMk yang kompeten dan bermutu	%	90	308.100.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				308.100.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMk	Dokumen	6	308.100.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	649.535.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					649.535.000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	98	649.535.000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				649.535.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	212	649.535.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						164.329.000		
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	25	164.329.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					164.329.000		
						Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	85	164.329.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				164.329.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	Angka	35	164.329.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP								2.403.141.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	74.28	30.719.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						30.719.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	74.28	30.719.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.719.000		
						Prosentase Kab Kota Dengan pelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70%	%	74.27	30.719.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				30.719.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2	30.719.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2.372.422.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.064.655.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	40	1.064.655.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.064.655.000		
						Prosentase Kab/kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik	%	57.14	139.905.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				139.905.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dokumen	4	139.905.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase kab kota dengan kesling yang baik	%	62.86	271.879.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				271.879.000		
						Jumlah dokumen has?i pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4	271.879.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70%	%	60	44.937.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				44.937.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	44.937.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70%	%	71.42	607.934.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				607.934.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	607.934.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.307.767.000		
						Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	85.71	393.858.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					223.732.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan pergerakan Germas	%	85.71	223.732.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				223.732.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	223.732.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					170.126.000		
						Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah	%	25.71	170.126.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				170.126.000		
						Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Dokumen	12	170.126.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	182.889.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					182.889.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	Kabupaten/Kota	3	182.889.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				182.889.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	3	182.889.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.86	176.166.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					176.166.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	57.14	176.166.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				176.166.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	176.166.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57.14	198.689.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					198.689.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	6	198.689.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				198.689.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	198.689.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.86	172.841.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					172.841.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	42.86	172.841.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				172.841.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	172.841.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57.14	183.324.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					183.324.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	42.86	183.324.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				183.324.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	183.324.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA								3.192.413.000		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	1.376.788.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.376.788.000		
						Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	1.376.788.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.376.788.000		
						Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	%	85	1.073.923.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1.073.923.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	4	1.073.923.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan	%	100	302.865.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				139.103.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	Orang	30000	139.103.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				163.762.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar	Orang	1882	163.762.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	82	1.815.625.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.815.625.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	74.3	348.522.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					348.522.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB	%	40	348.522.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				348.522.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	9	348.522.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	74.3	564.666.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					564.666.000		
						Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa	%	74.3	564.666.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				204.196.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	5	204.196.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				360.470.000		
						Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2	360.470.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	85.71	599.221.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					117.634.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	117.634.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				21.291.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	500	21.291.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				96.343.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	96.343.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					481.587.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	86.75	481.587.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				481.587.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	481.587.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	57.146	63.346.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					63.346.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	63.346.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				21.391.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500	21.391.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				41.955.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	41.955.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	71.42	124.368.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					124.368.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	124.368.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				24.891.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	500	24.891.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				99.477.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	99.477.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	42.86	54.515.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					54.515.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	54.515.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				10.220.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500	10.220.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				44.295.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	44.295.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	71.42	60.987.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.987.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	60.987.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				1.897.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500	1.897.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				59.090.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	59.090.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
	MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI								1.088.202.000		
						Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	85	1.088.202.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.088.202.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	57.14	929.277.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					929.277.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30%	%	85.71	929.277.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				929.277.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	929.277.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrinng kesehatan remaja	%	42.85	43.693.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					43.693.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	3	43.693.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				43.693.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	43.693.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57.14	23.835.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					23.835.000		
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	4	23.835.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				23.835.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	23.835.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57.14	47.193.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					47.193.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	3	47.193.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				47.193.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	47.193.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.86	32.670.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					32.670.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	3	32.670.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				32.670.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	32.670.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57.14	11.534.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					11.534.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	3	11.534.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				11.534.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	11.534.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									136.015.969.000	Dinas Kesehatan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								135.751.189.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	135.751.189.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						135.751.189.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawailan dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.036.723.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.670.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.670.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.670.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	2.670.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					386.619.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	386.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				118.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	118.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	52.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.077.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	38.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.842.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	55.842.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.300.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	7.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					162.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan	Unit	4	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.245.684.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.245.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				987.642.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	987.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.255.342.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.255.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					572.420.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	572.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	66.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				198.520.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	198.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				177.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	177.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.847.026.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					484.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	484.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				484.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	484.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.561.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	116.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.808.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	5.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.675.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.804.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.804.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.013.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.059.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	55.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.059.172.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.059.172.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				928.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.544.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	295.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				762.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	762.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.493.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	174.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.666.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	46.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.077.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	15.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				73.086.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	73.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.664.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	24.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawiaan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.552.262.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.295.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	260.295.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	32	51.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				85.545.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	85.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				41.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	58.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.300.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	7.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				85.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	8	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.493.336.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.493.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	110.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.075.096.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	1.075.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.307.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.307.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					643.631.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	643.631.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.651.000		
						Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Unit	5	62.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	224.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				246.080.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	246.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	110.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.199.946.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.512.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.216.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	19.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.925.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	12.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.107.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	55.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.482.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	6.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				16.035.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	16.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.219.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	13.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				9.528.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	9.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.423.408.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.423.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				845.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	845.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.576.458.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.576.458.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					614.026.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	614.026.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.058.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	62.058.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.228.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	47.228.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				120.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	120.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				329.905.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	329.905.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.835.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	54.835.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.098.319.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					699.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	699.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				699.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	699.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.102.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	119.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.017.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	5.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.838.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.929.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.929.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.013.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	9.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.008.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.592.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	60.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.300.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	7.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				150.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					877.148.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	877.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				306.444.000		
						Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	Laporan	4	306.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				569.704.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	569.704.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.669.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	252.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.025.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	51.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.564.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	148	30.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123.040.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	123.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.040.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	48.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	107.444.984.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					94.962.077.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	94.962.077.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				93.653.300.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	493	93.653.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.269.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.269.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.077.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	26.077.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.500.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	3	13.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					302.900.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	302.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				52.900.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	2	52.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					82.026.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	82.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				82.026.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	82.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.167.290.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.167.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				41.300.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	41.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				272.238.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	272.238.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.650.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	50.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.742.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	54.742.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				97.700.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	97.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				84.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	84.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				489.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	489.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				77.600.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	77.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.789.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	2.789.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				159.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	159.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.630.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	2.630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.289.069.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.289.069.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.405.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	11.405.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.950.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	1.950.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.808.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	135.808.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.191.756.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4.191.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.852.622.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	1.852.622.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				421.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	44	421.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				325.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	325.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				783.022.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	783.022.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				272.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	272.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.579.663.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					950.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				950.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.703.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	163.703.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.817.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	3.817.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.643.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	11.643.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.833.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	30.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.610.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	59.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	11.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.077.165.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.077.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.265.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				353.850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	353.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				722.050.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4		722.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.795.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4		338.795.000		
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.618.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10		68.618.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.460.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	93		67.460.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				159.517.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		159.517.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.200.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		43.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		3.126.102.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.492.000.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4		1.492.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.492.000.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4		1.492.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					209.677.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		209.677.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.720.000		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4		26.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				92.307.000		
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4		92.307.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.200.000		
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4		15.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.975.000		
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4		5.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.475.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4		49.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	50.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.950.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12	50.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.169.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.169.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				353.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	353.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				814.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	814.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.675.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	203.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.225.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	63.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.950.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	170	35.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				22.500.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	4	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.866.164.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					925.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	925.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				925.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Dokumen	4	925.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					202.285.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	202.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.140.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	11.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				51.755.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	51.755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.340.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	49.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	11.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.441.820.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.441.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	400.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.040.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.040.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297.059.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	297.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.225.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	50.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.600.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.234.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	126.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								264.780.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.95	264.780.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						264.780.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	75	264.780.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					264.780.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	95	264.780.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				205.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	205.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.780.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	59.780.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									587.814.479.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									58.984.685.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI								58.984.685.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	88.97	58.984.685.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						58.984.685.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	100	58.984.685.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					58.984.685.000		
						Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan	%	85	53.984.685.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				53.984.685.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	69	53.984.685.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran	%	100	5.000.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				5.000.000.000		
						Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	5	5.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									1.218.824.889.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								1.218.824.889.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	1.218.824.889.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.218.824.889.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	1.109.005.650.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					1.109.005.650.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	100	1.109.005.650.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.109.005.650.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1.109.005.650.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawiaan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	109.819.239.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					109.819.239.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	109.819.239.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				109.819.239.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	1450	109.819.239.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									1.277.809.574.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									15.916.439.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO								15.916.439.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90.5	15.916.439.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						14.916.439.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	14.916.439.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					14.916.439.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	14.916.439.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				14.916.439.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan	Paket	2	14.916.439.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.000.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	1.000.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000		
						Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3	1.000.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3	1.000.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									980.566.360.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								980.566.360.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	980.566.360.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						980.566.360.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	83	865.055.669.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					865.055.669.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	100	865.055.669.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				865.055.669.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	865.055.669.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	115.510.691.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					115.510.691.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	115.510.691.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				115.510.691.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	823	115.510.691.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi
JUMLAH									996.482.799.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									9.000.000.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO								9.000.000.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	91.11	9.000.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						9.000.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	9.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					9.000.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	9.000.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				9.000.000.000		
						Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	10	9.000.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									320.782.613.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								320.782.613.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	320.782.613.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						320.782.613.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	53.52	221.278.373.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					221.278.373.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	79.76	221.278.373.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				221.278.373.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	6	221.278.373.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	99.504.240.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99.504.240.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	99.504.240.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				99.504.240.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	851	99.504.240.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									329.782.613.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									31.135.485.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO								31.135.485.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	89	31.135.485.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						30.874.646.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	30.874.646.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					29.915.646.000		
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	29.915.646.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				27.302.570.000		
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	9	27.302.570.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				2.613.076.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1.000.000.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0	1.613.076.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					959.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	959.000.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				959.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	959.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						82.847.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	35	82.847.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					82.847.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5	82.847.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				82.847.000		
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	100	82.847.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						177.992.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	177.992.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					177.992.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	12	177.992.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				177.992.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	177.992.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									111.957.105.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								111.957.105.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	111.957.105.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						111.957.105.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	40	70.007.565.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					70.007.565.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	70.007.565.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				70.007.565.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	4	70.007.565.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	41.949.540.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.949.540.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	41.949.540.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				41.949.540.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	302	41.949.540.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									143.092.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									25.763.553.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDHUTOMO								25.763.553.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	25.763.553.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						25.688.084.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	2.392.400.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.192.400.000		
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	2.192.400.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				2.192.400.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	2.192.400.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	200.000.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				200.000.000		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	12	200.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	23.295.684.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					23.295.684.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	23.295.684.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.795.684.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	32	20.795.684.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.500.000.000		
						Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	2.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						75.469.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	75.469.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					75.469.000		
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping	Kegiatan	3	35.061.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				35.061.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	35.061.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD	Kegiatan	2	40.408.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				40.408.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	40.408.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									146.456.606.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								146.456.606.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	146.456.606.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						146.456.606.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	76.501.113.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					76.501.113.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	65.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				65.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	76.436.113.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				76.436.113.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	76.381.113.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	69.955.493.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.955.493.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	69.955.493.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.955.493.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	520	69.955.493.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									172.220.159.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									19.433.450.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA								19.433.450.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	96.58	19.433.450.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						19.433.450.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	1.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000		
						Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	97	1.000.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				1.000.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	470.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					470.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	470.000.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				470.000.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	470.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	17.963.450.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					17.963.450.000		
						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	97	17.963.450.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.963.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12	15.963.450.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.000.000.000		
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	2	2.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									126.607.356.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								126.607.356.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	126.607.356.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						126.607.356.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	58.654.729.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					58.654.729.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	58.654.729.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				58.654.729.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	58.654.729.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	67.952.627.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.952.627.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	67.952.627.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				67.952.627.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	449	67.952.627.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									146.040.806.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									29.546.229.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI								29.546.229.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	98	29.546.229.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						29.234.777.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	1.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000		
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	1.000.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				1.000.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	28.234.777.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					28.234.777.000		
						Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	19.734.777.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				19.734.777.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	25	19.734.777.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	8.500.000.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				8.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	8.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						65.888.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	75	65.888.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					65.888.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	10	65.888.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				65.888.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	360	65.888.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						245.564.000		
						Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	56.750.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					56.750.000		
						Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2	56.750.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				56.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2	56.750.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	188.814.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					188.814.000		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	8	188.814.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				188.814.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	8	188.814.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									113.063.404.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								113.063.404.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	113.063.404.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						113.063.404.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	38.89	62.273.686.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					62.273.686.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	91.6	62.273.686.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				62.273.686.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	62.273.686.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	50.789.718.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.789.718.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	50.789.718.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				50.789.718.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	354	50.789.718.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									142.609.633.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi									827.223.417.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%	68.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor								529.383.010.000		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	48.18	529.383.010.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						529.383.010.000		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	3.828.504.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.828.504.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	8	3.828.504.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.004 1			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.136.779.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Dokumen	5	2.136.779.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.004 3			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.691.725.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	3	1.691.725.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	47.43	228.743.408.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					228.743.408.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Km	41.55	228.743.408.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Penggantian Jembatan				1.056.482.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat	m	61.6	1.056.482.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.004 0			Pelebaran Jalan Menuju Standar				227.686.926.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	Km	41.55	227.686.926.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	48.87	255.908.811.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					255.908.811.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Km	22.56	255.908.811.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.004 0			Pelebaran Jalan Menuju Standar				255.908.811.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	Km	22.56	255.908.811.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	58.32	96.413.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					96.413.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	Km	1423.12	96.413.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.0044				Pengelolaan Leger Jalan			96.413.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	96.413.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	50	4.216.277.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.216.277.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Unit	45	4.216.277.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.0033				Pemeliharaan Rutin Jalan			4.216.277.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	9	134.100.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	36	1.576.071.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	4910	2.506.106.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	35.229.771.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					35.229.771.000		
						Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Dokumen	1	11.362.674.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0040				Pelebaran Jalan Menuju Standar			11.362.674.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	6685	11.362.674.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
						Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	Dokumen	13	23.867.097.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.0024				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			16.354.971.000		
						Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	Dokumen	13	16.354.971.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0026				Pemeliharaan Rutin Jembatan			2.590.322.000		
						Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	m	35	2.590.322.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033				Pemeliharaan Rutin Jalan			4.921.804.000		
						Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	0.25	4.921.804.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	73.04	1.359.826.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.359.826.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Sertifikat	1420	1.359.826.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.0028				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			1.359.826.000		
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2	333.810.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji	Unit	116	259.752.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	65	415.368.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Sertifikat	1420	350.896.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap								297.840.407.000		
						Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	82.15	30.203.814.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						30.203.814.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	88.84	1.916.588.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.916.588.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	m	2688.27	1.916.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002				Rehabilitasi Jembatan			500.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap	m	12.4	500.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.0026				Pemeliharaan Rutin Jembatan			1.416.588.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	m	2675.87	1.416.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	74.58	1.357.159.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.357.159.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	m	2300.6	1.357.159.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.357.159.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	m	2300.6	1.357.159.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	78.13	7.155.383.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.155.383.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	m	2726	7.155.383.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				5.649.534.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati	m	15.5	5.649.534.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.505.849.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	m	2710.4	1.505.849.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	83.56	1.834.437.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.834.437.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	m	3006.31	1.834.437.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.834.437.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	m	3329.31	1.834.437.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	67	2.739.657.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.739.657.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	m	3623.25	2.739.657.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				580.090.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi	m	4.8	580.090.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.159.567.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	m	3957.8	2.159.567.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	91.56	1.509.878.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.509.878.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	m	2473.76	1.509.878.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.509.878.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	m	2473.71	1.509.878.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	91.87	2.867.849.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.867.849.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	m	4720.61	2.867.849.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.867.849.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	m	4720.62	2.867.849.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	78.42	8.523.899.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					8.523.899.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	m	2156.8	8.523.899.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				7.326.119.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal	m	19.2	7.326.119.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.197.780.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	m	2137.6	1.197.780.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	84.18	2.298.964.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.298.964.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	m	2253.91	2.298.964.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				1.095.196.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo	m	9.2	1.095.196.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.203.768.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	m	2244.71	1.203.768.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	93.08	267.636.593.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						267.636.593.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	94.89	28.258.001.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					28.258.001.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	191.8	28.258.001.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				19.759.166.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km	8.13	19.759.166.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.498.835.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Km	183.67	8.498.835.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	93.98	32.477.203.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					32.477.203.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	252.83	32.477.203.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				17.521.983.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	10.5	17.521.983.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				14.955.220.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Km	242.33	14.955.220.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	91.03	32.091.853.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					32.091.853.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	239.74	32.091.853.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				19.439.034.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	7.2	19.439.034.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				12.652.819.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Km	232.54	12.652.819.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	95.33	29.557.783.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					29.557.783.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	248.39	29.557.783.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				13.693.394.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km	7.2	13.693.394.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				15.864.389.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	241.19	15.864.389.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	90.71	31.551.159.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					31.551.159.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	378.36	31.551.159.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				18.831.161.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km	9.7	18.831.161.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				12.719.998.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	368.66	12.719.998.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	94.78	11.138.321.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					11.138.321.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	219.58	11.138.321.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				11.138.321.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Km	219.58	11.138.321.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	91.89	50.172.844.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					50.172.844.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	413.78	50.172.844.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				24.214.117.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km	11.5	24.214.117.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				25.958.727.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Km	402.28	25.958.727.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	94.06	19.787.494.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					19.787.494.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	197.56	19.787.494.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				9.753.808.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km	5	9.753.808.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				10.033.686.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Km	192.56	10.033.686.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	93.71	32.601.935.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					32.601.935.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	246.92	32.601.935.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				18.113.812.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	9.5	18.113.812.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				14.488.123.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	232.67	14.488.123.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									96.872.387.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	61		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								96.438.631.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92.25	96.438.631.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						96.438.631.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.317.545.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.123.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.935.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	17.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.657.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.935.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	17.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.633.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				540.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	100	540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.423.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	91.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					784.989.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	784.989.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	126.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				654.446.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	654.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					370.433.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	370.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.812.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	144.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.621.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	39	25.621.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	82.306.888.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.867.694.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45	70.867.694.000	SUBBAG KEUANGAN	
		X-XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.664.187.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	484	68.664.187.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.013.240.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.013.240.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				190.267.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	19	190.267.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						348.622.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13		348.622.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					348.622.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13		348.622.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						144.697.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		144.697.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					144.697.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	440		144.697.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.521.730.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		1.521.730.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.830.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		12.830.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					46.503.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		46.503.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					231.555.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		231.555.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					33.675.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		33.675.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	543		3.250.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.087.258.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		1.087.258.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					77.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1		77.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					29.659.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		29.659.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.433.173.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	484		2.433.173.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel					488.020.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	319		488.020.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.945.153.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	165		1.945.153.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.316.130.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50		4.316.130.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				22.542.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	22.542.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				899.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	899.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.394.588.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	26	3.394.588.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.674.842.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	155	2.674.842.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.018.372.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	1.018.372.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				953.147.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	953.147.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				703.323.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	124	703.323.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	992.470.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.571.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	116.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.238.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	17.238.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.124.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.741.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				630.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	120	630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.636.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	82.636.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	547.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.562.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	423.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327.987.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	74	327.987.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				172.561.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	18	172.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123.040.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	123.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.386.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	32.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.695.693.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					182.123.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	182.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.029.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	16.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.338.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	19.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.040.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	48.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	86	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.116.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	94.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.237.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.237.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	219.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.016.630.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	1.016.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.770.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	65	275.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.155.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	118.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.783.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	97.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				59.832.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	59.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.954.773.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					166.051.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	166.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.287.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.454.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	24.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.529.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.966.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	19.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				280.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	90	280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.535.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.315.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.315.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.843.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		3.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		242.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.069.417.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		1.069.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.462.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48		473.462.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.793.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8		120.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				305.067.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		305.067.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.602.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	36		47.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		904.637.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.421.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		105.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.248.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		10.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.833.000		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		14.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.327.000		
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		8.327.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.285.000		
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		14.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	76		400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.328.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		57.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					485.173.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26		485.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				406.572.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	406.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.043.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	35	314.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				139.858.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	139.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.185.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	26	24.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	741.954.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.606.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.475.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.970.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				580.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	168	580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.681.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	39.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					524.320.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	524.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				428.870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	428.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.028.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	46	147.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.706.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	47.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.026.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	82.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.296.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	41	17.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.724.420.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					173.204.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	173.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.967.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.051.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	23.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.248.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.951.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	18.951.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				900.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	129	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111.087.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	111.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.172.301.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.172.301.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				979.818.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	979.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					378.915.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	132	378.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.495.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	154.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				172.537.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	172.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				51.883.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	118	51.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.317.224.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.214.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	99.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.200.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.679.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	26.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.625.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.127.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	12.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				685.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	118	685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.898.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	41.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					732.499.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	732.499.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.636.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.636.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				541.863.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	541.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					485.511.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	68	485.511.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.670.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	104.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.841.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	30.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.016.449.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					147.923.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	147.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.045.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.846.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.810.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.436.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	16.436.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				260.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	86	260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.526.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	90.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521.109.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	521.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	102.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.326.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	414.326.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.417.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	347.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	125.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.964.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	196.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.653.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	24	24.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.261.510.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.429.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.630.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.118.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.365.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	14.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.031.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	14.031.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	170	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.485.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	104.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					676.330.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	676.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.402.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				563.928.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	563.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					422.751.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	70	422.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.463.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	101.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharadirehabilitasi	Unit	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.288.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	71.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.205.068.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.485.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	116.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.931.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.931.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.496.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	14.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.471.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.471.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.496.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	14.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				540.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	118	540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.551.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	74.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					674.203.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	674.203.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.735.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				558.468.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	558.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					414.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	98	414.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				121.523.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	121.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				265.684.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	265.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.173.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	91	27.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								433.756.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.11	433.756.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						433.756.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	433.756.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					433.756.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	433.756.000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.411.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	21	250.411.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				183.345.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	45	183.345.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)									49.538.533.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.39		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah								49.538.533.000		
						Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	61.65	49.538.533.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						45.795.822.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5.83	45.546.269.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					45.546.269.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	Lokasi	60	45.546.269.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				88.336.000		
						Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	Orang	160	51.565.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	Orang	80	36.771.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0018			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				74.495.000		
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	74.495.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				45.383.438.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	9	45.383.438.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	12.23	249.553.000		
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					249.553.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	Lokasi	126	249.553.000		
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				249.553.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	Dokumen	1	249.553.000		OPD Provinsi
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						3.742.711.000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	66.67	100.392.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					100.392.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	1	100.392.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				100.392.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	320	100.392.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	48.01	3.642.319.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					2.732.384.000		
						Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Orang	11.679	2.732.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				907.026.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	1900	907.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.825.358.000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	1100	1.825.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					692.047.000		
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan	5	692.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				647.502.000		
						Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	2	241.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	125	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	48.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	4	332.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				44.545.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	80	44.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					217.888.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	1	217.888.000		
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				217.888.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	4	217.888.000		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)									72.236.376.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.39		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								72.236.376.000		
						Persentase akses air minum aman	%	42.93	72.236.376.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						72.236.376.000		
						Persentase akses air minum layak	%	93.94	1.835.127.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					1.835.127.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Orang	34502341	1.835.127.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.495.697.000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, risbam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	Dokumen	9	1.495.697.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.0016			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				339.430.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	Kabupaten/Kota	15	339.430.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	70.401.249.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					70.401.249.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Liter	37	70.401.249.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				70.401.249.000		
						Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	7	10.401.250.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	30	59.999.999.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)									16.682.445.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.39		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman								364.039.000		
						Persentase akses air limbah domestik aman	%	12.5	364.039.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						364.039.000		
						Persentase akses air limbah domestik layak	%	95.18	364.039.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					364.039.000		
						Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	Orang	35500068	364.039.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.0014			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				364.039.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	3	364.039.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								16.318.406.000		
						Persentase akses air minum aman	%	42.93	16.318.406.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						16.318.406.000		
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	57.82	16.318.406.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					16.318.406.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Orang	21236165	16.318.406.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				16.318.406.000		
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	Lokasi	30	16.318.406.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
JUMLAH									1.062.553.158.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									85.942.871.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	75		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								85.309.985.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85.309.985.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						85.309.985.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	549.738.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.777.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	48.777.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.514.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	23.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.013.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	6.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				375.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.645.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	2.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.230.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.943.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	286.943.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				543.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	543.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	169.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					214.018.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	214.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.922.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	32.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				138.474.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	138.474.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.622.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	42.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	739.757.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					28.564.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	28.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.668.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	7.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.029.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	6.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				510.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.462.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.462.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.895.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	9.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.665.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	286.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.425.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	193.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				92.328.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	92.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.528.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	424.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.293.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	123.293.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.879.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	136.879.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				164.356.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	164.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawain, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	373.330.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.019.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	34.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.095.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	7.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.218.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	14	5.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				550.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.656.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	18.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.828.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	174.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				528.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	104.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.483.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	32	164.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				61.950.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	61.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.768.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	69.768.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.765.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	32.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	557.981.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.501.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	29.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.214.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.622.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	7.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				840.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	10	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.325.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.883.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	25	187.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	143.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.263.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	43.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					340.597.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	340.597.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.784.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	133.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				171.730.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	171.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.083.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	31	35.083.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	880.724.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.493.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.886.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.337.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.100.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					417.248.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	417.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.448.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	299.448.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.983.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	421.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	79.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				116.668.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	116.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				225.565.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	225.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal	%	100	826.713.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					51.484.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	51.484.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.234.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.900.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	12.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.450.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	17.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	424.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	248.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.629.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	83	350.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.065.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	204.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.564.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	56.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	81.381.742.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.079.201.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	72.079.201.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70.873.418.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	500	70.873.418.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.205.783.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	1.205.783.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					383.500.000		
						Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	383.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				383.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	383.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.457.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	125.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.042.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	17.042.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55.068.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	350	55.068.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				53.347.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	90	53.347.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.428.656.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	77	1.428.656.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				571.074.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	571.074.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.432.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	38.432.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				92.557.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	92.557.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.982.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	18.982.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	1.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				47.025.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	47.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.040.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	122.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				537.296.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	537.296.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.811.751.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.811.751.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68.514.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	68.514.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				692.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	692.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.587.467.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.587.467.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				462.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	462.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.553.177.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	422	3.553.177.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				894.525.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	62	894.525.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.956.790.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.956.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				701.862.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	241	701.862.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								632.886.000		
						Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	3.16	632.886.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						632.886.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	632.886.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					632.886.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	632.886.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.022.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	400.022.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				232.864.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	232.864.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah									205.144.849.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	60.56		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang								3.169.196.000		
						Persentase keterwujudan penataan ruang	%	58.33	3.169.196.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						3.169.196.000		
						Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	76	586.444.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					586.444.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	6	586.444.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				448.950.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	4	448.950.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.03.0006			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				137.494.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	2	137.494.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	50.99	1.482.954.000	Bidang Penataan Ruang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					1.079.309.000		
		1.03.12.1.01.0006			Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3	1.079.309.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
									1.005.064.000		
						Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	2	1.005.064.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.01.0009			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				74.245.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	150	74.245.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					403.645.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	16	403.645.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				248.817.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	15	248.817.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				154.828.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	154.828.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	57.291.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					57.291.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	57.291.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				57.291.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	57.291.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	1	70.088.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					70.088.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	70.088.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				70.088.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	70.088.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	69.458.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					69.458.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	1	69.458.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				69.458.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	69.458.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	57.692.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					57.692.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	57.692.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				57.692.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	57.692.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	30.072.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					30.072.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	30.072.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				30.072.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	30.072.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	54.714.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					54.714.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Dokumen	1	54.714.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				54.714.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	54.714.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib ruang	%	48	760.483.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					760.483.000		
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	273.217.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0006			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				141.362.000		
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	141.362.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.04.0007			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				131.855.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	131.855.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	4	487.266.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				487.266.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	4	487.266.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air								201.975.653.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	62.78	201.975.653.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						201.975.653.000		
						Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	70.14	68.018.681.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					68.018.681.000		
						Jumlah Di yang direhab	Unit	31	67.593.503.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				67.593.503.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	13.351	67.593.503.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	3	425.178.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0037			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi				425.178.000		
						Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Unit	3	327.213.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	97.965.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67.36	7.863.830.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.863.830.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	73.01	7.863.830.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.863.830.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah BPSDA Bengawan Solo	Km	14.66	7.863.830.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71.8	6.953.443.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.953.443.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	70.26	6.953.443.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.953.443.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	8.9	6.953.443.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	64.35	6.994.996.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.994.996.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	60.33	6.994.996.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.994.996.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Km	202.39	6.994.996.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	78.45	4.486.277.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.486.277.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	78	4.486.277.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.486.277.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Km	131.38	4.486.277.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	64.39	4.383.394.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.383.394.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	63.14	4.383.394.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.383.394.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Km	156.787	4.383.394.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72.65	5.470.869.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.470.869.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	72.65	5.470.869.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.470.869.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	Km	1.7	5.470.869.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	65.82	51.922.380.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					51.922.380.000		
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Dokumen	2	92.802.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				92.802.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	92.802.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Dokumen	4	827.414.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				827.414.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	248.128.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	2	579.286.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Unit	101	51.002.164.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0078			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				3.797.797.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	2	3.797.797.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0120			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				47.204.367.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	8	47.204.367.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	1.337.747.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.337.747.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.337.747.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.337.747.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	1.337.747.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	1.598.705.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.598.705.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.598.705.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.598.705.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	5	1.598.705.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	2.210.939.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.210.939.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.210.939.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.210.939.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	5	2.210.939.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	988.322.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					988.322.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	988.322.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				988.322.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	5	988.322.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	1.307.370.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.307.370.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.307.370.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.307.370.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	5	1.307.370.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	1.016.796.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.016.796.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.016.796.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.016.796.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy	Dokumen	5	1.016.796.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	67.35	1.281.782.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.281.782.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	27.78	1.281.782.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.281.782.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	13	1.281.782.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	63.64	566.185.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					566.185.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	566.185.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				566.185.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	10	566.185.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34.78	1.439.044.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.439.044.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	1.439.044.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.439.044.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Unit	2	1.439.044.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92.23	311.478.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					311.478.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	311.478.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				311.478.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	2	311.478.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	859.661.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					859.661.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	15	859.661.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				859.661.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	3	859.661.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76.5	525.562.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					525.562.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	10	525.562.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				525.562.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	3	525.562.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52.38	19.866.327.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					19.866.327.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Km	1.8	3.399.433.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				1.425.000.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Km	3.1	1.425.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0118			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				1.974.433.000		
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0.7	1.974.433.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	465.156.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				465.156.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	4	465.156.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	2	16.001.738.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				16.001.738.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2	16.001.738.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50.08	2.591.410.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.591.410.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	2.591.410.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.591.410.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	1.2	2.591.410.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53.26	4.696.164.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.696.164.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	4.696.164.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.696.164.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	5	4.696.164.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	62.5	5.284.291.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.683.659.000		
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	3	879.712.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				704.712.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	704.712.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				175.000.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	2	175.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	19	1.433.775.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				370.309.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	11	370.309.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				1.063.466.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	4	1.063.466.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	1	1.370.172.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.370.172.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen	1	1.370.172.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.600.632.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	5	1.600.632.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				1.600.632.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	5	1.600.632.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									291.087.720.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat									27.593.680.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	60.22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	74.85		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat								24.244.464.000		
						Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	41.57	9.384.864.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						9.384.864.000		
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	8.32	9.384.864.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					57.330.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	2	57.330.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.001.1			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				57.330.000		
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	57.330.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					32.840.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	32.840.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.000.1			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				32.840.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	200	32.840.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					4.249.908.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit	170	4.249.908.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.000.1			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				3.125.589.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit	150	3.125.589.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.000.4			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1.124.319.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit	20	1.124.319.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.044.786.000		
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	17000	5.044.786.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.000.6			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				5.044.786.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	1	5.044.786.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20.22	14.859.600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						14.743.153.000		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0.73	14.743.153.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					101.473.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	101.473.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0010			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				101.473.000		
						Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	2	101.473.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					26.301.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	26.301.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0009			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				26.301.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	300	26.301.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					14.615.379.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	340	14.615.379.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				14.615.379.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	Unit	240	10.322.435.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	Unit	100	4.292.944.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						116.447.000		
						Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	116.447.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					116.447.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Dokumen	1	116.447.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				116.447.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	116.447.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman								3.349.216.000		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	39.78	3.349.216.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						2.950.611.000		
						Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	642.811.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					642.811.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				70.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	70.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	334.481.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.03.1.01.0008			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				162.515.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	162.515.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				171.966.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	171.966.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	238.330.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				238.330.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan	2	238.330.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	49.49	2.307.800.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					46.951.000		
						Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	46.951.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				46.951.000		
						Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	3	46.951.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					2.260.849.000		
						Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	523.257.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/						

		1.04.03.1.02.000 2			Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				523.257.000			
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3		523.257.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	Ha	150		1.737.592.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.000 3			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					49.416.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	584		49.416.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.001 4			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.688.176.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	150		1.688.176.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							398.605.000		
						Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	60		398.605.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						398.605.000		
						Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	1		398.605.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.000 2			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman					343.376.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	1		343.376.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.000 3			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman					55.229.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1		55.229.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										18.601.937.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									17.715.254.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91.5		17.715.254.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							17.715.254.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		17.715.254.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.646.863.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	13.646.863.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.183.059.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	87	13.183.059.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				418.354.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	418.354.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25.336.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	25.336.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.486.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	3.486.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13.302.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	13.302.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.326.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12	3.326.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					167.513.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	167.513.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.510.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.510.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.823.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	3.823.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3.180.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	3.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					67.132.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	67.132.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.015.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	10.015.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11.271.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	11.271.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				37.170.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	37.170.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				726.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	726.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				7.950.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	80	7.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.247.119.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.247.119.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	32.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.315.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	28.315.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.810.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	12.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				265.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.534.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	11.534.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.330.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.330.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	17.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				560.543.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	560.543.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.335.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	19.335.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				296.676.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	296.676.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					222.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	222.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				222.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	13	222.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.770.019.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.770.019.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				147.962.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	147.962.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				403.057.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	403.057.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.219.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.219.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					594.608.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	284	594.608.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	19	200.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.810.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	56	12.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.418.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	135	57.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				273.930.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	72	273.930.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								886.683.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.04	886.683.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						886.683.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	886.683.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					886.683.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	886.683.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				582.312.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	582.312.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				304.371.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	9	304.371.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan									989.390.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase reforma agraria yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum								246.991.000		
						Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	246.991.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						246.991.000		
						Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	246.991.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					246.991.000		
						Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	1	246.991.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.0001			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				246.991.000		
						Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5	246.991.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
	Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah								742.399.000		
						Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	742.399.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						411.546.000		
						Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	411.546.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					411.546.000		
						Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	3	411.546.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.0001			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				303.342.000		
						Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	Dokumen	1	275.229.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	28.113.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.0002			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				108.204.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	10	108.204.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						330.853.000		
						Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	330.853.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					330.853.000		
						Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Lokasi	10	330.853.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.0002			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				38.928.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22	38.928.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				291.925.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	10	291.925.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									47.185.007.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)									3.608.961.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								3.608.961.000		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.2	3.608.961.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.608.961.000		
						Persentase penegakan produk hukum daerah	%	86.67	3.608.961.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3.875.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	3.875.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.01.001.5			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.875.000		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100	3.875.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					3.559.305.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	200	74.359.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.1.02.000.2			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				20.500.000		
						Jumlah pelanggar yang diawasi	Orang	100	20.500.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.000.3			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				53.859.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina	Orang	100	11.073.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	4	42.786.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	%	100	3.484.946.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.02.000.1			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				184.681.000		
						jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Orang	90	184.681.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.000.3			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				3.300.265.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak	Orang	50	3.300.265.000	SEKSI PENINDAKAN	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					45.781.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS	Dokumen	2	45.781.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03.000.1			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				45.781.000		
						Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	80	45.781.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)									889.632.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								889.632.000		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Angka	12.6	889.632.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						835.042.000		
						Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	56.07	300.224.000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					300.224.000		
						Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan	Kelompok	130	103.718.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				103.718.000		
						Jumlah Mitra trantib yang dibina	Kelompok	35	20.782.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina	Kelompok	95	82.936.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum	Kabupaten/ Kota	35	196.506.000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1.05.02.1.01.0014			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				71.350.000		
						Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum	Orang	140	71.350.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				125.156.000		
						Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib	Dokumen	1	61.842.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini	Kasus	10	63.314.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	65.69	301.363.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					301.363.000		
						Jumlah penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	74	206.155.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				110.920.000		

						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	25		40.590.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	Kegiatan	15		24.540.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibus	Kegiatan	24		45.790.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.001 9			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					95.235.000		
						Jumlah operasi penerbitan tramtibus (pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.)	Kegiatan	10		70.855.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100		24.380.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibus di Jawa Tengah	Kegiatan	16		95.208.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.001 7			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					76.866.000		
						Jumlah kawasan tertib yang dibina	Lokasi	7		38.566.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan tramtibus	Orang	120		38.300.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.001 9			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					18.342.000		
						Jumlah penerbitan PNS	Kegiatan	9		18.342.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	64.54		233.455.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						233.455.000		
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	Kelompok	150		66.767.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.001 6			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					66.767.000		
						Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas	Dokumen	2		66.767.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya	Kelompok	185		166.688.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.001 8			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia					166.688.000		
						Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	400		166.688.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							54.590.000		
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100		54.590.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					54.590.000		
						Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	Kabupaten/Kota	35	54.590.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				54.590.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1	54.590.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									17.244.681.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77.72		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								17.162.059.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	17.162.059.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.162.059.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	17.162.059.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.078.817.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	12.078.817.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.800.277.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	73	11.800.277.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				278.100.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	278.100.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				440.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	440.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					784.699.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	784.699.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				180.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				504.699.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	300	504.699.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					543.077.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	543.077.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.626.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.626.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				107.021.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	107.021.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.810.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.455.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	28.455.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				93.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	93.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				209.365.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	209.365.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				31.400.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	31.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					687.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	687.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				559.900.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	559.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	127.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.278.477.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.278.477.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.170.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.170.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	324.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.952.307.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.952.307.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					689.589.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	689.589.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				303.281.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	303.281.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	108.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				266.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	266.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.608.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	11.608.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								82.622.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	82.622.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						82.622.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	82.622.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					82.622.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	82.622.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.382.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	75.382.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.240.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	7.240.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									21.743.274.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana									3.462.028.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.76		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan								1.689.762.000		
						Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka	0.54	1.689.762.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.689.762.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2.86	1.455.620.000	Bidang Logistik dan Peralatan	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					176.648.000		
						Persentase sarpras PB yang terpenuhi	%	100	176.648.000	SEKSI PERALATAN	
		1.05.03.1.02.0014			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				176.648.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	176.648.000	SEKSI PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.278.972.000		
						Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	%	100	1.278.972.000	SEKSI LOGISTIK	
		1.05.03.1.03.0004			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.278.972.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	1.278.972.000	SEKSI LOGISTIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan darurat bencana	%	100	234.142.000	Bidang Penanganan Darurat	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					37.777.000		
						Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	%	100	37.777.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	
		1.05.03.1.02.0015			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				37.777.000		
						Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	50	37.777.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					126.579.000		
						Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	100	50.420.000		
		1.05.03.1.03.0002			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				50.420.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	35	50.420.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	76.159.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				24.032.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	24.032.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03.0005			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				52.127.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	52.127.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					69.786.000		
						Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	%	100	69.786.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.04.0017			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				69.786.000		
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	35	69.786.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan								1.667.509.000		
						Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	4.02	1.667.509.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.667.509.000		
						Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0.12	1.667.509.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					678.678.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.01	678.678.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.01.0002			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				678.678.000		
						Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	678.678.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					988.831.000		
						Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.23	263.243.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				176.493.000		
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa	15	176.493.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0016			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				86.750.000		
						Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	86.750.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	5	725.588.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.0017			Penyusunan Rencana Kontijensi				40.907.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	40.907.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0019			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				58.181.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	Laporan	1	58.181.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0021			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				626.500.000		
						Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana	Unit	99	626.500.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana								104.757.000		
						Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	104.757.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						104.757.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	104.757.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					104.757.000		
						Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	%	100	26.964.000	SEKSI REHABILITASI	
		1.05.03.1.04.0019			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				26.964.000		
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	26.964.000	SEKSI REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	%	100	77.793.000	SEKSI REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				51.759.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	51.759.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.04.0020			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				26.034.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	26.034.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									15.528.532.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.08			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								15.395.598.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	15.395.598.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.395.598.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.414.758.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.414.758.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.150.000.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	38	7.150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				264.758.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	264.758.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.100.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	18.100.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	38	1.640.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				16.460.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	38	16.460.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					478.854.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	478.854.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	6.405.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.022.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	10.022.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.031.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	14.031.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				101.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	101.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.595.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	45.595.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	400.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.700.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.700.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.243.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	29	3.243.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediikan	Unit	6	188.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	55.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	3.000.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.064.713.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	3.064.713.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.300.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	450.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.613.413.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.613.413.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.126.173.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	139	1.126.173.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				664.413.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	56	664.413.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				364.053.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	364.053.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.707.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	47.707.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								132.934.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.13	132.934.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						132.934.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	132.934.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					132.934.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	132.934.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				82.934.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	82.934.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									18.990.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									254.478.110.000	Dinas Sosial	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	5.04		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan								27.993.059.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0.45	27.993.059.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						27.993.059.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.45	27.993.059.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					27.993.059.000		
						Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Orang	400	1.813.519.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.000 2			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.813.519.000		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	400	1.813.519.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Orang	10000	13.081.497.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				13.081.497.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2500	13.081.497.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Orang	10000	13.098.043.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				13.098.043.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2500	13.098.043.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								9.783.382.000		
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	9.783.382.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						9.395.763.000		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	9.395.763.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					143.090.000		
						Jumlah penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Dokumen	200	143.090.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				143.090.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	200	143.090.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					9.252.673.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	1552	8.265.933.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				176.318.000		
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	200	176.318.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				6.954.784.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1152	6.954.784.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.134.831.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.134.831.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
						Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Orang	2000	986.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				986.740.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	2000	986.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						387.619.000		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	387.619.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					387.619.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	400	217.044.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				217.044.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	200	217.044.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Unit	1	170.575.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				70.575.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	70.575.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran								136.529.795.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	4.12	136.529.795.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						136.529.795.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	4.12	136.529.795.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					136.529.795.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	188528	136.529.795.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.000 1			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				136.529.795.000		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	188528	136.529.795.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial								5.059.024.000		
						Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.1	5.059.024.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						129.351.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	129.351.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					129.351.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	200	129.351.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.000 1			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				129.351.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	129.351.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						4.929.673.000		
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	4.929.673.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					4.929.673.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	3000	4.044.452.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.894.680.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	6000	2.894.680.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				455.510.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	6000	455.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				165.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	6000	165.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				412.090.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	6000	412.090.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				117.172.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	6000	117.172.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	2900	885.221.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				140.000.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	500	140.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				73.076.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	73.076.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				39.875.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	500	39.875.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				546.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	2900	546.720.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				85.550.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	500	85.550.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial								75.112.850.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.4	75.112.850.000	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						74.889.094.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	3.84	5.130.794.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar di dalam Panti					2.520.377.000		
						Jumlah penyandang disabilitas terlarntar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	4200	2.520.377.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				1.869.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	4200	1.869.900.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				444.299.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	444.299.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				206.178.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	206.178.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.690.539.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	3400	1.690.539.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.539.870.000		
						Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3400	1.539.870.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				150.669.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	150.669.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					455.713.000		
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	800	455.713.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				455.713.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	800	455.713.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					464.165.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	500	464.165.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				277.915.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	500	277.915.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				186.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Dokumen	8	186.250.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.13	2.259.674.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.524.019.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	150.153.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				63.301.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	63.301.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				31.352.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	31.352.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				37.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	1.373.866.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.032.878.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.032.878.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				184.617.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	184.617.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				156.371.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	156.371.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					735.655.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	112.116.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				81.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	81.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.926.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	14.926.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				9.500.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				6.190.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	6.190.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	623.539.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				503.628.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	503.628.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				72.083.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	72.083.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				47.828.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	47.828.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.13	2.309.986.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.670.193.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	151.210.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				67.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	67.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				31.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	31.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.160.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	6.160.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				40.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	40.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	1.518.983.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.136.245.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.136.245.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				197.295.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	197.295.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				185.443.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	185.443.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					639.793.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	87.214.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				70.837.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	70.837.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				12.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				1.890.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	80	1.890.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				2.037.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	2.037.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	552.579.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				406.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	406.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				96.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	96.320.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				49.659.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	49.659.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.21	3.542.326.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					695.735.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	80.961.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	11.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				4.761.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	8	4.761.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	614.774.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				412.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	412.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				85.024.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	85.024.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				117.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	117.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.846.591.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	250.795.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				10.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	Orang	1	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				85.750.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	380	85.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				59.895.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	390	59.895.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.525.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	390	21.525.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				73.125.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	78	73.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	2.595.796.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.953.628.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	390	1.953.628.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				340.768.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	390	340.768.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				301.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	390	301.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.12	2.086.049.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.086.049.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	197.562.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				10.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				74.508.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	74.508.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				39.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	39.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.254.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	280	20.254.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				52.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	14	52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	1.888.487.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.438.230.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.438.230.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				231.657.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	231.657.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				218.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	218.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarut yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.24	3.244.917.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam Panti					1.764.972.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	139.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				67.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	67.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				45.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	45.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				16.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	16.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut				9.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut	Dokumen	8	9.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	1.625.072.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.320.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.320.050.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				227.667.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	227.667.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				77.355.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	77.355.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarut di dalam Panti					1.479.945.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	123.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				56.100.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	56.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	10.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				24.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	1.356.495.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.019.545.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.019.545.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				173.605.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	173.605.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				163.345.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	163.345.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.16	2.677.673.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					582.579.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	68.820.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	8.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.020.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	4.020.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	3.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	513.759.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				383.060.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	383.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				65.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	65.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				65.179.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	65.179.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.211.214.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	221.085.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				20.250.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	20.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				188.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	188.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	3.550.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.910.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	8.910.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	990.129.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				688.925.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	688.925.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				208.380.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	208.380.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				92.824.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	92.824.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					883.880.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	100.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				6.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	6.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				46.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	46.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	15.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	3.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				28.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	120	28.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	783.030.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				609.770.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	609.770.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				116.970.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	116.970.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				56.290.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	56.290.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.07	1.570.170.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.570.170.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	401.462.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				359.723.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	359.723.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.539.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	8.539.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	1.168.708.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				811.660.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	811.660.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				218.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	218.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				138.728.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	138.728.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.1	2.364.630.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.364.630.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	240	672.502.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				26.576.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	26.576.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				614.091.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	614.091.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.702.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	8.702.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				23.133.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	23.133.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	240	1.692.128.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.208.880.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.208.880.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				286.433.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	286.433.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				196.815.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	196.815.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantr yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.15	2.796.471.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					999.379.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	279.179.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				42.670.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	42.670.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				224.222.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	224.222.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.937.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.937.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				4.350.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantr di dalam Panti	Dokumen	8	4.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	720.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				503.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	503.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				124.750.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	124.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				91.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	91.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.797.092.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	150.734.000		
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				45.509.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	45.509.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	35.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.825.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	9.825.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	48	54.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	1.646.358.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.239.540.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.239.540.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				222.996.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	222.996.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				183.822.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	183.822.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0.14	2.402.024.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					783.640.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	80.990.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				48.725.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	48.725.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.265.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	20.265.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	702.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				502.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	502.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				105.250.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	105.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				94.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	94.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.618.384.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	153.045.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				97.475.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	220	97.475.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	220	24.070.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				17.750.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	220	17.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				13.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	13.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	1.465.339.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				1.085.034.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	220	1.085.034.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				170.005.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	220	170.005.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				210.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	220	210.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.22	3.447.623.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.168.403.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Orang	170	96.820.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				57.120.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	57.120.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	22.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				14.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	14.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Dokumen	8	2.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	1.071.583.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				856.290.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	856.290.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				149.963.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	149.963.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				65.330.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	65.330.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					2.279.220.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	340	159.215.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				95.365.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	340	95.365.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	340	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				21.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	340	21.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				22.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	22.850.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	340	2.120.005.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.712.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	340	1.712.550.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				325.485.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	340	325.485.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				81.970.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	340	81.970.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarut yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.21	3.220.745.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam Panti					3.220.745.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	205.726.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				90.900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	480	90.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				68.945.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	480	68.945.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.936.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	27.936.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut				17.445.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	17.445.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	3.015.019.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.417.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	2.417.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				319.182.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	480	319.182.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				278.077.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	480	278.077.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.07	1.534.670.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di Dalam Panti					1.534.670.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	412.650.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				364.620.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	364.620.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	9.900.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di dalam Panti				12.930.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di dalam Panti	Dokumen	8	12.930.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah PPKS Anak Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	1.122.020.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				805.920.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	805.920.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				170.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	170.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				146.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	146.100.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.17	2.716.498.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar di dalam Panti					2.716.498.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	199.160.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				87.350.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	400	87.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				55.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	400	55.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	400	38.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				17.410.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	17.410.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	2.517.338.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.009.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	2.009.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				218.893.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	400	218.893.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				289.145.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	400	289.145.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0.11	1.621.471.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.621.471.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	196.151.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				117.650.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	250	117.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				44.751.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	250	44.751.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	125	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				18.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	1.425.320.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.105.060.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	1.105.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				180.875.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	250	180.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				139.385.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	250	139.385.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.12	3.079.074.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.020.938.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	89.790.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	1.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				51.275.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	51.275.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	18.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	10.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.915.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	7.915.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	931.148.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				661.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	661.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				123.896.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	150	123.896.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				146.102.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	146.102.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.316.411.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	354.867.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				316.682.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	316.682.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.735.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	7.735.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	5.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	961.544.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				687.680.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	687.680.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				177.790.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	177.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				96.074.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	96.074.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					741.725.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	100	108.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				79.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	79.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				7.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	20	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				6.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	100	633.275.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				504.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	504.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				83.542.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	83.542.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				45.583.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	45.583.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.15	2.503.693.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.194.790.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	1.194.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				896.825.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	896.825.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				133.865.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	133.865.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				53.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	53.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				60.150.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	60.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				31.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	31.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.875.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	12.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				6.375.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	6.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.308.903.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	129.020.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	52.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				29.945.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	29.945.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.625.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	10.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	34	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	1.179.883.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				868.153.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	868.153.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				172.745.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	172.745.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				138.985.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	138.985.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarut yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.25	4.440.980.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam Panti					1.800.483.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	146.532.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				69.605.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	69.605.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				41.077.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	41.077.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				22.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	22.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut				10.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut	Dokumen	8	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	1.653.951.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.370.585.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.370.585.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				204.220.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	204.220.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				79.146.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	79.146.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di Dalam Panti					1.857.050.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	420.683.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				22.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	22.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				380.106.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	380.106.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.127.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	10.127.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	1.436.367.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				986.040.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	986.040.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				192.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	192.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				258.327.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	258.327.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					783.447.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	84.592.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				43.592.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	43.592.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	20.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				9.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	698.855.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				515.075.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	515.075.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				75.855.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	75.855.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				107.925.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	107.925.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarut yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.22	3.806.818.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam Panti					2.758.418.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	420	190.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				83.750.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	420	83.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				53.125.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	420	53.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	38.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut				15.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut	Dokumen	8	15.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	42030	2.567.543.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.155.790.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	420	2.155.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				334.053.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	420	334.053.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				77.700.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Unit	420	77.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di Dalam Panti					1.048.400.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	278.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				23.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	23.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				238.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	238.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				13.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di dalam Panti				3.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	769.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				505.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	505.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				128.700.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	128.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				136.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	136.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.08	1.368.218.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.368.218.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	117.722.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				5.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	5.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.922.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	40.922.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	30.050.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	11.250.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				30.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	1.250.496.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				929.655.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	929.655.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				172.046.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	172.046.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				148.795.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	148.795.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.08	1.861.083.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.861.083.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	180	517.588.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				466.953.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	466.953.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				18.685.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	18.685.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				6.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	6.750.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	180	1.343.495.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				948.068.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	948.068.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				255.690.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	255.690.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				139.737.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	180	139.737.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.22	3.745.256.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.553.496.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	350	138.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				93.532.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	350	93.532.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	350	20.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11.193.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	175	11.193.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				13.125.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	13.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Orang	350	2.414.746.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.854.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	350	1.854.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				328.591.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	350	328.591.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				231.955.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	350	231.955.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.191.760.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	172.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				141.300.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	141.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				6.900.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	6.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	1.019.560.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				596.645.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	596.645.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				210.815.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	210.815.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				212.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	212.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.06	1.330.684.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.330.684.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	299.348.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.625.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	25.625.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				247.446.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	247.446.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.652.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	20.652.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.625.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	5.625.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	1.031.336.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				755.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	755.550.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				193.796.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	193.796.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				81.990.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	81.990.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantr yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.12	2.166.974.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.166.974.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	177.142.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				10.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.362.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provins	Orang	290	40.362.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.155.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	290	54.155.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				18.125.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	290	18.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	56	54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	1.989.832.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.497.778.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	290	1.497.778.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				271.881.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	290	271.881.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				220.173.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	290	220.173.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantr yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.17	2.401.797.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					889.664.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	78.001.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				4.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	4.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				50.523.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	50.523.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.025.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.025.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.903.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.903.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	811.663.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				503.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	503.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				101.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	101.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				206.163.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	206.163.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.512.133.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	171.118.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				118.906.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	300	118.906.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.510.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	300	22.510.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				11.250.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	300	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				18.452.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	18.452.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	1.341.015.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				998.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Giz Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	300	998.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				275.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	300	275.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				66.615.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	300	66.615.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarut yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.16	2.860.974.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.504.189.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	145.503.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				77.851.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	77.851.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.947.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	17.947.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				32.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	32.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				17.205.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	17.205.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	1.358.686.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				852.271.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	852.271.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				196.791.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	196.791.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				309.624.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	309.624.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.356.785.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Orang	180	122.554.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	1.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				39.017.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	39.017.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.607.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	35.607.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				13.680.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	13.680.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyalitunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	180	1.234.231.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				927.371.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	927.371.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				186.816.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	186.816.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				120.044.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	120.044.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.11	2.397.822.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.397.822.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	260	652.757.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				23.258.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	23.258.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				578.676.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	578.676.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.873.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	260	20.873.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				29.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	29.950.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	260	1.745.065.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.296.820.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.296.820.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				244.788.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	244.788.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				203.457.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	203.457.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						223.756.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	223.756.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					223.756.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	400	223.756.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				223.756.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	400	223.756.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									153.970.223.000	Dinas Sosial	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82.5		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								153.220.383.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.5	153.220.383.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						153.220.383.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	584.270.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					89.304.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	89.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.669.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	8.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.061.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.470.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.330.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.894.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.570.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.550.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	32.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	64.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	61.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					383.866.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Unit	4	383.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				351.766.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	351.766.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	306.909.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.937.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	56.937.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.804.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.804.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.920.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	1.920.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.253.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.253.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.560.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.560.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				5.035.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	5.035.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	2.405.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	28.060.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	27.750.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.750.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	27.750.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	69.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.600.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				67.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	67.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					152.822.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	152.822.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.890.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	6.890.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.370.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.370.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				134.760.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	134.760.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.802.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.802.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	544.907.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.288.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	70.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.340.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	8.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				486.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.920.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.465.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				346.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				5.711.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	5.711.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.570.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.550.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Laporan	4	144.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				760.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	143.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					295.059.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	4	295.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.957.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.957.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				266.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	266.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.702.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.242.485.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.288.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	145.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.322.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.322.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				965.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.327.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	10.327.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.921.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	37.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.708.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.100.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				19.833.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	19.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.899.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.213.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	46.213.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					163.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	1	163.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				163.400.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	163.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.393.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	134.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.593.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					799.404.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	8	799.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.274.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	23.274.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.222.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	12.222.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				752.562.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	752.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.346.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	916.935.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.780.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	125.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.053.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	17.053.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				717.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.641.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	7.641.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.695.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	34.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.931.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.931.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				11.418.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	11.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.725.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	50.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	1	52.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.900.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	52.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Laporan	4	165.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					572.385.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	6	572.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				546.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	546.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.585.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	576.085.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.979.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	88.979.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.127.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.651.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.481.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.904.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				150.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.828.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	12.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.570.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.508.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	31.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Pantî Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.042.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Pantî Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	134.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.042.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					333.064.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Pantî Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	4	333.064.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.351.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.351.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				292.444.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	292.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.069.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	15.069.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	792.605.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.835.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	84.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.197.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.651.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.481.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.904.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				810.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				5.712.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	5.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				4.570.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	38.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.420.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	131.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.420.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
									556.350.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	4	556.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	15.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	8.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				526.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	526.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	940.665.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.305.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	162.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.125.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	72.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					71.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	145.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	140.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	562.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				527.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	527.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.100.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	731.089.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					121.953.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	121.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.001.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	18.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.380.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.243.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.243.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.810.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	26.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				13.098.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	13.098.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.735.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.786.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	44.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					39.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	1	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	127.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	125.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					441.936.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	441.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.702.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	18.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.551.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	13.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				398.128.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	398.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.555.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	350.818.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					71.473.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	100	71.473.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.795.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.795.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				600.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.892.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.892.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.230.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	14.230.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.050.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.050.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.140.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.140.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				6.721.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	6.721.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				2.250.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	2.250.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.795.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.795.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					61.385.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	1	61.385.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				61.385.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	61.385.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Laporan	4	71.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	70.900.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.560.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	2	146.560.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	5.700.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.140.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.140.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				134.700.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	134.700.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.020.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.020.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	562.911.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.031.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	100	91.031.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.721.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	12.721.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.651.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.481.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.904.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				5.712.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	5.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.570.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.732.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	41.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.472.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Laporan	4	110.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.572.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.908.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	4	323.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.755.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	15.755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.792.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	7.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				292.444.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	292.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.917.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.917.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	704.000.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
									89.256.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	89.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.107.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.999.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	4.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.790.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				540.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.600.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	10.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.910.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	37.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.570.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Laporan	4	73.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	72.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521.174.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	4	521.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.224.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.421.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				489.444.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	489.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.085.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	914.403.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.108.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	153.108.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.770.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	17.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				940.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.308.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	7.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.950.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	28.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.708.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				11.122.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	11.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	72.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					29.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	118.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					613.575.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	613.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	15.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				555.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	555.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.875.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	579.070.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					102.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	102.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.335.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	10.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.700.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	78.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				76.840.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	76.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					373.290.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	373.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				339.850.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	339.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.540.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	383.375.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					71.308.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	71.308.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.804.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.804.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.777.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	1.777.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.253.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.253.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				884.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	884.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	300.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				4.356.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	4.356.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	2.405.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.129.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	46.129.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.201.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	87.201.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.601.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	85.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					209.366.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	209.366.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.764.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	14.764.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.640.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	4	4.640.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				186.760.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	186.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.202.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	3.202.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	693.591.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.163.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	115.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.451.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	13.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				717.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.382.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.709.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.806.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				120.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	4	120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				8.348.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	8.348.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.735.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.895.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	50.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.781.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	132.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	131.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.647.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	405.647.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.811.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.290.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				372.128.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	372.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.418.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	12.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	407.008.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.368.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	76.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.230.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.655.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.923.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	31.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Laporan	4	65.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	63.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					249.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	249.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				215.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	215.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	920.385.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					128.653.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	128.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.561.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.420.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.609.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	12.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.709.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.806.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.263.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	12.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.735.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	50.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					48.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Laporan	4	141.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2		800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.200.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4		140.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					602.732.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Unit	6		602.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.425.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2		32.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.705.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4		12.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				548.635.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		548.635.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.967.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4		8.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		136.399.503.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					98.131.153.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5		98.131.153.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				96.600.000.000		
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	599		96.600.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.258.301.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4		1.258.301.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				161.952.000		
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4		161.952.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				110.900.000		
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4		110.900.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					135.000.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		135.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				105.000.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		105.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					146.200.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	146.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				46.200.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	46.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.893.365.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.893.365.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				57.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	57.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.734.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	72.734.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				205.095.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	205.095.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				54.689.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	54.689.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				40.089.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	40.089.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				68.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.335.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	1.335.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				34.332.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	34.332.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.848.015.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	4.848.015.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.501.765.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	2.501.765.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.346.250.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	2.346.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.330.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	17.330.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				706.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	706.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				222.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	222.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.366.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	16.366.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.914.970.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	13.914.970.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				169.650.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	169.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				355.680.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	355.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	112.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.099.640.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	13.099.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				177.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	177.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	740.595.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.024.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	125.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.723.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	17.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.590.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	14.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.709.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.706.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				15.883.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	15.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.735.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.758.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	34.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					29.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.821.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Laporan	4	185.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.921.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	183.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Unit	6	400.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.255.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				346.128.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	346.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.367.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	701.872.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					94.181.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	94.181.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.127.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	9.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				486.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.151.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	4.151.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.481.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.904.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.282.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.282.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	48.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52.375.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	1	52.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.375.000		
						Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Unit	1	52.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	130.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.676.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	424.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.780.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.367.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				396.444.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	396.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.085.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	591.135.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.295.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	85.295.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.810.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				380.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.634.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.404.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	3.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				660.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				8.207.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	8.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.100.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	34.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	79.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	78.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					401.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	4	401.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				375.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	375.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	683.955.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					66.622.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	66.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.127.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.460.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				190.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.198.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	12.198.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.397.000		
						umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	19.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Laporan	4	149.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	148.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					433.133.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	4	433.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.733.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				402.900.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	402.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	299.846.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					71.668.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	71.668.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.073.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.073.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				256.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	256.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.825.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	1.825.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.236.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.236.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.288.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.288.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				450.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	450.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.006.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.006.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	2.405.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.129.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	48.129.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.001.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	56.001.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.601.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	54.400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.677.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	156.677.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7.874.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.874.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.101.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.101.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				141.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	141.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.202.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	3.202.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	327.321.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					66.799.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	66.799.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.233.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.233.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.557.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.557.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.989.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.989.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.575.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.575.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	2.405.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.140.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	31.140.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	15.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.301.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	64.301.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.901.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.901.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	62.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.721.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	180.721.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.135.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.135.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.760.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	160.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.826.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	3.826.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	341.293.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.053.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	100	77.053.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.804.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.804.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.196.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2.196.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.250.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.250.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.002.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.002.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	300.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				5.561.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	5.561.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.260.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.260.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.280.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	51.280.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	1	4.900.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.900.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	4.900.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49.129.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Laporan	4	49.129.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.060.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.069.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	48.069.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.211.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	2	210.211.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.749.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	15.749.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				186.760.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	186.760.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.002.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	3.002.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	322.046.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.093.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	100	69.093.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.471.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.471.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				328.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	328.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.692.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.692.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.350.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	10.350.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.002.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1.002.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				6.977.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	6.977.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.965.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	2.965.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.108.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	38.108.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	1	50.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	50.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Laporan	4	64.601.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.601.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	63.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					138.352.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	2	138.352.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.650.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.650.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.740.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.740.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				108.760.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	108.760.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.202.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	3.202.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	661.306.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					96.376.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	96.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.300.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				486.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.645.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.470.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	19.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				11.155.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	11.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.530.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	108.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.530.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	4	421.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				396.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	396.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								749.840.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.8	749.840.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						749.840.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	749.840.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					749.840.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	749.840.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				414.313.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	414.313.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				335.527.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	335.527.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									408.448.333.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									79.907.080.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79.5		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								79.475.205.000		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2		79.475.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						79.475.205.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.176.830.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.286.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.286.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					54.357.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	54.357.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.601.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.330.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.162.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.162.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.012.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.153.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.099.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	34.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.001 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					750.107.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	750.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.077.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.030.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	149.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				598.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	598.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.080.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	17	309.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.130.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	55.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.150.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	9.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.600.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	685.271.000		
									34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					37.432.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	37.432.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.281.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.281.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				705.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	705.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.640.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.640.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.612.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	5.612.000		
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				4.690.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	4.690.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.124.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	2.124.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.380.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	21.380.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.432.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	55.432.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.432.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	55.432.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	381.076.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	308.076.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.531.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	169.531.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.709.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	6	38.709.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.778.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	71.778.000		
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.044.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	39.044.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	994.907.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.907.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	31.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.601.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	12.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				1.006.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	1.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	2.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					851.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	851.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				251.026.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	251.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.374.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	600.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	56.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	17.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawiaan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.017.890.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					33.740.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	33.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.589.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	4.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.103.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	3.103.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.924.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	1.924.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.927.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	12	3.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.637.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.637.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.560.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	18.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.244.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	36.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.244.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	36.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					666.688.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	666.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	176.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				489.528.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	489.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					246.418.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	246.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.835.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	21.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.021.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	10.021.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.562.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	7	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	137.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.145.748.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.060.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	43.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				960.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.684.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	8.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.266.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	3.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.376.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	9.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.585.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	2.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.107.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	37.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	147.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				31.900.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	6	31.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.950.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	74.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				41.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	4	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	568.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.862.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				357.388.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	357.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.004.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	298.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.654.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	96.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				144.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	144.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	72.842.908.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.687.572.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	64.687.572.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				63.898.978.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	450	63.898.978.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				631.580.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	631.580.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				118.354.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	118.354.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				38.660.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	38.660.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	11	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					21.128.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	21.128.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				21.128.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	21.128.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.352.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	64.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				18.150.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	18.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				8.202.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	4	8.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				33.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	120	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.909.617.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.909.617.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	42.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.434.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	58.434.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				69.053.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	69.053.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				137.664.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	137.664.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.849.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	24.849.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				819.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	12	819.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.662.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	16.662.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				867.755.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	867.755.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.345.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	6	7.345.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				685.010.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	685.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					824.521.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	824.521.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				171.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	30	171.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				653.521.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	653.521.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.095.310.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.095.310.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.691.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	8	11.691.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				964.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	964.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				124.769.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	124.769.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.994.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	8	2.994.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.190.408.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.190.408.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				268.100.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	20	268.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				26.902.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	26.902.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.463.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	93.463.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				64.413.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	64.413.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				595.229.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	595.229.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.251.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	75.251.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.611.651.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	200.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.188.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	27.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				990.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.273.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	10.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.806.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	36.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.375.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	10.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.548.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	113.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					111.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	111.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				111.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	111.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					910.269.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	910.269.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	159.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				749.349.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	749.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.227.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	335.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44.226.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	44.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.904.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	66	69.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				134.402.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	5	134.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.695.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	41	86.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								431.875.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	431.875.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						431.875.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	431.875.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					431.875.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	431.875.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				242.131.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	242.131.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				189.744.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	189.744.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran									15.005.180.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.64		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								1.949.837.000		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80.96	1.949.837.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						1.949.837.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.67	497.132.000		
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					497.132.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	60	497.132.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				497.132.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	60	497.132.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.59	1.452.705.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.452.705.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	56.43	268.305.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum ketenagakerjaan di Perusahaan				268.305.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	260	268.305.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	33.56	355.180.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				355.180.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	195	355.180.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.21	829.220.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				829.220.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1190	829.220.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								10.052.222.000		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10.15	7.648.488.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						7.648.488.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelathan yang terakreditasi	%	30.59	108.505.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					108.505.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	26.67	108.505.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				108.505.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	30	108.505.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3.2	1.884.283.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.884.283.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	30	20.662.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				20.662.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	2	20.662.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	10.2	1.513.621.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.513.621.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	296	1.513.621.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.9801	2.539.450.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.539.450.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	33.33	18.518.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				18.518.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1200	12.803.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	1	5.715.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%	18.13	2.135.723.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.135.723.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	288	2.135.723.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	20	5.209.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				5.209.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	4	5.209.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				380.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	12	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.5	2.691.904.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.691.904.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40	3.845.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				3.845.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	3	3.845.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	64	2.529.525.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.529.525.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	628	2.529.525.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	158.534.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				158.534.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	75	158.534.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.35	424.346.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					424.346.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	50	424.346.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				362.486.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	200	362.486.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				61.860.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	61.860.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56	2.403.734.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.403.734.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.6	669.040.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					669.040.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	20.67	669.040.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				669.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	Unit	475	669.040.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13.22	1.734.694.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.721.029.000		
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	5	14.651.000		
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				14.651.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	1	14.651.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	73.66	1.706.378.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.706.378.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	839	1.706.378.000	SEKSI PEMASARAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					9.940.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	8	9.940.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				9.940.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	5	9.940.000	SEKSI PELATIHAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					3.725.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	4	3.725.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				3.725.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	3.725.000	SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								143.155.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68.57	143.155.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						143.155.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	68.57	143.155.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					143.155.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	31.43	143.155.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				74.049.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	74.049.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				28.854.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	28.854.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				40.252.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	40.252.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								1.699.327.000		
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71.06	1.699.327.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.561.617.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	71.05	435.488.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					4.955.000		
						Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan	%	20	4.955.000		
		2.07.04.1.02.000 2			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				4.955.000		
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	4	4.955.000		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					430.533.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.41	430.533.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.000 1			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				85.153.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	85.153.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.000			Job Fair /Bursa Kerja				345.380.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	345.380.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68.3	1.126.129.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					949.153.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	57.14	522.550.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000 1			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				83.364.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	120	83.364.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000			Pelayanan Antar Kerja				367.236.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	80	367.236.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000 3			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				44.029.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	350	44.029.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000 4			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				27.921.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	27.921.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	47.5	426.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja				426.603.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	230	426.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					169.400.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	50	136.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				20.079.000		
						Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	15	20.079.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				116.524.000		
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	116.524.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	1.51	32.797.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				28.277.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60	28.277.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				4.520.000		
						Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	2	4.520.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					7.576.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	7.576.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.576.000		
						Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150	7.576.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						137.710.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.71	21.037.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					21.037.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	80	21.037.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi				21.037.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	10	21.037.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.71	116.673.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					116.673.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	8.57	116.673.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				116.673.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	116.673.000	SEKSI TRANSMIGRASI	OPD Provinsi
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial								1.160.639.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91.58	1.160.639.000		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.160.639.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98.2	173.250.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					173.250.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	26.97	173.250.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.000 1			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				62.931.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	62.931.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.000 2			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				14.158.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	14.158.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.000 3			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				96.161.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	140	96.161.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.77	496.868.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					496.868.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.79	353.175.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.000 1			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				128.817.000		

						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	128.817.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.000 3			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				13.316.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Unit	1000	13.316.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.000 4			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				211.042.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	36	211.042.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80	143.693.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.000 5			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				143.693.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	100	143.693.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.69	158.382.000		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					158.382.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan industrial sesuai ketentuan	%	96.69	47.272.000		
		2.07.05.1.02.000 2			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				47.272.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	125	47.272.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36	111.110.000		
		2.07.05.1.02.000 1			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				111.110.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	111.110.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	45.54	332.139.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					332.139.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2.16	332.139.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.000 1			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				221.210.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	221.210.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.000 3			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				45.577.000		
						Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	45.577.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				65.352.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Tendaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	100	65.352.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
JUMLAH									94.912.260.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									1.087.611.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								495.661.000		
						Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	495.661.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						495.661.000		
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	495.661.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					60.520.000		
						ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	17.7	60.520.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				22.332.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	1	22.332.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				38.188.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kabupaten/ Kota	3	38.188.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					435.141.000		
						Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	435.141.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				22.748.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/ Kota	2	22.748.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				28.768.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	28.768.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui						

		2.14.04.1.02.000 8			Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				383.625.000		
					Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok	2		383.625.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								591.950.000		
					Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.1		591.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						112.524.000		
					Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	57		112.524.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					108.884.000		
					Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kabupaten/ Kota	20		108.884.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.000 2			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				17.912.000		
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2		17.912.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.000 7			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				25.355.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	2		25.355.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.001 5			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain				11.918.000		
					Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/ Kota	1		11.918.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.001 7			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga				53.699.000		

					Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	2		53.699.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						3.640.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1		3.640.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.02.000 8			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					3.640.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1		3.640.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							479.426.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69.47		442.530.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						442.530.000		
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	27.5		442.530.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.01.000 7			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal					103.065.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	10		103.065.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.001 2			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja					339.465.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/ Kota	7		339.465.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Unmetneed	%	7.78		36.896.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB						36.896.000		
						Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	10		36.896.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.02.000 2			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					36.896.000		
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Kelompok	2		36.896.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan									1.023.351.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10900		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan								1.023.351.000		
						Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	1.023.351.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						990.325.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	80	990.325.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					42.968.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	11	42.968.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				11.190.000		
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	2	11.190.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0007			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				15.230.000		
						Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	50	15.230.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0008			Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				16.548.000		
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	25	16.548.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					947.357.000		
						Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	75	947.357.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.02.0003			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				913.798.000		
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	1330	913.798.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0004			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				33.559.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok	3	33.559.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						33.026.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	33.026.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					33.026.000		
						Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	33.026.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.04.1.01.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				33.026.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	6	33.026.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									16.239.919.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								16.098.724.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	16.098.724.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.009.134.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	535.029.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					182.139.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	182.139.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				182.139.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	182.139.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.818.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	57.818.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				640.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.880.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	32.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.598.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.598.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.700.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	20.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.500.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					254.796.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	254.796.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.537.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	39.537.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				215.259.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	215.259.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.776.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	3	38.776.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.671.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	13.671.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.105.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.105.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	15.474.105.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.973.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	12.973.780.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.610.728.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	61	12.610.728.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				333.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	333.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19.990.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	19.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9.862.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	9.862.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					61.862.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	61.862.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.862.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	1.862.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.546.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	37.546.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				37.546.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	30	37.546.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					450.375.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	450.375.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.106.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	63.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				123.633.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	123.633.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.704.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.704.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.277.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	25.277.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.655.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	70.655.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.556.930.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.556.930.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				308.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	308.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.248.730.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.248.730.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.612.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	381.612.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				172.115.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	172.115.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				700.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.671.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	127.671.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.126.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	81.126.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						89.590.000		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	30	89.590.000	SEKRETARIAT	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					89.590.000		
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	12	89.590.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				89.590.000		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	3	89.590.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								141.195.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.8	141.195.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						141.195.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	50	141.195.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					141.195.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	50	141.195.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				63.733.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	63.733.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.462.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	77.462.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak									1.015.087.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak								657.088.000		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61	657.088.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						60.657.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	22.86	60.657.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					60.657.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	60.657.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.0001			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				60.657.000		
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	60.657.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						596.431.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82.86	596.431.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					575.685.000		
						Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kabupaten/ Kota	4	575.685.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				531.519.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	531.519.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.06.1.01.0003			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				44.166.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	10	44.166.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					20.746.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	20.746.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				10.542.000		
						Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	10.542.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				10.204.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	10.204.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak								357.999.000		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	78.5	357.999.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						357.999.000		
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	154.299.000		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					154.299.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	154.299.000		
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				39.229.000		
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	50	39.229.000		
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi				115.070.000		
						Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	115.070.000		
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11.8	203.700.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					76.142.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Permda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	34.2	76.142.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				60.826.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	60.826.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0005			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				15.316.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	15.316.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					127.558.000		
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	127.558.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				2.050.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	2.050.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0004			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi				2.050.000		
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	2.050.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0006			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				7.808.000		
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	7.808.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0007			Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi				14.230.000		
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	20	14.230.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0008			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan				101.420.000		
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	110	101.420.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan									1.445.555.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan								1.445.555.000		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.2	1.445.555.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.445.555.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	31.42	1.301.251.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					92.968.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	52	92.968.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				66.790.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	66.790.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0002			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				26.178.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	1	26.178.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					1.208.283.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	12	1.208.283.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				27.926.000		
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	27.926.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				593.201.000		
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	593.201.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0003			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi				7.971.000		
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	25	7.971.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				579.185.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	579.185.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	144.304.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					144.304.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	144.304.000		
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				29.234.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	50	29.234.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				115.070.000		
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	39	115.070.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									20.811.523.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									19.316.283.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75.5		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								18.995.382.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	18.995.382.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.995.382.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.350.586.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.899.929.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	14.899.929.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.254.439.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	14.254.439.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				376.274.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	376.274.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				269.216.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	269.216.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					108.940.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	108.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.940.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	8.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					2.803.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	2.803.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0005			Pengolahan Data Retribusi Daerah				2.803.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	2.803.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					98.129.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	98.129.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				98.129.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	98.129.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					594.504.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	594.504.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.593.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	45.593.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.567.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	47.567.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.052.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	24.052.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.370.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	49.370.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.816.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	8.816.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				94.106.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	94.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					704.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	7	704.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				704.600.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	704.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.393.875.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	1.393.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				414.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	414.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				979.875.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	979.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.806.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	84	547.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				213.781.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	23	213.781.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				295.165.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	295.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.860.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	60	38.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	644.796.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.086.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	100	40.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.810.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.976.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	5.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	4	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	24	348.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				162.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	162.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					179.710.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	13	179.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				79.710.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	79.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								320.901.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.91	320.901.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						320.901.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	320.901.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					320.901.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	320.901.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				225.637.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	225.637.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.264.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	95.264.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)									17.507.560.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85.47		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								9.797.969.000		
						Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	8	9.797.969.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						9.797.969.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	55	9.797.969.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					9.797.969.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	%	120	3.907.969.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3.907.969.000		
						JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	356.769.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	2450	3.551.200.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	%	100	5.890.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				5.890.000.000		
						JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	140.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
						JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	5	5.750.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan								7.709.591.000		
						Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/h	3600	7.709.591.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						7.709.591.000		
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0.45	7.651.621.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					7.651.621.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	%	20	7.651.621.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				7.651.621.000		
						JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	420	7.651.621.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1.25	57.970.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					57.970.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	57.970.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				57.970.000		
						JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	57.970.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)									10.281.023.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,47		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								7.130.334.000		
						Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	12	7.130.334.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						74.399.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87.7	74.399.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					74.399.000		
						PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	34	74.399.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				74.399.000		
						JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	5	74.399.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						7.055.935.000		
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0.01	7.055.935.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					7.055.935.000		
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	5,5	7.055.935.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				7.055.935.000		
						JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	30	6.769.192.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	40	22.593.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	10.012.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	Dokumen	1	2.985.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	226.835.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	12	24.318.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan								3.150.689.000		
						Skor PPH provinsi	Skor	94,2	3.150.689.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.321.566.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/ta hun	87,7	1.321.566.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					894.057.000		
						REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	Dokumen	1	894.057.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.01.0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				894.057.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	12	894.057.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					427.509.000		
						PPH Kab / Kota > 87	Angka	34	427.509.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				262.385.000		
						Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	4	192.385.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	500	70.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				165.124.000		
						JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	5	95.500.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	69.624.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						1.829.123.000		
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	90	778.865.000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					778.865.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	Dokumen	1	144.813.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				144.813.000		
						JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	250	144.813.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	Dokumen	1	444.859.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				444.859.000		
						JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	500	444.859.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	67	14.877.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				14.877.000		
						JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	20	14.877.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	%	20	174.316.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				174.316.000		
						Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	3	71.085.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	20	103.231.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	1.050.258.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.050.258.000		
						Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	2	1.050.258.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0006			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				266.978.000		
						Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	50	266.978.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				783.280.000		
						Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	90	783.280.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
JUMLAH									47.104.866.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas air									1.214.644.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Air	Angka	68.71		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								1.214.644.000		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.35	1.214.644.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						322.986.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	322.986.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					160.856.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	3	160.856.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.000 2			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				160.856.000		
						Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	3	160.856.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					162.130.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	10	162.130.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.000 5			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS				162.130.000		
						Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	10	162.130.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						451.554.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	316.724.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					316.724.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	316.724.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				316.724.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	380	316.724.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	134.830.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					134.830.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Unit	105	134.830.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				134.830.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Unit	140	134.830.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN						25.331.000		

			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
						Persentase limbah B3 yang dikelola	%	80		25.331.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						25.331.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440		25.331.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.05.1.01.000 2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					25.331.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1			25.331.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							291.345.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50		130.379.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						130.379.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	15		130.379.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.000 6			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					130.379.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kegiatan	30		130.379.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100		160.966.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						160.966.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	125		160.966.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.000 1			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					160.966.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi	Dokumen	125		160.966.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						123.428.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	123.428.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					123.428.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Laporan	12	123.428.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.0007			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				123.428.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Laporan	12	123.428.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									130.720.434.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								130.193.878.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	130.193.878.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						130.193.878.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	123.002.121.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					118.688.474.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	118.688.474.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				118.612.435.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	677	118.612.435.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.533.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	30.533.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				45.506.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	45.506.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					154.657.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	154.657.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				154.657.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	154.657.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					81.998.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	81.998.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12.500.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	12.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				69.498.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	69.498.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					590.018.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	590.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.013.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	21.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.229.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	40.229.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				62.229.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	62.229.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.085.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	71.085.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.373.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	45.373.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				129.089.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	129.089.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	221.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					605.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	605.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				565.200.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	565.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.212.313.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.212.313.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				583.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	583.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				170.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	170.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.448.693.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.448.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					669.461.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	669.461.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				457.205.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	457.205.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				26.405.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	26.405.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.241.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	101.241.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	61.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.810.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	664.659.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden	Dokumen	1	37.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.800.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	37.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.114.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden	%	100	82.114.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.827.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	2.827.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	2.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.124.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	5.124.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.600.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	9.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.563.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	31.563.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	6.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	25.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					435.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden	Laporan	1	435.260.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	740.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden	Laporan	1	83.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	350.720.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.485.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden	Unit	1	109.485.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				67.939.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	3	67.939.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.921.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	1.921.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.220.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	17	23.220.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden	Unit	3	16.405.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura	%	100	711.216.000	Balai Taman Hutan Raya KGPA A Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA	%	100	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.004.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.101.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	4.101.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.008.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	2.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.640.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura	Laporan	1	24.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					497.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA	Laporan		497.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	414.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.478.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA	Unit		146.478.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				128.604.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura	Unit	3	128.604.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.405.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura	Unit	7	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.469.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	4	11.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H	%	100	441.328.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					24.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H	Dokumen	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.593.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	56.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.405.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.202.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.306.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	4.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.504.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H	Laporan	1	4.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.689.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H	Laporan	1	35.689.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	185.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H	Laporan	1	1.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				124.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	1	124.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					152.895.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	152.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				122.833.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H	Unit	3	122.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.062.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H	Unit	1	10.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH	%	100	523.222.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.442.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH	%	100	60.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.294.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	3.294.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.506.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	12.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.040.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	6.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.026.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH	Laporan	1	12.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.576.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH	Laporan	1	19.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH	Unit	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH	Laporan	1	371.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH	Laporan	1	148.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				223.240.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	1	223.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH	Unit	1	82.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.356.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH	Unit	3	42.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH	Unit	12	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.084.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	0	6.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1	%	100	523.038.000	CDK 1	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.170.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	50.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.150.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	3.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.520.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	3.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1	Paket	1	2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1	Laporan	1		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1	Laporan	1		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.640.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1		347.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.640.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1	Laporan	1		1.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1	Laporan	1		71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	1		275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.228.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1	Unit	1		125.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				103.828.000		
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1	Unit	3		103.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.400.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1		21.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10	%	100		436.169.000	CDK 10	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10	Dokumen	1		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10	Dokumen	1		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10	%	100		50.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.700.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10	Paket	1	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10	Laporan	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10	Laporan	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10	Laporan	1	290.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10	Laporan	1	113.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				176.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	1	176.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.169.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10	Unit	1	82.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.169.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10	Unit	2	73.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10	Unit	38	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11	%	100	373.445.000	CDK 11	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.129.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11	%	100	47.129.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				902.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.051.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.702.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	4.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.024.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11	Paket	1	1.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				3.450.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu CDK 11	Laporan	1	3.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199.420.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11	Laporan	1	199.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11	Laporan	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11	Laporan	1	33.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.896.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	81.896.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.789.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11	Unit	2	64.789.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.905.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11	Unit	1	8.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.202.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	1	8.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2	%	100	438.272.000	CDK 2	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.039.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2	%	100	42.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.550.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.818.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	2.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.099.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2	Paket	1	4.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.562.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	3.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.010.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2	Laporan	1	2.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.730.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2	Laporan	1	303.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				730.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2	Laporan	1	730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				243.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	1	243.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.503.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2	Unit	1	77.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				61.906.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2	Unit	2	61.906.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.391.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2	Unit	1	7.391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.206.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	1	8.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3	%	100	472.624.000	CDK 3	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.300.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					61.789.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3	%	100	61.789.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.562.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.451.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	8.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.572.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3	Paket	1	2.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	6.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3	Paket	1	5.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3	Laporan	1	311.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3	Laporan	1	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				235.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	1	235.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.095.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3	Unit	1	96.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				74.722.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3	Unit	2	74.722.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.471.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3	Unit	0	11.471.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.902.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	1	9.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4	%	100	516.532.000	CDK 4	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.540.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4	Dokumen	1	10.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.540.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	10.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.695.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4	%	100	50.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.900.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	6.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.662.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4	Paket	1	3.662.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.629.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	4.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu CDK 4	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4	Laporan	1	368.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4	Laporan	1	1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69.786.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4	Laporan	1	69.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				294.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	294.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.911.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4	Unit	1	86.911.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.787.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4	Unit	2	73.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.124.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4	Unit	1	9.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5	%	100	430.179.000	CDK 5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5	Dokumen	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					43.562.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5	%	100	43.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.370.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	2.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.808.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	2.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.205.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.175.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	4.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5	Laporan	1	308.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5	Laporan	1	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5	Laporan	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.977.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5	Unit	1	61.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.372.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5	Unit	2	47.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.405.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5	Unit	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	1	8.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6	%	100	487.155.000	CDK 6	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.780.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 6	%	100	40.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.550.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.830.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	2.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 6	Laporan	1	314.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6	Laporan	1	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6	Laporan	1	94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					116.735.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6	Unit	1	116.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				86.333.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6	Unit	2	86.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6	Unit	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.202.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	1	8.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7	%	100	421.879.000	CDK 7	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.434.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7	%	100	46.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.362.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	2.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.449.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.449.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.113.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.113.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.638.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	4.638.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.282.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7	Paket	1	1.282.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.590.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7	Laporan	1	29.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7	Laporan	1	264.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7	Laporan	1	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7	Laporan	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				218.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	1	218.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.805.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7	Unit	1	107.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				81.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7	Unit	2	81.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.405.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7	Unit	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8	%	100	405.701.000	CDK 8	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 8	Dokumen	1	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8	Dokumen	1	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.350.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8	%	100	41.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.560.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	2.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.535.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	3.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.770.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8	Paket	1	2.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.810.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	3.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.675.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8	Paket	1	1.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.204.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8	Laporan	1	276.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8	Laporan	1	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8	Laporan	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	4.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				224.783.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	224.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.447.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8	Unit	1	81.447.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.799.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8	Unit	2	65.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.446.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8	Unit	40	7.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.202.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	8.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9	%	100	346.338.000	CDK 9	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 9	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.233.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9	%	100	58.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.562.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	3.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.914.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9	Paket	1	4.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.147.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	11.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.330.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9	Paket	1	1.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9	Laporan	1	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.672.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 9	Laporan	1	206.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				712.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9	Laporan	1	712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				155.960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	1	155.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.433.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9	Unit	1	75.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.619.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9	Unit	2	57.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.814.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9	Unit	1	7.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								526.556.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	526.556.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						526.556.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	526.556.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					526.556.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	526.556.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				267.158.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	267.158.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				259.398.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	259.398.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tutupan lahan									10.552.351.000		
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	59.46			
	Meningkatnya luasan tutupan lahan								10.552.351.000		
						Luas tutupan lahan	Ha	1022457	10.552.351.000		
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						8.610.955.000		
						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.38	53.248.000		
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					53.248.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	1440.91	53.248.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				13.978.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	13.978.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				39.270.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Dokumen	3	39.270.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0.02	602.345.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					602.345.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1	Ha	75	602.345.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				354.589.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	45	354.589.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				193.656.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	28.5	193.656.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				54.100.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1	Ha	2.2	54.100.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0.02	426.795.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					426.795.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10	Ha	68.8	426.795.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				263.630.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	45.67	263.630.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				163.165.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	23.13	163.165.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0.02	451.121.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					451.121.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11	Ha	87	451.121.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				291.298.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	62	291.298.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				159.823.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	25	159.823.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0.03	928.061.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					928.061.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2	Ha	125.45	928.061.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				290.657.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	50	290.657.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				142.404.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	26	142.404.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				495.000.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 2	Ha	49.45	495.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0.03	574.919.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					574.919.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3	Ha	95.28	574.919.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				326.180.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	60	326.180.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				177.519.000		
						Luas lahan yang dihiijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	32	177.519.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				71.220.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3	Ha	3.28	71.220.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0.06	981.549.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					981.549.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4	Ha	232.75	981.549.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				294.873.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	84.5	294.873.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				143.196.000		
						Luas lahan yang dihiijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	28.5	143.196.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				543.480.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4	Ha	119.75	543.480.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0.06	1.320.052.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.320.052.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5	Ha	207.93	1.320.052.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				251.467.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	80	251.467.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				129.385.000		
						Luas lahan yang dihiijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	28	129.385.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				939.200.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5	Ha	99.93	939.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0.04	652.251.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					652.251.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6	Ha	153.2	652.251.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				290.727.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	85	290.727.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				143.224.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	57.2	143.224.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				218.300.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6	Ha	11	218.300.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0.03	383.720.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					383.720.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7	Ha	129.5	383.720.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				257.600.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	92	257.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				126.120.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	37.5	126.120.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0.04	608.107.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					608.107.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8	Ha	161.3	608.107.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				296.251.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	135	296.251.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				134.456.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	19	134.456.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				177.400.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8	Ha	7.3	177.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0.03	416.050.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					416.050.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9	Ha	104	416.050.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				302.436.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	60	302.436.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				113.614.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	24	113.614.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	115.747.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					115.747.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	115.747.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				115.747.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Dokumen	1	115.747.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan produksi bibit	%	-90	766.848.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Perbenihan Tanaman Hutan					766.848.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Bibit	1300000	702.598.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.09.0006			Pembangunan Sumber Benih				702.598.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Bibit	100000	611.923.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Luas sumber benih yang dibangun	Ha	0.5	90.675.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	75	64.250.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.0001			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar				3.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	3	3.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih				3.000.000		
						Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	3	3.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih				5.000.000		
						Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	3	5.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit				7.500.000		
						Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Sertifikat	10	7.500.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				45.750.000		
						Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar	Dokumen	2	45.750.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	45.99	310.987.000		
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					96.743.000		
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	82	96.743.000		
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				25.569.000		
						Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	Dokumen	4	25.569.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				71.174.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Dokumen	12	71.174.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					97.639.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	8	97.639.000		
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				71.555.000		
						Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	8	71.555.000		
		3.28.03.1.06.0004			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				26.084.000		
						Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib	Unit	2	26.084.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					116.605.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	183	116.605.000		
		3.28.03.1.07.0001			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				39.822.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit manajemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah	Unit	12	39.822.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				38.647.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun	Unit	12	38.647.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0003			Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				38.136.000		
						Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit	12	38.136.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	0	19.155.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					19.155.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9	Unit	0	19.155.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				19.155.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9	Unit	6	19.155.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						874.880.000		
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	71	468.932.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					468.932.000		
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Dokumen	2	145.364.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				16.656.000		
						Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti	Dokumen	55	16.656.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi				11.179.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	Dokumen	3	11.179.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				117.529.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	Dokumen	2	117.529.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	323.568.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.0002			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				158.736.000		
						Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi	Bulan	12	158.736.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0003			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				72.600.000		
						Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	72.600.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0005			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				92.232.000		
						Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	10	92.232.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	31.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					31.500.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	2	31.500.000		
		3.28.04.1.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					31.500.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Laporan	2	31.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	60	258.130.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					258.130.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	3	258.130.000		
		3.28.04.1.03.0005		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					258.130.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	3	258.130.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	116.318.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					116.318.000		
						Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	705	116.318.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					116.318.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Dokumen	1	116.318.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						858.077.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	111.627.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					111.627.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	111.627.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.0001		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan					30.292.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	Orang	90	30.292.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				48.737.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	2	48.737.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				32.598.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	32.598.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0.3	139.587.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					139.587.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1	Kelompok	3	139.587.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				139.587.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1	Kelompok	130	139.587.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0.2	75.996.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					75.996.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10	Kelompok	2	75.996.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				19.181.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10	Orang	60	19.181.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				56.815.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10	Kelompok	105	56.815.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0.2	85.218.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					85.218.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11	Kelompok	2	85.218.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				28.658.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11	Orang	40	28.658.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				56.560.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11	Kelompok	57	56.560.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0.2	39.908.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					39.908.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2	Kelompok	2	39.908.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				39.908.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2	Kelompok	101	39.908.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0.2	123.925.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					123.925.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3	Kelompok	2	123.925.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				82.367.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3	Kelompok	109	82.367.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				41.558.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3	Unit	1	41.558.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0.2	38.515.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					38.515.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4	Kelompok	2	38.515.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				38.515.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4	Kelompok	54	38.515.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0.3	42.446.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					42.446.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5	Kelompok	3	42.446.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				42.446.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5	Kelompok	75	42.446.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0.2	78.214.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					78.214.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6	Kelompok	2	78.214.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				78.214.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6	Kelompok	107	78.214.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0.3	43.125.000	CDK 7	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					43.125.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7	Kelompok	3	43.125.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				43.125.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7	Kelompok	121	43.125.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0.2	40.758.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.758.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8	Kelompok	2	40.758.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.758.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8	Kelompok	72	40.758.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0.2	38.758.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					38.758.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9	Kelompok	2	38.758.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				38.758.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9	Kelompok	69	38.758.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						208.439.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	208.439.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					208.439.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	2	193.296.000		
		3.28.06.1.01.0002			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				70.181.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	5	70.181.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				123.115.000		
						Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS	Kelompok	2	123.115.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2	15.143.000		
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				15.143.000		
						Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Unit	2	15.143.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas udara									3.069.131.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	84.91		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								3.069.131.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks SO2 dan NO2	Angka	0.3696	3.069.131.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.282.738.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2.85	663.954.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					663.954.000		
						Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	tCO2e	20000	580.295.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				580.295.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	23.458.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	100	556.837.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi	Unit	105	83.659.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				83.659.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara	Unit	140	83.659.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	337.890.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkugan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					337.890.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1	337.890.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				337.890.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	130	337.890.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	280.894.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkugan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					280.894.000		
						Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	1	280.894.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkugan Hidup Provinsi				280.894.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	72	90.334.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi	Unit	28	190.560.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						681.509.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0.4	137.786.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					137.786.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	10	137.786.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				17.718.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi	Dokumen	1	17.718.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				83.321.000		
						Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	10	83.321.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				36.747.000		
						Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati	Orang	60	36.747.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2.6	543.723.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					543.723.000		
						Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	543.723.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.0003			Pengelolaan Kebun Raya				543.723.000		
						Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	543.723.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						773.364.000		
						Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	33	265.870.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					265.870.000		
						Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah	Kabupaten/Kota	2	265.870.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				265.870.000		
						Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah	Kelompok	2	265.870.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	23.246.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					23.246.000		
						Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Unit	2	23.246.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				23.246.000		
						Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	400	23.246.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10.5	484.248.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					484.248.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	Unit	128	484.248.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.0002			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				365.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	125	365.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				119.248.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Unit	3	119.248.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						331.520.000		
						Persentase sampah yang tertangani	%	43	331.520.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					331.520.000		
						Jumlah sampah tertangani	Ton	2650000	331.520.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				331.520.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan	Dokumen	1	331.520.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									145.556.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Desa Mandiri									5.362.557.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0.7618		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah								5.362.557.000		
						Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah	%	25.86	5.362.557.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						10.669.000		
						Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100	10.669.000	Bidang Penataan Desa	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					10.669.000		
						Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa	Desa	1	10.669.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.0003			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				10.669.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1	10.669.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						353.476.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	46.98	353.476.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					353.476.000		
						Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	Buah	1	121.030.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.0002			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				121.030.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	Dokumen	1	121.030.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
						Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kws	1	232.446.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				232.446.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	232.446.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.072.724.000		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	471.496.000	Bidang Penataan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					471.496.000		
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kabupaten/ Kota	35	271.575.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				271.575.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	271.575.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	Desa	8	2.417.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2.417.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	2.417.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan	Dokumen	55	197.504.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0001				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			197.504.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Dokumen	1	197.504.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	601.228.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					601.228.000		
						Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi	Dokumen	55	150.181.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0006				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			150.181.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitas pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	150.181.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	58	24.862.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0005				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			24.862.000		
						Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	24.862.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	29	312.796.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0012				Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			312.796.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	Dokumen	1	312.796.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik	Desa	24	113.389.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.0018				Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota			113.389.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitas pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	Dokumen	1	113.389.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.925.688.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	44.95	286.406.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					286.406.000		
						Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya	Unit	350	286.406.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				286.406.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Dokumen	1	286.406.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	3.491.691.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.491.691.000		
						Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Orang	150	79.998.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79.998.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Dokumen	1	79.998.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	70	316.554.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				316.554.000		
						Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Dokumen	1	316.554.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	3.095.139.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3.095.139.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	3.095.139.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	147.591.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat					147.591.000		

				Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	Kali	1		50.852.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					50.852.000		
					Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Dokumen	1			50.852.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
					Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah	Unit	35			96.739.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					96.739.000		
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dokumen	1			96.739.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										19.794.054.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah									18.145.253.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	Angka	84.55		18.145.253.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							18.145.253.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		18.145.253.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.743.693.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12		14.743.693.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.386.014.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	77		14.386.014.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					357.679.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1		357.679.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						621.568.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		621.568.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.405.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		6.405.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					88.680.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10		88.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				59.280.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	59.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				83.752.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12	83.752.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.260.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				114.648.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	114.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				39.576.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	39.576.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				56.967.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	56.967.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					108.680.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	108.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				108.680.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	108.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.072.674.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.072.674.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				468.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	468.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.894.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	20.894.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.583.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.583.580.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					498.638.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	498.638.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				168.597.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	168.597.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.202.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	3.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				16.405.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	16.405.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				215.680.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhiya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	215.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.754.000		
						Jumlah Bulan terpenuhiya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	24.754.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								1.648.801.000		
						Indeks Manajemen Risiko Dispermades	Nilai	2.6	1.648.801.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.648.801.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	95	1.648.801.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.648.801.000		
						Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun	%	100	1.648.801.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				181.705.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	181.705.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.467.096.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	1.467.096.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									444.837.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan								444.837.000		
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah	%	89	444.837.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						156.622.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	98	156.622.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					156.622.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	99	156.622.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				156.622.000		
						Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	Dokumen	1	156.622.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						154.154.000		
						Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	95	154.154.000	Bidang Fasilitas Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					154.154.000		
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran	%	98	154.154.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				154.154.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	154.154.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						134.061.000		
						Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	14.29	134.061.000	Bidang Fasilitas Layanan Adminduk	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					134.061.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	134.061.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				134.061.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	134.061.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
JUMLAH									25.601.448.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									64.239.972.000	Dinas Perhubungan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78.48		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								64.064.344.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80.5	64.064.344.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						64.064.344.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	188.314.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.717.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.717.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.159.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.504.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	28.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.045.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.510.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	4.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.338.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	38.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.338.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	102.684.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.184.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	55.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.184.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	131.049.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.840.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.709.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	31.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.709.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	137.454.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.245.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	75.245.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.745.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.709.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	32.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.709.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	154.309.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				48.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	48.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.409.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	13	32.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.709.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	3.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	143.114.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.050.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.050.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				56.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.125.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.155.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	15.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.709.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	31.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.709.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.709.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	291.100.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	29.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.100.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	62.916.320.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.662.329.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	46.662.329.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				45.949.166.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	300	45.949.166.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				678.163.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	678.163.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					938.616.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	938.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				938.616.000		
						Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	938.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					83.875.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	83.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.875.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	43.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					952.969.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	952.969.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.155.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	19.155.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.074.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	33.074.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	40	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	37.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				746.115.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	746.115.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.325.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	25.325.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.216.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	35	2.216.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.079.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	2.079.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				107.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	107.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.250.885.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	10.250.885.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.480.305.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.480.305.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.768.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8.768.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.811.646.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	1.811.646.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				688.042.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	73	688.042.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.984.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	64.984.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				191.550.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	191.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.070.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	117.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								175.628.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.3	175.628.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						175.628.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	175.628.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					175.628.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	175.628.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				136.086.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	136.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.542.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	39.542.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi									147.689.917.000	Dinas Perhubungan	
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.276		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah								19.808.451.000		
						Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15.33	19.808.451.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						18.707.449.000		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.84	358.208.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					358.208.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	22676	358.208.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				337.978.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	337.978.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.230.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.230.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.84	93.328.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					93.328.000		
						Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	1038	93.328.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				84.120.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	84.120.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				9.208.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	9.208.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.84	181.075.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					181.075.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2340	181.075.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				168.575.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	168.575.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12.500.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang diindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.84	166.530.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.530.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	7071	166.530.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.530.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.530.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang diindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.84	198.855.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					198.855.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3659	198.855.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				183.855.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	183.855.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang diindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.84	166.090.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.090.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	4198	166.090.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.550.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.550.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				14.540.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	14.540.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.95	1.326.040.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.326.040.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.33	1.326.040.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				192.840.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	192.840.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.133.200.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	1.133.200.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.94	1.425.725.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.425.725.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.19	1.425.725.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				116.040.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	116.040.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.309.685.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	1.309.685.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.95	1.225.882.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.225.882.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.11	1.225.882.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				140.040.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	140.040.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.085.842.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	1.085.842.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.94	1.583.760.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.583.760.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.14	1.583.760.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				138.790.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	138.790.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.444.970.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	1.444.970.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.95	1.516.072.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.516.072.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.24	1.516.072.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				130.440.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	130.440.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.385.632.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	3	1.385.632.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.95	1.951.895.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					1.951.895.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.5	1.951.895.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				150.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	58	150.480.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.801.415.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	1.801.415.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0.985	121.283.000	Bidang Lalu Lintas	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					121.283.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	439863	121.283.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				102.630.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	102.630.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				18.653.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	18.653.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.4	8.392.706.000	Bidang Lalu Lintas	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					8.297.280.000		
						Rasio perlengkapan jalan terpasang	Angka	0.64	8.297.280.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				8.297.280.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	513	8.297.280.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					58.110.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	17	22.916.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				22.916.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	22.916.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	12	35.194.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				35.194.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	35.194.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					37.316.000		
						Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Dokumen	390	37.316.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.06.0006			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				37.316.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	61	37.316.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						26.160.000		
						Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0.4	26.160.000	Bidang Pelayaran	
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					26.160.000		
						Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Angka	0.18	26.160.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				26.160.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi	Unit	25	26.160.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.074.842.000		
						Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perengkapan jalan	Angka	0.08	1.074.842.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.074.842.000		
						Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0.36	1.074.842.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.074.842.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	3	1.074.842.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya konektivitas provinsi								10.412.982.000		
						Rasio konektivitas provinsi	Angka	0.412	10.412.982.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						9.664.802.000		
						Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0.52	327.656.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					327.656.000		
						Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Angka	0.5	327.656.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.0007			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				327.656.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan	2	327.656.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.21	1.032.532.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					1.032.532.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.5	1.032.532.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.032.532.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	6	1.032.532.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.02	47.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					47.950.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.5	47.950.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				47.950.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	47.950.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.25	354.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					354.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.56	354.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				354.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	354.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.24	88.750.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					88.750.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.5	88.750.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				88.750.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	88.750.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.22	256.270.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					256.270.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.5	256.270.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				256.270.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	256.270.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio ketesisan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.18	199.140.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					199.140.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.5	199.140.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				199.140.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	199.140.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0.486	959.721.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					959.721.000		
						Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0.627	959.721.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				959.721.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	9	959.721.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0.229	5.993.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					5.993.000.000		
						Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	Angka	0.41	5.993.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				105.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	105.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.100.000.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.100.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				4.788.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	4.788.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO
						Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0.56	405.783.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					19.810.000		
						Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0.32	19.810.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19.810.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D	Unit	216	19.810.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					305.834.000		
						Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Angka	0.86	305.834.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				265.012.000		
						Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	3	265.012.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				40.822.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	7	40.822.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.790.000		
						Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0.09	17.790.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				17.790.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	17.790.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					25.000.000		
						Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0.62	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	464	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.374.000		
						Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0.44	17.374.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				17.374.000		
						Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	76	17.374.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					19.975.000		
						Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	Angka	1	19.975.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19.975.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	19.975.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						748.180.000		
						Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0.378	748.180.000	Bidang Pelayaran	
				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					32.257.000		
						Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya	Angka	0.4	32.257.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				32.257.000		
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	4	32.257.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri,					37.387.000		

				dan Depo Peti Kemas								
						Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Angka	0.13		37.387.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	
		2.15.03.1.06.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					37.387.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO :	Dokumen	10		37.387.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						38.536.000		
						Berth occupancy ratio	Angka	0.45		38.536.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					38.536.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan	Unit	8		38.536.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						640.000.000		
						Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Angka	0.53		640.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					130.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1		130.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					510.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	2		510.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum									117.468.484.000		
						On Time Performance layanan transportasi	%	85.05		117.468.484.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							117.468.484.000		
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	67.34		696.815.000	Bidang Angkutan Jalan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					696.815.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	27824836	696.815.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				696.815.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	696.815.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	53	116.771.669.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					116.771.669.000		
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	6944462	116.771.669.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				116.771.669.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	116.771.669.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									211.929.889.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan									70.569.402.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,5		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah								2.451.930.000		
						Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638	2.451.930.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						2.451.930.000		
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	50	2.451.930.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.083.631.000		
						Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	%	50	1.083.631.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.000 1			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				193.323.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	193.323.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 2			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				105.796.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	105.796.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 3			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				272.928.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan	50	272.928.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 4			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				511.584.000		
						80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	50	511.584.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					1.368.299.000		
						Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	%	50	1.368.299.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.000 1			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1.368.299.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	%	60	1.368.299.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	OPD Provinsi
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah								67.240.389.000		
						Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,69	24.736.942.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						24.736.942.000		
						Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	74	24.736.942.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					24.736.942.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	OPD	41	12.022.623.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.0029			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				12.022.623.000		
						Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Buah	25	12.022.623.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif	Angka		12.714.319.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.02.0026			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE				12.714.319.000		
						Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	Angka	15	12.714.319.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	4.1	18.060.461.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						18.060.461.000		
						Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	47	18.060.461.000	Bidang E-Government	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					18.060.461.000		
						Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	%	100	17.659.305.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.0017			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				17.659.305.000		
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	Angka	14	17.659.305.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
						Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	%	65	197.808.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0028			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				197.808.000		
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi informasi yang Diterbitkan	Angka	10	197.808.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	%	50	203.348.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0018			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas				203.348.000		
						Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	Angka	25	203.348.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
						Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100	24.442.986.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						24.442.986.000		
						Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	33	2.038.869.000	Bidang Statistik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					2.038.869.000		
						Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	80	2.038.869.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0006			Pelayanan Informasi Publik				498.510.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dokumen	83	498.510.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.02.1.01.0020			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				1.540.359.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	87	1.540.359.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	81	22.404.117.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					22.404.117.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	91	5.401.916.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0010			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				250.154.000		
						Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Kelompok	30	250.154.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0012			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.151.762.000		
						Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	Kelompok	30	5.151.762.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	260	8.597.978.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0004			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1.102.640.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	50	1.102.640.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0005			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				5.283.429.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	20	5.283.429.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0007			Layanan Hubungan Media				373.217.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	10	373.217.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0008			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1.838.692.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	10	1.838.692.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokumen	260	8.404.223.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0017			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				171.606.000		
						Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	Dokumen	35	171.606.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0019			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				7.309.721.000		
						Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	Dokumen	80	7.309.721.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0023			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				922.896.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Dokumen	129	922.896.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial								877.083.000		
						Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	64	877.083.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						877.083.000		
						Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	48	877.083.000	Bidang Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					877.083.000		
						Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	60	245.398.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.0002			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				245.398.000		
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	45	245.398.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi
						Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	48	631.685.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				52.593.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	40	52.593.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0008			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				260.000.000		
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun	Angka	80	260.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0009			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				253.378.000		
						Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	Angka	8	253.378.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0011			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				65.714.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	Angka	100	65.714.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									28.090.911.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	69.2		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								27.767.166.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	27.767.166.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.767.166.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	79	27.767.166.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.361.397.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	19.361.397.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.900.000.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	111	18.900.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				352.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	352.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				38.560.000		
						Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	38.560.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				34.321.000		
						Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	2	34.321.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				36.516.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	18	36.516.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					236.933.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	236.933.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				18.781.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.781.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.152.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	18.152.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					345.323.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	345.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24.902.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	24.902.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				57.935.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	57.935.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				262.486.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	262.486.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					912.065.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	912.065.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				54.445.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	54.445.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				191.604.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	191.604.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.715.000		
						jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	10	54.715.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.088.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	60.088.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				54.121.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	54.121.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				600.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.166.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	99.166.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				321.861.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	50	321.861.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.465.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	25.465.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				366.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	Unit	5	366.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				80.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				286.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	286.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.368.214.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	Laporan	4	5.368.214.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.422.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.422.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	21.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.893.192.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.893.192.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.177.234.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	Unit	245	1.177.234.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				452.980.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	452.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.202.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	3.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				246.080.000		
						umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	246.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				409.959.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	409.959.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.013.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	45.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								323.745.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.75	323.745.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						323.745.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	323.745.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					323.745.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	323.745.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				221.300.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	221.300.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				102.445.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	102.445.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									98.660.313.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB									7.167.999.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12.99		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah								740.384.000		
						Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0.38	740.384.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						740.384.000	
						Persentase koperasi berkualitas	%	26.74	740.384.000	Bidang Pengawasan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					374.052.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	374.052.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				374.052.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit	150	374.052.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					366.332.000		
						Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	366.332.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				366.332.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	280	366.332.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
	Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah								6.427.615.000		
						Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7.39	6.427.615.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						564.392.000		
						Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	11.5	564.392.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					564.392.000		
						Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	90	564.392.000	SEKSI PENYELENGGARA	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				564.392.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	250	564.392.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						1.149.690.000		
						Persentase koperasi provinsi produktif	%	48.53	1.149.690.000	Bidang Kelembagaan	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.149.690.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya	%	42.93	497.628.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				497.628.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	145	497.628.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya	%	33.56	652.062.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				652.062.000		
						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit	160	652.062.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						2.645.647.000		
						Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	25	558.540.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					558.540.000		
						Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya	%	95.86	558.540.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				558.540.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	1150	558.540.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi
						Persentase usaha mikro mandiri	%	82.3	2.087.107.000		
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					2.087.107.000		
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya	%	94.14	1.714.721.000		
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				171.568.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	240	171.568.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				578.000.000		
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi		Unit	100	578.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				965.153.000		
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Unit	1240	965.153.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya		%	94.44	372.386.000		
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				372.386.000		
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Unit	300	372.386.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						2.067.886.000		
					Persentase UMKM siap bermitra		%	23.08	2.067.886.000	Bidang Bina Usaha	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					2.067.886.000		
					Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya		%	30	2.067.886.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				363.624.000		
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi		Unit	280	363.624.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil				1.704.262.000		
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Unit	255	1.704.262.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									24.802.590.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
					Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		Angka	88		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								24.081.631.000		
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Angka	95	24.081.631.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						24.081.631.000		
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		%	100	4.422.268.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					173.680.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan		%	100	173.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	41.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.280.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	21.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					77.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	7	77.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.700.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.448.976.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	38	3.448.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				833.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	833.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.585.126.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.585.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					721.912.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	161	721.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.912.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	43.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	19	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
					Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				553.000.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3		553.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.000.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	86		56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		19.659.363.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.475.779.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	38		15.475.779.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X-XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.954.533.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	7		14.954.533.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				408.402.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12		408.402.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				112.844.000		
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12		112.844.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.000.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					16.300.000		
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		16.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.800.000		
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1		3.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.500.000		
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50		5.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				7.000.000		
					Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Paket	4		7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.140.668.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		1.140.668.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	29.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				134.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	134.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.668.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	9.668.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				195.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.000.000		
						Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.577.456.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	2.577.456.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				585.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	585.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	36.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.950.856.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.950.856.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					359.160.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	133	359.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	26.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.160.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	124.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	25	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								720.959.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	720.959.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						720.959.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	720.959.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					720.959.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	720.959.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				622.421.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	622.421.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98.538.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	98.538.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									31.970.589.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah									18.738.177.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	84		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								18.548.922.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80.5	18.548.922.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.548.922.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.548.922.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.943.362.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	14.943.362.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.657.950.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	86	14.657.950.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				285.412.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	285.412.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					78.989.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	78.989.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				78.989.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	78.989.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44.302.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	44.302.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				19.690.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	19.690.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				24.612.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	24.612.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					551.336.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	551.336.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.013.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.878.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	49.878.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				61.153.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	61.153.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.013.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	41.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.562.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.562.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.344.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.344.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.060.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.125.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	223.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.112.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	10.112.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.076.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	8.076.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					424.424.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	27	424.424.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				424.424.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	27	424.424.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.959.582.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.959.582.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				550.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	550.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.356.982.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.356.982.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546.927.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	187	546.927.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	125.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.882.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	3.882.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.728.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	150	125.728.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				276.817.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	276.817.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah								189.255.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	189.255.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						189.255.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	189.255.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					189.255.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	189.255.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				94.128.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	94.128.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.127.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	95.127.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal									3.274.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4.25		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan								1.527.244.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	1.527.244.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.104.042.000		
						Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	342.653.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					342.653.000		
						Persentase standar pelayanan sesuai ISO	%	90	239.260.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				239.260.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	69.260.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	170.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan	%	100	103.393.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				103.393.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun	Orang	1	84.268.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatatur pelayanan	Dokumen	1	19.125.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	187.370.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					187.370.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	187.370.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				187.370.000		
						Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan	Kali	60	45.191.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat	Kali	600	142.179.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91	574.019.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					574.019.000		
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Dokumen	800	212.179.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				197.664.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Unit	900	197.664.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				14.515.000		
						Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Kali	2	14.515.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Dokumen	700	223.273.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				208.756.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Unit	900	208.756.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				14.517.000		
						Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Kali	2	14.517.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Dokumen	500	138.567.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				124.052.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Unit	1000	124.052.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				14.515.000		
						Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian	Kali	2	14.515.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						423.202.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	423.202.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					423.202.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	233.723.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				233.723.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	233.723.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
						Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	%	100	189.479.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				189.479.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4	189.479.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN								1.746.836.000		
						Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	1.746.836.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						350.519.000		
						Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	350.519.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					185.667.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	185.667.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				185.667.000		
						Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	185.667.000	SEKSI PERENCANAAN	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					164.852.000		
						Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Wilayah Penanaman Modal yang dipromosikan	Dokumen	1	164.852.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				164.852.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Wilayah Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	164.852.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.030.991.000		
						Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	126.214.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					126.214.000		
						Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan	Dokumen	8	126.214.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				126.214.000		
						Jumlah fasilitasi kemitraan usaha	Kali	16	126.214.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
						Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	67	904.777.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					904.777.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	35	807.277.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				699.025.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	1	699.025.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				108.252.000		
						Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	108.252.000	SEKSI PROMOSI	
						Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan	Dokumen	35	97.500.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				97.500.000		
						Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN	Kali	24	97.500.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						365.326.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	22	365.326.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					365.326.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui	Unit	20500	101.415.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.0005			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				101.415.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal	Unit	2100	101.415.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
						Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Orang	100	127.071.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				127.071.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	2	127.071.000	SEKSI PENGENDALIAN	
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Unit	200	115.178.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal				115.178.000		
						Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal	Kali	80	115.178.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	80	21.662.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				21.662.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	11	21.662.000	SEKSI PENGENDALIAN	
JUMLAH									22.012.257.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									48.317.671.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80.41			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								47.978.022.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	47.978.022.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						47.978.022.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	43.603.679.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.364.524.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	25.364.524.000		
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.657.828.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	170	24.657.828.000		
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				706.696.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	706.696.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000		
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					133.761.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	133.761.000		
		X.XX.01.1.05.001 1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				133.761.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	133.761.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					940.657.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	940.657.000		
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				64.053.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	64.053.000		
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.476.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	56.476.000		
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				191.080.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	191.080.000		
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.089.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	40.089.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				158.093.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	158.093.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				405.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	405.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.866.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.866.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					565.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	565.000.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				550.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	550.000.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	15.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.872.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	13.872.990.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				22.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	22.990.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.700.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	12.000.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.326.747.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.326.747.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				92.026.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	92.026.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				272.161.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	272.161.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.134.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	160.134.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				64.053.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	64.053.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.638.373.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	1.638.373.000		
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	100.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%		4.374.343.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100	150.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.232.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		106.232.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.216.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.216.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				6.012.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	6.012.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.052.775.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		2.052.775.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.785.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.785.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	2.000.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	49.990.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.065.336.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		2.065.336.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.999.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	89.999.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.975.337.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.975.337.000		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								339.649.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.02	339.649.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						339.649.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	339.649.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					339.649.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	339.649.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				217.938.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	217.938.000		
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				121.711.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	121.711.000		
Meningkatkan Pembangunan Olahraga									278.462.120.000		
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent					Sport Development Index (SDI)	%	0.45			
									278.409.531.000		
						Peringkat nasional pada kejuaraan multievent	Peringkat	3	278.409.531.000		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						278.409.531.000		
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	105	22.966.015.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					9.283.493.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	105	9.283.493.000		
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				9.283.493.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	2	9.283.493.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					344.830.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	190	344.830.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				344.830.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	10	344.830.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					13.337.692.000		
						Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	Orang	284	13.337.692.000		
		2.19.03.1.03.0001			Seleksi Atlet Daerah				234.856.000		
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	300		234.856.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.102.836.000		
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	215		13.102.836.000		OPD Provinsi
					Persentase peningkatan perolehan medali	%	31.25		255.443.516.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					20.738.229.000		
					Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	250		20.738.229.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				6.455.933.000		
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	625		6.455.933.000		
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				129.276.000		
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1		129.276.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				14.153.020.000		
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	9		14.153.020.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					234.705.287.000		
					Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	125		234.705.287.000		
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				160.184.375.000		
					Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	200		160.184.375.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				382.359.000		
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	500		382.359.000		
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				138.553.000		
					Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1		138.553.000		
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				74.000.000.000		
					Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700		74.000.000.000		
	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat								52.589.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat kebugaran masyarakat	%	0.202	52.589.000		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						52.589.000		
						Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	1050	52.589.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					52.589.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Unit	3	52.589.000		
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				52.589.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	52.589.000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									14.033.162.000		
						Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1737000000000			
						Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8.26			
	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif								388.352.000		
						Jumlah kabupaten/kota kreatif	Kabupaten/	1	388.352.000		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						388.352.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/ Kota	8	388.352.000		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					295.382.000		
						Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/	2	295.382.000		
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				295.382.000		
						Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	3	295.382.000		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					92.970.000		
		3.26.04.1.02.0008			Perlindungan Hasil Kreativitas	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	80	92.970.000		
									92.970.000		
						Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	50	92.970.000		
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan								13.644.810.000		
						Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	15073629	13.644.810.000		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6.686.674.000		
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	26.67	6.686.674.000		
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					5.318.881.000		
						Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	2	5.318.881.000		
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				5.318.881.000		
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	5.318.881.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					1.063.886.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Lokasi	2	1.063.886.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.26.02.1.02.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				619.299.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan	Lokasi	2	619.299.000		
		3.26.02.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				444.587.000		
						Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan	Orang	50	444.587.000		
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					303.907.000		
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	110	303.907.000		
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				111.978.000		
						Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	1	111.978.000		
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				191.929.000		
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	200	191.929.000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						4.810.816.000		
						Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	54069703	4.810.816.000		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					4.810.816.000		
						Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	450000	4.220.969.000		
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				349.619.000		
						Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	349.619.000		
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3.871.350.000		
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	3.871.350.000		
						Tujuan Pasar Wisata Potensial	Lokasi	3	589.847.000		
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				589.847.000		
						Hasil Pelaksanaan Penyediaan deta dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	589.847.000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						2.147.320.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33.87	2.147.320.000		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					1.678.547.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	831	1.678.547.000		
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				307.026.000		
						Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	3	307.026.000		
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				648.265.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	400	648.265.000		
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				723.256.000		
						SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	180	723.256.000		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					468.773.000		
						Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	240	468.773.000		
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				92.483.000		
						Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	0	92.483.000		
		3.26.05.1.02.0003			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				376.290.000		
						SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	80	376.290.000		
Meningkatkan Pembangunan Pemuda									12.326.093.000		
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	58.25			
	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda								4.259.835.000		
						Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11.5	4.259.835.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						4.259.835.000		
						Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	10	4.259.835.000		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					4.259.835.000		
						Jumlah wirausaha muda	Orang	100	2.284.065.000		
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				2.284.065.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1485	2.284.065.000		
						Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	Lokasi	100	836.715.000		
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				484.101.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	500	484.101.000		
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				352.614.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	200	352.614.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	4	1.139.055.000		
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				1.139.055.000		
						Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300	1.139.055.000		
	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda								8.066.258.000		
						Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	38.75	8.066.258.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						8.066.258.000		
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	75	8.066.258.000		
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					8.066.258.000		
						Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	250	8.066.258.000		
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda				116.258.000		
						Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	100	116.258.000		
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				7.950.000.000		
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	2	7.950.000.000		
JUMLAH									353.139.046.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									31.123.795.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73.58		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								31.035.061.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	31.035.061.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						31.035.061.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	31.035.061.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.360.622.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	26.360.622.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.124.564.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	145	26.124.564.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				236.058.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	236.058.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91.708.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	91.708.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89.508.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	89.508.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2.200.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					22.694.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	22.694.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.460.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	2.460.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.234.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	5.234.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					560.230.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	560.230.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.825.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	29.825.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.692.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	34.692.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.888.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.888.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				131.615.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	131.615.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.355.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.355.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.070.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	6.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				38.193.000		
						jumlah paket bahan/material	Paket	1	38.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				73.980.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	73.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	147.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.800.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	7.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.212.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	71.212.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					249.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	249.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				249.200.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12	249.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.243.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.243.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.049.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.049.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	56.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.134.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.134.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					507.007.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	83	507.007.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.786.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	104.786.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				314.406.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	314.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.815.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	62.815.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								88.734.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.03	88.734.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						88.734.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	88.734.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					88.734.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	88.734.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				69.062.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	69.062.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.672.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	19.672.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan									401.883.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	96.17		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi								401.883.000		
						Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai	97.19	401.883.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						366.751.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	42.1	104.910.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					57.422.000		
						Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	23	57.422.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				57.422.000		
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	57.422.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					47.488.000		
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	85.36	47.488.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				47.488.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	41	47.488.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
						Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	130.228.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					12.435.000		
						Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	1500	12.435.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.02.1.01.0004			Penyusutan Arsip Dinamis				12.435.000		
						Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Arsip	1750	12.435.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					117.793.000		
						Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	13000	117.793.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis				117.793.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	22.235.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	48.553.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	11500	47.005.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	79	131.613.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					131.613.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	1000	35.848.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				35.848.000		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	1 petak /tahun	3250	35.848.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	95.765.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				95.765.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	4	95.765.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						35.132.000		
						Persentase arsip yang diselamatkan	%	65.92	22.430.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					15.152.000		
						Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	500	15.152.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				15.152.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	600	15.152.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					7.278.000		
						Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	272000	7.278.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				7.278.000		
						Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	12000	7.278.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
						Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	20	12.702.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					12.702.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	8	12.702.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.03.1.01.0001			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				12.702.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	Arsip	10000	12.702.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
Meningkatkan Literasi Masyarakat									2.370.818.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15.45		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat								2.370.818.000		
						Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	75.1	2.370.818.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						2.238.809.000		
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	85.1	1.816.756.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
									658.365.000		
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	10	129.113.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0007			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				65.413.000		
						Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jenis	5	65.413.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				63.700.000		
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	Unit	1	63.700.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	3	529.252.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				529.252.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eks	5942	529.252.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					1.158.391.000		
						Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	20	736.770.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				736.770.000		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Unit	1	736.770.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	2657000	421.621.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0002			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				421.621.000		
						Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Unit	7	421.621.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	88.89	98.703.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					98.703.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	8	40.112.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26.094.000		
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Unit	3	26.094.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				14.018.000		
						Jumlah data dan informasi perpustakaan	Dokumen	1	14.018.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	20	58.591.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				11.538.000		
						Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Unit	5	11.538.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				47.053.000		
						Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Orang	25	47.053.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
						Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	61.54	323.350.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					323.350.000		
						Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	3	323.350.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				280.804.000		
						Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidkn khusus	Lokasi	13	280.804.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				25.496.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Orang	12	25.496.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				17.050.000		
						Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	17.050.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						132.009.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	92.25	132.009.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					44.872.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Unit	194	44.872.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				10.045.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eks	3000	10.045.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				34.827.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Unit	6	34.827.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					21.334.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	21.334.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				15.314.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	Dokumen	4500	15.314.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				6.020.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	6.020.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					22.937.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	Eks	32	22.937.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.03.0002			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				22.937.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eks	5	22.937.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					42.866.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Eks	534	42.866.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				29.571.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	160	29.571.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				13.295.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	160	13.295.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
JUMLAH									33.896.496.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									3.466.138.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108.05		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)								1.593.133.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	17.3	1.593.133.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.593.133.000		
						Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160800	720.510.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					78.600.000		
						Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	78.600.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				75.600.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/ Kota	35	75.600.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				3.000.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi penjinan	Orang	30	3.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					638.910.000		
						Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	2	227.734.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				227.734.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilanny	Orang	70	227.734.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pokdahsar yang Meningkat Usahanya	Unit	0	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				130.000.000		
						Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	0	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	35	281.176.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				281.176.000		
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	900	193.250.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	30	87.926.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3.000.000		
						Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Dokumen	1	3.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03.0001			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	3.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	872.623.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					872.623.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Sertifikat	425	756.679.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				756.679.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	482.129.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memada	Paket	2	140.550.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	134.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Sertifikat	100	32.817.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				32.817.000		
						Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	32.817.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	1	83.127.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				83.127.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	66.917.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Dokumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi	Dokumen	2	9.450.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	6.760.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan								1.626.900.000		
						Nilai Tukar Nelayan	Angka	105.5	1.626.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.626.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108.54	1.626.900.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					1.610.100.000		
						Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	15025	1.610.100.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				1.610.100.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	1	3.750.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	15000	1.602.825.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	25	3.525.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					16.800.000		
						Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Orang	60	16.800.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				16.800.000		
						Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	16.800.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								246.105.000		
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110.5	246.105.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						246.105.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111.55	246.105.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					246.105.000		
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	60	246.105.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				246.105.000		
						Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	1	8.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
						Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	40	237.545.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan									2.829.798.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0.79		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif								2.829.798.000		
						Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	63	2.829.798.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1.265.322.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	268.692.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					268.692.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	134.960.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				134.960.000		
						Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	134.960.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRRL	Orang	4	133.732.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				133.732.000		
						Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	95.685.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	4	38.047.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	324.560.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					312.475.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	27.954.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				27.954.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	7.380.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	5.114.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	15.460.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Ha	2.2	284.521.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				284.521.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	284.521.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					12.085.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	12.085.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				12.085.000		
						Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha	%	100	12.085.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2.93	259.599.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					251.145.000		
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	251.145.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				251.145.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	251.145.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					8.454.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	8.454.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				8.454.000		
						Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha	%	100	8.454.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7.8	412.471.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					397.723.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	93.816.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				93.816.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	1	57.747.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	24.943.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	11.126.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	303.907.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				303.907.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	201.190.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	4	102.717.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					14.748.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	14.748.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				14.748.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	14.748.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						204.250.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	204.250.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					204.250.000		
						Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	204.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				204.250.000		
						Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	30	204.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.360.226.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	89.807.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					89.807.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	7	89.807.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				89.807.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	89.807.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	135.782.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					135.782.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	10	135.782.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				135.782.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	135.782.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	124.920.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					124.920.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	8	124.920.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				124.920.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	10	124.920.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	419.272.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					364.797.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	26.240.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0004			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				26.240.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	1	26.240.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	43.056.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				17.061.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	17.061.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				22.320.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	22.320.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan				3.675.000		

					sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	3.675.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	295.501.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				56.568.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	56.568.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				223.012.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	223.012.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				15.921.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	15.921.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					54.475.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	90	24.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				13.550.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	13.550.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.075.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	7.075.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				4.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	4.275.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	29.575.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				5.745.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	5.745.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				10.515.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	10.515.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				13.315.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	13.315.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	252.695.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					232.247.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	232.247.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				5.195.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	5.195.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				221.857.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	221.857.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				5.195.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	5.195.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.448.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	20.448.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.910.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	7.910.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.343.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	7.343.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				5.195.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	5.195.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	132.461.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					55.113.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	55.113.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	12	2.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				1.910.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	1.910.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				51.203.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	10	51.203.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					77.348.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	77.348.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6.910.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	12	6.910.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				50.757.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	10	50.757.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				19.681.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	12	19.681.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	205.289.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					69.571.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	69.571.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				18.456.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	18.456.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.569.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	24	2.569.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				48.546.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	48.546.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					135.718.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	135.718.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				48.344.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengankewenangannya	Orang	18	48.344.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				43.680.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengankewenangannya	Orang	18	43.680.000	SEKSI PENGAWASAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				43.694.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	43.694.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									52.023.690.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								51.582.171.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	51.582.171.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						51.582.171.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	195.459.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.054.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	44.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.670.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.864.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	23.864.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.520.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	65.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.252.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	63.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.053.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	86.053.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.204.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	21.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.849.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	115.747.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	46.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	43.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.907.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	51.907.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.407.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	31.407.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	91.350.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	31.500.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	30.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	42.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	13.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	3.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	241.930.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.810.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.405.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.320.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	202.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.320.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		2.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.800.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1		23.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.800.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		170.150.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.500.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.300.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1		107.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.300.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		107.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.350.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1		52.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.250.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1		7.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	106.937.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.822.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	22.822.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.165.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.165.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.165.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	13.165.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.492.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.492.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.970.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	36.970.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.570.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.570.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	35.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.145.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	47.145.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.403.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.403.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.033.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.033.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.709.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.709.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	56.587.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.186.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	6.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				320.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.286.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.580.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.061.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	16.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.921.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.140.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	48.247.676.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.734.937.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	44.734.937.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.744.061.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	287	43.744.061.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				919.376.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	919.376.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	71.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					95.524.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	95.524.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.524.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	6.524.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				14.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					627.276.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	627.276.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.621.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.621.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74.758.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	74.758.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.402.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	9.402.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				81.172.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	81.172.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.810.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	46.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				336.712.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	336.712.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				801.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	801.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				52.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	52.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					886.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	886.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				686.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	686.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.390.998.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.390.998.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.418.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				385.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	385.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.001.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.001.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					412.941.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	412.941.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				132.410.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	132.410.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.531.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	160.531.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	69.655.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					13.933.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	13.933.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.123.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.810.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				31.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.022.000		
						Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Unit	1	21.022.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.022.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.022.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	118.825.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Kildanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.140.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	48.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.140.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	48.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	47.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.585.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	22.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.485.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.600.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	366.447.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.506.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.686.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.820.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	27.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	211.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	208.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.761.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	113.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.343.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	34.343.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.418.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	22.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	76.140.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.126.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	14.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.925.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.740.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.461.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.364.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	27.364.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.749.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.928.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.687.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	123.966.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					23.210.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	23.210.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.235.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.235.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	14.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.475.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.475.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.356.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	41.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.356.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	59.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	7.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	178.637.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					52.661.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	52.661.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.770.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.754.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	31.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.137.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	72.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.336.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	53.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.134.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	19.134.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.202.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	577.431.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					23.608.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	23.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.608.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					458.202.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	458.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.202.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				455.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	455.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.621.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	95.621.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.405.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.216.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	49.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	165.582.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.601.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.601.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.601.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.601.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.181.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.181.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.675.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.675.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.506.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.506.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	506.322.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.535.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	29.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.285.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	53.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					247.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	247.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				247.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	247.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.127.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	166.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				76.127.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	76.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	173.330.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					37.036.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	37.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.281.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.800.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.955.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.562.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	61.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.562.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	59.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.732.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	74.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.225.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	21.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.781.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	29.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.726.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								441.519.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.6	441.519.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						441.519.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	441.519.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					441.519.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	441.519.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				207.820.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	207.820.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				233.699.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	233.699.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan									54.436.131.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam								397.970.000		
						Produksi garam	Ton	134640	397.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						397.970.000		
						Persentase produksi garam	%	2	397.970.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					397.970.000		
						Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	15.533.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.000 1			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				15.533.000		
						Jumlah petambak garam yang difasilitasi dan dibina	Orang	100	15.533.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	7.347.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.000 1			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				7.347.000		
						Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	25	7.347.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	375.090.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.000 1			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				375.090.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	1	196.681.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	10	178.409.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan								54.038.161.000		
						Produksi perikanan	Ton	952718	54.038.161.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						41.052.410.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72.72	521.729.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					521.729.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	78.868.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				78.868.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	100	28.176.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	70	5.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	26.612.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	4.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				4.350.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	80	4.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	1.415.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.415.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	1.415.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	86.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				86.400.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	3	86.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	350.696.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				350.696.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	350.696.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	808.052.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					808.052.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	356.226.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				356.226.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2800	319.056.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	14.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	8.094.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	320	14.276.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	80.825.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				80.825.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2000	80.825.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	43	67.986.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				67.986.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	67.986.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	68	300.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				300.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	300.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	3.015.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				3.015.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	40000	3.015.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72.27	578.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					578.056.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	20.967.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				20.967.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	2.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	13.124.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	3.483.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	15.074.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				15.074.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40	3.271.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	11.803.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				30.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	123.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.215.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	123.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	120.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	120.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	70	268.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				268.800.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	10	268.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kildanglor	%	100	660.411.000		
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					660.411.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	37.204.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				37.204.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	4000	3.207.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1000	19.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	13.397.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	120	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	2.946.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				2.946.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1200	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	3	1.446.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	10	125.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				125.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	125.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	25.025.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				25.025.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	25.025.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	10	27.236.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				27.236.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3500	27.236.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplilannya	%	10	443.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				443.000.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	443.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	469.688.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					469.688.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	36.505.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				36.505.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	120	8.722.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.464.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	5.319.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	6.698.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.698.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	120	5.706.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	41	992.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	45	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				115.500.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	9	2.405.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.405.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	2.405.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	32	288.580.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				288.580.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	7	288.580.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	471.721.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					471.721.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	117.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				117.600.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	36	2.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	118	35.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	80.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	10.016.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				10.016.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	6.728.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	3.288.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	17.576.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				17.576.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	17.576.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	54	318.616.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				318.616.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	318.616.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.575.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	90	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	3.338.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				3.338.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	3.338.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	949.417.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					949.417.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	52.087.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				52.087.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	9.167.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	55	6.090.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.625.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	6.205.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	332.070.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				332.070.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	4.500.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	327.570.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57	5.115.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				5.115.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	5.115.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	66	301.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				301.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	301.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	20	5.705.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				5.705.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	5.705.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	14	253.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				253.440.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	5	253.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	1.167.056.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.167.056.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	57.632.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				57.632.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	5500	7.640.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	5500	4.886.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	23.226.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	21.880.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	83.610.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				83.610.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	6500	32.400.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	75	51.210.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57.14	50.350.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				50.350.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	50.350.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	100	214.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				214.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	214.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	35	57.992.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				57.992.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	20000	57.992.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	7.4	703.472.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				703.472.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	703.472.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71.72	452.860.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					452.860.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	103.070.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				103.070.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	50	11.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	5	59.257.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	15.244.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	17.369.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	28.230.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				28.230.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2000	18.230.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	52.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				52.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	52.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				15.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	7	24.428.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.428.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKU/Asuransi	Orang	60	24.428.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplannya	%	25	229.632.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				229.632.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilannya	Orang	1	229.632.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	1.223.079.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.223.079.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	819.452.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				819.452.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3000	751.740.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	800	12.530.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	48.277.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	6.905.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	28.031.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				28.031.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1300	5.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	23.031.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	33	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	70	333.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				333.853.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	333.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	3.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				3.500.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKU/Asuransi	Orang	10000	3.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplannya	%	30	31.043.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				31.043.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	31.043.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81.82	687.968.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					687.968.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	9.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				9.860.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	1050	1.950.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	85	1.838.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	1.272.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	4.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan	Jenis	4	317.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				317.200.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	170	4.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70	313.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	28	5.484.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				5.484.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	5.484.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	42	353.624.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				353.624.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	353.624.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	16.22	500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				500.000		
						Jumlah Nelayan yang diindungi PKL/Asuransi	Orang	40	500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	25	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.300.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	33.062.373.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					32.103.182.000		
						Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Dokumen	4	32.048.122.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				32.048.122.000		
						Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	2	10.130.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhannya	Lokasi	1	32.037.992.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	343717.5	55.060.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				55.060.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	55.060.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					959.191.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	280	99.475.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				99.475.000		
						Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	59.200.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	40.275.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0.25	859.716.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				540.000.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	8	540.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				319.716.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	15	294.716.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						12.985.751.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	721.420.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Laut					721.420.000		
						Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	343.406.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.0006			Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				343.406.000		
						Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupaten/Kota	35	21.341.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	35	320.065.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Orang	350	2.000.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	373.014.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				373.014.000		
						Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	186.500.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	400	92.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	94.514.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	29	5.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				5.000.000		
						Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	5.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	10.653.158.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					612.965.000		
						Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	16.405.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				16.405.000		
						Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	5	16.405.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	596.560.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				250.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung	Unit	1	250.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				346.560.000		
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	1575	346.560.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					10.040.193.000		
						Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	10.040.193.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.040.193.000		
						Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	200000	38.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	4.452.394.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi/Dibangun	Kg	10500	2.395.061.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	31500000	416.562.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5250	2.738.176.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi perikanan budidaya	Ton	609000	1.611.173.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					161.173.000		
						Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	127	161.173.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.0002			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				87.093.000		
						Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	Unit	3	67.098.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	5	16.115.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	3.880.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				74.080.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Ko	35	74.080.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.450.000.000		
						Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	1.450.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.450.000.000		
						Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	15	1.450.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									112.755.757.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kesejahteraan peternak									513.664.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100.8		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak								513.664.000		
						Persentase nilai tambah produk hasil ternak	%	5	513.664.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						271.935.000		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	12	271.935.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					271.935.000		
						Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	Unit	2	271.935.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.0019			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				271.935.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Kelompok	3	143.140.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan	Kelompok	1	19.950.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran	Kelompok	1	78.761.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran	Orang	10	30.084.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						241.729.000		
						Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	3.5	241.729.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					241.729.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Buah	15	241.729.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				241.729.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	40	99.704.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	6	142.025.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									51.221.181.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								50.465.404.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	50.465.404.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.465.404.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.253.593.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					136.450.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	136.450.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.280.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.280.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.600.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.600.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.680.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1.680.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				68.900.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	68.900.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.380.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.380.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.135.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	8.135.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.975.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	26.975.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	500.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					216.610.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	216.610.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				119.110.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	119.110.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	35.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	62.500.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	306.700.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	230.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	75.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.200.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					593.833.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	593.833.000	Balai veteriner semarang	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	11.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	40.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				515.833.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	515.833.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.237.015.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					497.602.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	497.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	64.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				195.257.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	195.257.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				66.880.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	66.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.253.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	21.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124.212.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	124.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					888.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	888.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000			
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				288.000.000			
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	288.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.400.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	329.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				329.400.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	329.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.522.013.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.522.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.013.000			
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	51.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.000.000			
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.335.000.000			
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.335.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000			
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	675.058.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
										139.427.000		
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	139.427.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.250.000			
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.250.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.500.000			
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	11.500.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.800.000			
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1.800.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.402.000			
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	32.402.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.924.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.924.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.183.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	14.183.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.936.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.936.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				432.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	432.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					411.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	411.440.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	640.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				310.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	310.000.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	100.800.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.191.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	124.191.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.921.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	9.921.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.169.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	12.169.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				73.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	73.000.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.500.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.601.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.601.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.915.316.000	Balai inseminasi Buatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					271.346.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	271.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.844.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.844.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				144.905.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	144.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.965.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.265.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	17.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.367.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	97.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					196.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	196.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	193.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.447.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.447.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.950.000		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	41.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.420.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	155.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.250.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	43.384.422.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.419.133.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	31.419.133.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				31.128.200.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	205	31.128.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				261.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	261.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.195.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	14.195.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15.738.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	15.738.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; ACEH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					178.740.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	178.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				70.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				8.740.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	8.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					73.734.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	73.734.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				73.734.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	73.734.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					374.427.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	374.427.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.106.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.614.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	78.614.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.246.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	27.246.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				78.736.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	78.736.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	21.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.175.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	35.175.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	112.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.550.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					169.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	169.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				154.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	154.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.726.328.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.726.328.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				630.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.141.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	67.141.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.029.187.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	9.029.187.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.428.060.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.428.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				360.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	360.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.124.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.124.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				178.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	178.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				136.936.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	136.936.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				333.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	333.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				314.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	314.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								755.777.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.27	755.777.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						755.777.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	755.777.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					755.777.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	755.777.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				219.332.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	219.332.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				536.445.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	536.445.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan									86.367.621.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3.1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Tercapainya Produksi Daging								75.185.768.000		
						Produksi daging	Kg	899513420	75.185.768.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						36.406.816.000		
						Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	13.981.003.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					13.981.003.000		
						Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	13.981.003.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				13.981.003.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	3	64.453.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	13.916.550.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3745066	15.336.880.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					2.098.739.000		
						Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	6	2.005.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				2.005.000.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	6	2.005.000.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	93.739.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				93.739.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	54.044.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong	Orang	20	39.695.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					13.238.141.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produhnya sesuai standar kualitas pakan	Unit	1	11.365.311.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					11.365.311.000		
						Jumlah sasaran yang menguti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong	Orang	40	7.800.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong	Unit	1	11.357.511.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	1.872.830.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.872.830.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	657.925.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong	Orang	20	74.905.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong	Unit	4	1.140.000.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	167.569.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					167.569.000		
						Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan	Ekor	10000	167.569.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					167.569.000		
						Jumlah obat hewan yang di fasilitasi	Unit	10000	167.569.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	4.147.997.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					4.147.997.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	1.381.028.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.381.028.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia potong	Ekor	20414	1.381.028.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	2.766.969.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.766.969.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB	Ekor	61	608.000.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	144	2.158.969.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	2.773.367.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.773.367.000		
						Jumlah Produksi semen segar	Angka	27000	1.351.721.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.351.721.000		
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	27	1.351.721.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi	%	80	1.421.646.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.421.646.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	432000	1.421.646.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						110.617.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	12	110.617.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					110.617.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong	Kelompok	3	4.617.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4.617.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	1	4.617.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong	Unit	2	11.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				11.500.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong	Orang	60	11.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong	Kelompok	2	94.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				94.500.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong	Unit	2	94.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						29.966.529.000		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	26.280.079.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					26.280.079.000		
						Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS)	Laporan	4	26.280.079.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				26.280.079.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	26.182.185.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak/hewan yang teravaksinasi	Ekor	14000	97.894.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	1.485.733.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.485.733.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	1.127.873.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1.127.873.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	sampel	26400	1.127.873.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	188.800.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				188.800.000		
						Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan	Ekor	1750000	188.800.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	169.060.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				169.060.000		
						Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan	Ekor	13950	169.060.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	1.272.962.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.272.962.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	708.425.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				708.425.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	sampel	25750	708.425.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	132.851.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				132.851.000		
						Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara	Ekor	1750000	132.851.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	431.686.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				431.686.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara	Ekor	14750	431.686.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	7	927.755.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					927.755.000		
						Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif	Unit	6	927.755.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				927.755.000		
						Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif	Unit	6	927.755.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.701.806.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1.08	8.701.806.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					8.701.806.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk	Kelompok	3	8.701.806.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				8.701.806.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong	Kelompok	4	8.613.725.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong	Orang	250	88.081.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Tercapainya Produksi Susu								1.245.048.000		
						Produksi susu	Kg	77166302	1.245.048.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.072.453.000		
						Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	113440	379.422.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					103.025.000		
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	103.025.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				103.025.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	65.710.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah	Orang	20	37.315.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					276.397.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	1	64.582.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				64.582.000		
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah	Orang	40	5.100.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah	Unit	1	59.482.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	211.815.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				211.815.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	145.335.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah	Orang	20	66.480.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	693.031.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					693.031.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu	%	1	693.031.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				693.031.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB	Ekor	3	81.296.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	10	611.735.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						113.365.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	12	113.365.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					113.365.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah	Kelompok	2	113.365.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				113.365.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah	Unit	2	113.365.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						59.230.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3.62	59.230.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					59.230.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk	Unit	1	59.230.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				59.230.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah	Kelompok	4	29.380.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah	Orang	180	29.850.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Tercapainya Produksi Telur								9.936.805.000		
						Produksi telur	Kg	916430165	9.936.805.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.644.747.000		
						Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	247848	22.405.000	Bidang Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					22.405.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produhnya sesuai standar kualitas pakan	Unit	1	22.405.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				22.405.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur	Unit	1	22.405.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	2.622.342.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.622.342.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur	%	1	2.622.342.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.622.342.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	27060	2.622.342.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.727.290.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	12	4.727.290.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					4.727.290.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur	Kelompok	2	4.727.290.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4.727.290.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur	Unit	2	4.727.290.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						2.564.768.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2.29	2.564.768.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					2.564.768.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk	Kelompok	1	2.564.768.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				2.564.768.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur	Kelompok	4	2.541.850.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur	Orang	120	22.918.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									138.102.466.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah									172.338.247.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0.16		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura								8.167.904.000		
						Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	2.5	2.494.607.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.494.607.000		
						Produksi bawang merah	Ton	527875	2.494.607.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.494.607.000		
						Jumlah Luas Panen Bawang Merah	Ha	52776	2.494.607.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.494.607.000		
						Jumlah Luas Tanam Bawang Merah	Ha	55	2.494.607.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Persentase peningkatan produksi cabe	%	1.5	4.572.814.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.572.814.000		
						Produksi cabai	Ton	346115	4.572.814.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.572.814.000		
						Jumlah Luas Panen Cabai	Ha	44364	4.572.814.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				4.572.814.000		
						Jumlah Luas Tanam Cabai	Ha	300	4.572.814.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Persentase peningkatan produksi durian	%	2.5	513.962.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						513.962.000		
						Produksi durian	Ton	153410	513.962.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					513.962.000		
						Jumlah Luas Panen Alpukat	Ha	15	378.312.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				378.312.000		
						Jumlah Luas Tanam Alpukat	Ha	20	378.312.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Jumlah Luas Panen Durian	Ha	28	135.650.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				135.650.000		
						Jumlah Luas Tanam Durian	Ha	10	135.650.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Persentase peningkatan produksi jahe	%	3	93.560.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						93.560.000		
						Produksi jahe	Ton	35908	93.560.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					93.560.000		
						Jumlah Luas Panen Jahe	Ha	1647	93.560.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				93.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Luas Tanam Jahe	Ha	1	58.560.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Jumlah Luas Tanam Kencur	Ha	1	35.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Persentase peningkatan produksi melati	%	2	492.961.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						492.961.000		
						Produksi melati	Ton	25120	492.961.000	Bidang Horikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					492.961.000		
						Jumlah Luas Panen Melati	Ha	2	492.961.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				492.961.000		
						Jumlah Luas Tanam Melati	Ha	3	492.961.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan								124.614.049.000		
						Persentase peningkatan produksi jagung	%	0.2	1.733.687.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.733.687.000		
						Produksi jagung	Ton	3287481	1.733.687.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.733.687.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung)	Ha	413000	1.733.687.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.733.687.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya	Ha	700	1.733.687.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
						Persentase peningkatan produksi kedelai	%	0.2	509.847.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						509.847.000		
						Produksi kedelai	Ton	52762	509.847.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					509.847.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai)	Ha	31303	509.847.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				509.847.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih kedelai	Ha	200	509.847.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
						Persentase peningkatan produksi padi	%	0.2	122.370.515.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						56.402.682.000		
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	23.977.757.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					23.977.757.000		
						Jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	1133	23.977.757.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				23.977.757.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan	Kelompok	150	23.977.757.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
						Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	9.913.740.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					9.913.740.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan	Komoditi	6	542.113.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				542.113.000		
						Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar	Kabupaten/Kota	35	542.113.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	105	9.371.627.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				9.371.627.000		
						Angka persentase susut hasil padi	%	10.15	68.836.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Unit	136	9.302.791.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	2.483.472.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.483.472.000		
						Jumlah produksi benih Buah	Batang	20000	767.715.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				767.715.000		
						Jumlah Produksi benih Tanaman Buah	Batang	20000	767.715.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Kedelai	Ton	0.8	18.717.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				18.717.000		
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	0.8	18.717.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Kentang	Ton	8	365.350.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				365.350.000		
						Jumlah Produksi benih Sayur	Ton	8	365.350.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Padi	Ton	126	1.187.780.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.187.780.000		
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	126	1.187.780.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Planlet	Batang	22000	143.910.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				143.910.000		
						Jumlah Produksi Planlet benih	Batang	22000	143.910.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	2.345.284.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.345.284.000		
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	12000	147.276.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				147.276.000		
						Jumlah pengembangan Tanaman Hias	Batang	12000	147.276.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	2.5	78.345.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				78.345.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah	Ha	0.5	78.345.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	151.2	1.108.145.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.108.145.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi	Ha	36	1.108.145.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	0.5	7.700.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				7.700.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija	Ha	0.5	7.700.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih tanaman buah	Batang	1000	1.003.818.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.003.818.000		
						Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah	Batang	1000	1.003.818.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	2.559.818.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.559.818.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	1000	774.086.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				774.086.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	1000	774.086.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	150	1.760.732.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.760.732.000		
						Luas perbanyakan benih padi	Ha	47	1.760.732.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.000.000		
						Luas perbanyakan benih sayuran	Ha	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	641.540.000		
									641.540.000		
						Pengawasan peredaran benih perkebunan	Bulan	12	21.270.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				21.270.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12	21.270.000		
						Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan	Bulan	12	196.427.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				196.427.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12	196.427.000		
						Pengujian laboratorium hortikultura	Lembar	122	6.250.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				6.250.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	122	6.250.000		
						Pengujian laboratorium tanaman pangan	Lembar	1075	27.583.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				27.583.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	1075	27.583.000		
						Sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	650000	96.448.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				96.448.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Batang	650000	96.448.000		
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	600	69.643.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				69.643.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12	54.231.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	740	15.412.000		
						Sertifikasi benih padi	Ha	5454	201.396.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				201.396.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	5454	201.396.000		
						Sertifikasi benih palawija	Ha	390	10.253.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				10.253.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	310	10.253.000		
						Sertifikasi benih tanaman perkebunan	Batang	848720	12.270.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				12.270.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	848720	12.270.000		
						Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	270.950.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					270.950.000		
						jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Unit	250	270.950.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				270.950.000		
						Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan	Orang	250	270.950.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2.5	1.024.882.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.024.882.000		
						luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani	Ha	5100	1.024.882.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.024.882.000		
						Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi	Ha	5100	1.024.882.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2.5	302.547.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					302.547.000		
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	25	302.547.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				302.547.000		
						jumlah benih mendukung optimasi lahan	Kg	700	10.500.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan	Ton	45	292.047.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	93	10.284.357.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					10.284.357.000		
						jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi	Kabupaten/Kota	35	10.284.357.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				10.284.357.000		
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk	Orang	450	10.284.357.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Produksi padi	Ton	9287932	2.598.335.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.598.335.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi)	Ha	1649721	2.598.335.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.598.335.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Padi	Ha	5100	2.598.335.000	SEKSI PADI	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						52.366.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	52.366.950.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Penataan Prasarana Pertanian					52.366.950.000		
						Persentase Jaringan irigasi alternatif	%	5	16.228.070.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				16.228.070.000		
						Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit)	Unit	70	16.228.070.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	1.88	36.138.880.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				36.138.880.000		
						jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	m	14175	36.138.880.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						4.503.760.000		
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	10	387.931.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					387.931.000		
						Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan iklim (DPI) yang bisa ditangani	%	10	387.931.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				387.931.000		
						Luasan lahan Dampak Perubahan iklim (DPI) yang tertangani	Ha	40	387.931.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	4.115.829.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					4.115.829.000		
						Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman	%	15	4.115.829.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				4.115.829.000		
						Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Liter	285	22.408.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe)	Ha	20	99.198.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai)	Ha	300	429.748.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi)	Ha	20	3.564.475.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						9.097.123.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	4.960.316.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					292.220.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	292.220.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.0004			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				292.220.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	250	292.220.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					4.159.530.000		
						Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	%	0.2	4.159.530.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				4.159.530.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran	Kelompok	60	315.915.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	127	3.843.615.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					508.566.000		
						Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	%	60	508.566.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				508.566.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	6	508.566.000	SEKSI BINA USAHA	
						Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	4.136.807.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					4.136.807.000		
						Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Orang	4676	4.136.807.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2.582.401.000		
						Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian	Orang	3476	2.582.401.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.554.406.000		
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian	Orang	1200	1.554.406.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan								39.556.294.000		
						Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0.3	2.759.249.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.759.249.000		
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1.403.493.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.403.493.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar	%	1	748.305.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				748.305.000		
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	29500	176.368.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	50000	571.937.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim	%	1	420.285.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				420.285.000		
						Produksi tanaman semusim	Ton	1050	420.285.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan	%	1	234.903.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				234.903.000		
						Produksi tanaman tahunan	Butir	40000	234.903.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi kelapa	Ton	154100	1.355.756.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.355.756.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa	Ha	70	1.355.756.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.355.756.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	7350	1.355.756.000		
						Persentase peningkatan produksi kopi	%	0.3	1.925.266.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.925.266.000		
						Produksi kopi	Ton	26005	1.925.266.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.925.266.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi	Ha	68	1.925.266.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.925.266.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	63500	1.708.266.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	45800	217.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Persentase peningkatan produksi tebu	%	0.3	34.871.779.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						34.871.779.000		
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	2.117.080.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.117.080.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur	%	1	1.488.190.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.488.190.000		
						Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam	Batang	40000	1.488.190.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur	%	3	456.453.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				456.453.000		
						Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam	Batang	45000	456.453.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur	%	1	172.437.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				172.437.000		
						Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam	Batang	2500	172.437.000	SEKSI BENIH	
						Produksi tebu	Ton	3670565	32.754.699.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					32.754.699.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu	Ha	203	32.754.699.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				32.754.699.000		
						Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	2920600	27.202.826.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	4050000	5.094.038.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	59000	457.835.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Petani									41.862.000		
						NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	105.17			
	Meningkatnya NTP Hortikultura								14.043.000		
						NTP Hortikultura	Angka	108.49	14.043.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						14.043.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1.5	14.043.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					14.043.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2	14.043.000		
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.043.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2	14.043.000		
	Meningkatnya NTP Perkebunan								14.251.000		
						NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100.97	14.251.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						14.251.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1.5	14.251.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					14.251.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	7	14.251.000		
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.251.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	7	14.251.000		
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan								13.568.000		
						NTP Tanaman Pangan	Angka	105.57	13.568.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						13.568.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1.5	13.568.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					13.568.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2	13.568.000		
		3.27.02.1.01.000 1			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				13.568.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2	13.568.000		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									102.997.104.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	100		Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								102.452.588.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	102.452.588.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						102.452.588.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	701.900.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.719.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.202.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitas Kunjungan Tamu				6.013.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	6.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					85.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					251.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	251.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					253.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	253.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.025.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	27.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.405.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.470.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	45.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	729.650.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.036.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	48.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.302.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.302.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.528.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	10.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					258.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				258.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.614.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	403.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				348.614.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	348.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	92.719.717.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.927.228.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	81.927.228.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				79.862.027.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	618	79.862.027.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.065.201.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.065.201.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					106.804.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	106.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				105.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.804.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	2	1.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					65.621.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	65.621.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				53.317.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	53.317.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.304.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40	12.304.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					732.390.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	732.390.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.705.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	49.705.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.315.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	32.315.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.844.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	70.844.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				487.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	487.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.532.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	1.532.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				975.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	3	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				475.300.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	21	475.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				82.600.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	82.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.446.594.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	6.446.594.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.506.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	8.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				965.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	965.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.751.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	59.751.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.413.337.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	5.413.337.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.908.180.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	1.908.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				444.157.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	444.157.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				32.026.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	32.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.094.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	112.094.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				738.923.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	738.923.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.980.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	400.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.308.490.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.384.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	86.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.608.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.540.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	43.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.506.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.230.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	11.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					403.287.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	403.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				403.287.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	403.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.533.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	169.533.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				723.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	156.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.810.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	12.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					649.286.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	649.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.594.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	35.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.192.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	34.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				574.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	574.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	805.520.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					27.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				27.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.692.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	85.692.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.692.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.692.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.597.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.597.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.537.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.537.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.008.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	4.008.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.858.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	65.858.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.147.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	232.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.137.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		4.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1		216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.010.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		12.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					460.681.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10		460.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				130.060.000		
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1		130.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				265.000.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.621.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		65.621.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		2.373.615.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					42.000.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				42.000.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.180.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		69.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.521.000		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		11.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.159.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1		45.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.300.250.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		1.300.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.300.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1.300.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	181.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	179.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					780.785.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	780.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.932.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	42.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				717.153.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	717.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.175.172.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					326.013.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	326.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				278.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	278.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.013.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					217.248.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	217.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	205.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.608.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	9.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					628.911.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	628.911.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.405.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	21.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.601.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.405.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	41.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				543.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	543.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.638.524.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.024.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	83.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.810.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.783.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.008.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.423.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	1	10.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					558.219.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	558.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				558.219.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	558.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					251.568.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	251.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.568.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.740.713.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.740.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.216.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	49.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.272.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	42.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.880.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	190.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.458.345.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.458.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								544.516.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.85	544.516.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						544.516.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	544.516.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					544.516.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	544.516.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				325.923.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	325.923.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				218.593.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	218.593.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									275.377.213.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketahanan energi									4.439.535.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi					Indeks Ketahanan Energi	Angka	4.6		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
									1.997.903.000		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21.32	1.997.903.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						1.997.903.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	83109.33	607.097.000		
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					607.097.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah	%	28.8	607.097.000		
		3.29.05.1.10.000 2			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				607.097.000		
						Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah	Dokumen	1	422.123.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	904	184.974.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	19.32	47.268.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					47.268.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	8	47.268.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.000 7			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				47.268.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	2	47.268.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	64.39	128.115.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					128.115.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	40	128.115.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.000 7			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				128.115.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	2	128.115.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	64.39	131.454.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					131.454.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Orang	40	131.454.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				131.454.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi	Unit	2	131.454.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	32.19	91.109.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					91.109.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak	Orang	24	91.109.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				91.109.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	2	91.109.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	64.39	129.274.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					129.274.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	40	129.274.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				129.274.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	2	129.274.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	32.19	91.233.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					91.233.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	24	91.233.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				91.233.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	2	91.233.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	41306.77	144.453.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					144.453.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	300	144.453.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				144.453.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	2	144.453.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	64.39	130.407.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					130.407.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu	Orang	40	130.407.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				130.407.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	2	130.407.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	41316.43	174.576.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					174.576.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	304	174.576.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				174.576.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	3	174.576.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	64.39	131.228.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					131.228.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	40	131.228.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				131.228.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	2	131.228.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	32.19	86.941.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					86.941.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Orang	24	86.941.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				86.941.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo	Unit	2	86.941.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	48.29	104.748.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					104.748.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	Orang	20	104.748.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				104.748.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	5	104.748.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat								2.441.632.000		
						Tingkat konsumsi tenaga listrik	KWh/Kapita	826.11	2.441.632.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						2.441.632.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	65.04	699.797.000		
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					699.797.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	32.6	699.797.000		
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				699.797.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah	Laporan	24	699.797.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51.27	109.559.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					15.779.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	%	100	15.779.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				15.779.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	30	15.779.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					15.907.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	5.16	15.907.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				15.907.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	30	15.907.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					77.873.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.39	77.873.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.080.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1	2.080.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				75.793.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	50	75.793.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49.74	159.115.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					7.935.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	%	100	7.935.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				7.935.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	15	7.935.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					10.825.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	2.08	10.825.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				10.825.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	20	10.825.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					140.355.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.39	140.355.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				137.235.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	100	137.235.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49.72	167.181.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					16.172.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi	%	100	16.172.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				16.172.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi	Dokumen	30	16.172.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					10.683.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	2.04	10.683.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				10.683.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	20	10.683.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					140.326.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.39	140.326.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.536.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi	Dokumen	1	1.536.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				138.790.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi	RT/KK	100	138.790.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	52.13	121.786.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					27.493.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	%	100	27.493.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				27.493.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak	Dokumen	51	27.493.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					15.676.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	6.86	15.676.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				15.676.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	30	15.676.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					78.617.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak	%	97.39	78.617.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.040.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1	2.040.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				76.577.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	50	76.577.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49.42	160.254.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					9.900.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	%	100	9.900.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				9.900.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	18	9.900.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					16.577.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	1.45	16.577.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				16.577.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	10	16.577.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					133.777.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.39	133.777.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				130.657.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	100	130.657.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49.12	152.429.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					6.479.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	%	100	6.479.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				6.479.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	12	6.479.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					5.498.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	0.85	5.498.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				5.498.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	12	5.498.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					140.452.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.4	140.452.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.543.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	1.543.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				138.909.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	100	138.909.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	50.08	167.320.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					13.365.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	%	100	13.365.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				13.365.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara	Dokumen	24	13.365.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					13.589.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	2.78	13.589.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				13.589.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	25	13.589.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					140.366.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.39	140.366.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.540.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	1.540.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				138.826.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	100	138.826.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49.64	101.078.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					13.200.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	%	100	13.200.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				13.200.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	24	13.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					9.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	1.89	9.900.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9.900.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	18	9.900.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					77.978.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu	%	97.39	77.978.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.040.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1	1.040.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				76.938.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	50	76.938.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49.66	172.915.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					19.363.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	%	100	19.363.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				19.363.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	36	19.363.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					19.942.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	1.93	19.942.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				19.942.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	37	19.942.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					133.610.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.39	133.610.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				130.490.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	100	130.490.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	50.05	162.596.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					9.900.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	%	100	9.900.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				9.900.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara	Dokumen	18	9.900.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					12.650.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	2.71	12.650.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				12.650.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	23	12.650.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					140.046.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.39	140.046.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				4.410.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1	4.410.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				135.636.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	100	135.636.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49.77	168.387.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					17.427.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo	%	100	17.427.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				17.427.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo	Dokumen	24	17.427.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					14.925.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	2.15	14.925.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14.925.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo	Laporan	23	14.925.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					136.035.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.39	136.035.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.530.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo	Dokumen	1	1.530.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				134.505.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo	RT/KK	100	134.505.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	50.05	99.215.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					16.320.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	16.320.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				16.320.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	13	16.320.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					5.440.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2.71	5.440.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				5.440.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	7	5.440.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					77.455.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	97.39	77.455.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.040.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1	1.040.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				76.415.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	50	76.415.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB									1.492.688.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								1.492.688.000		
						Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	57	1.492.688.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						1.492.688.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	125.338.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					125.338.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	125.338.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0006			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut				125.338.000		
						Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah	Laporan	240	125.338.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	45	688.787.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					565.333.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	60	565.333.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				565.333.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah	Laporan	5	565.333.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					123.454.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	10	123.454.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				123.454.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam	Laporan	1	123.454.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	45	51.761.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					51.761.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	60	51.761.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				9.789.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	8	9.789.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				41.972.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	20	41.972.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	45	66.987.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					66.987.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	60	66.987.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				14.474.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	17	14.474.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				52.513.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	36	52.513.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	45	90.287.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					90.287.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	60	90.287.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				19.340.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Dokumen	25	19.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut				70.947.000		

					sampai dengan 12 Mil Laut						
					Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Laporan	35		70.947.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	45		56.032.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					56.032.000		
					Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	60		56.032.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				16.430.000		
					Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	20		16.430.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				39.602.000		
					Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Laporan	25		39.602.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	45		47.351.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					47.351.000		
					Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	60		47.351.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin				9.989.000		

					Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	5		9.989.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					37.362.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	20		37.362.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	45		42.559.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						42.559.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	60		42.559.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					8.608.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	5		8.608.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					33.951.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	12		33.951.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	45		47.323.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						47.323.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	60		47.323.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					10.799.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	10		10.799.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					36.524.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Laporan	18		36.524.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	45		48.836.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						48.836.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	%	60		48.836.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					11.928.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	10		11.928.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				36.908.000		
					Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	15		36.908.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	45		69.546.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					69.546.000		
					Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	60		69.546.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				11.915.000		
					Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	21		11.915.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				57.631.000		
					Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	42		57.631.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	45		63.986.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					63.986.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	60	63.986.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				16.309.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	20	16.309.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				47.677.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Laporan	35	47.677.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	45	57.775.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					57.775.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	60	57.775.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				19.155.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Dokumen	9	19.155.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				38.620.000		

					Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Laporan	18		38.620.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	45		36.120.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						36.120.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60		36.120.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					7.709.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	8		7.709.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					28.411.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	10		28.411.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										48.413.096.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									47.813.713.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90.5		47.813.713.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							47.813.713.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		575.284.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					93.357.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	93.357.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.810.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.741.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	18.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.937.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	16.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	12	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.258.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	45.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	358.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.140.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				266.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	266.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.507.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	50.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.818.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	16.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.284.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	17.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	622.407.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.289.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.289.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.990.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.810.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.875.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	13.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				610.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					445.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	445.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	345.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.838.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	39.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.061.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	31.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.777.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.777.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	580.349.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.413.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	76.413.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.802.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	5.802.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.152.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	6.152.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.716.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	22.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.720.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.967.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	32.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.160.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.160.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					396.651.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	396.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				324.691.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	324.691.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.345.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	44.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.240.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	645.169.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.489.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	68.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.894.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.296.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	7.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.727.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.727.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.695.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.675.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	34.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					455.547.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	455.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	96.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				357.207.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	357.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.353.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	55.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.608.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	17.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.305.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.440.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	527.298.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.580.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	64.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.810.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.972.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	17.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				243.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	243.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.944.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	33.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.469.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	347.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	73.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				272.368.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	272.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.469.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	57.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.393.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	17.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.810.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	32.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.266.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	598.246.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.712.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	73.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.610.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	5.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.246.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	5.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.009.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	12.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				60.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	60.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.176.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	43.176.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	424.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.654.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	42.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.687.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	17.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.562.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	553.929.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.184.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	84.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.395.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.595.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	6.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.365.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.315.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	17.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				240.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	46.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.612.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	361.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.781.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	53.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				306.431.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	306.431.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.353.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	50.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.304.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.202.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.847.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	21.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	605.772.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.640.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	81.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.150.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.215.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	7.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.366.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	13.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.400.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.609.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	43.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.018.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	424.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.062.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	79.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				343.355.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	343.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.334.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	42.334.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.384.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	14.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.950.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	7.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	614.399.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.096.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	62.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.644.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	5.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.304.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	12.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.537.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	16.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.650.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.412.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	436.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	93.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				341.311.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	341.311.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.461.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	41.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.854.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.202.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.073.662.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.426.481.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	36.426.481.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.955.100.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	194	35.955.100.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				355.740.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	355.740.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				38.781.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	38.781.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	12	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				56.860.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	56.860.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					153.260.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	153.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				144.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	144.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.760.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	8.760.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.642.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	64.642.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.902.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	40.902.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				23.740.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	36	23.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					441.749.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	441.749.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.418.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	22.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.752.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	59.752.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.940.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	16.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.160.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	56.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.210.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.210.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.049.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	32.049.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.180.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	149.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.750.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	0	2.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				83.290.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	83.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16.327.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	16.327.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.327.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	16.327.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.517.918.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.517.918.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				640.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	640.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	13.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.862.168.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.862.168.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.285.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	65	453.285.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.202.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	30.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.555.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	97.555.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.031.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32	82.031.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				181.079.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	181.079.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.418.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	62.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	593.629.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.054.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	68.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.910.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.563.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.563.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.404.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	11.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				480.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.545.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.652.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	34.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					411.146.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	411.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				860.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				320.286.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	320.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.649.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	56.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.649.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	562.988.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					66.607.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	66.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.810.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.804.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.804.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.732.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	12.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.405.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					396.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	396.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				309.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	309.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.161.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	42.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.111.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	14.111.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.850.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	19.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	492.603.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.287.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	75.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.790.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	4.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.803.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	6.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.194.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	13.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.623.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.623.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.271.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	43.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.750.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					310.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.548.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	65.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				242.851.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	242.851.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.786.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	42.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.964.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	17.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.417.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	767.978.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.253.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	36.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.874.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	5.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.450.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.925.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	21.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.792.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	256.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.292.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	255.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					409.153.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	409.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.408.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	400.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								599.383.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	599.383.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						599.383.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	599.383.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					599.383.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	599.383.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				404.753.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	404.753.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				194.630.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	194.630.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan									1.390.473.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah					Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	351		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.63	1.390.473.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						1.390.473.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	407.064.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					407.064.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	407.064.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				407.064.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah	Dokumen	1320	407.064.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27.6	455.355.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					347.990.000		
						Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	347.990.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				347.990.000		
						Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah	Dokumen	2	347.990.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					107.365.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	107.365.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				107.365.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah	Laporan	4	107.365.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.5	82.699.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					82.699.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	82.699.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				82.699.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	20	82.699.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.5	78.909.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					78.909.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	78.909.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				78.909.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	21	78.909.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.9	24.995.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					24.995.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	24.995.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				24.995.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	15	24.995.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	3	47.886.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					47.886.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	30.450.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				30.450.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	33	30.450.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	17.436.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				17.436.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	23	17.436.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2.3	18.011.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					18.011.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	18.011.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				18.011.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	13	18.011.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.7	19.013.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					19.013.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	19.013.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				19.013.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	13	19.013.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.9	114.837.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					114.837.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	92.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				92.340.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	40	92.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100	22.497.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				22.497.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	23	22.497.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1.7	19.933.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					19.933.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu	%	100	19.933.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				19.933.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	15	19.933.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.8	23.789.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					23.789.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	23.789.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				23.789.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	20	23.789.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4.2	53.322.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					53.322.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	34.061.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				34.061.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	39	34.061.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	19.261.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				19.261.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	30	19.261.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1.7	22.447.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					22.447.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	22.447.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				22.447.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo	Laporan	19	22.447.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.9	22.213.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					22.213.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	22.213.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				22.213.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	20	22.213.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
JUMLAH									55.735.792.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									48.898.688.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								48.388.916.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.2	48.388.916.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.388.916.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.295.166.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					61.690.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	61.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				61.690.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	61.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.384.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	272.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.030.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.390.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				146.940.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	146.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.024.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	12.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	568.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	380.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					257.892.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	257.892.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.782.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	32.782.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				92.410.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	92.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.082.728.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.588.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.588.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.461.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	16.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.418.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	22.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.604.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	31.604.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.700.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					698.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	698.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	181.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				516.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	516.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.720.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	78	174.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.506.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	20.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.161.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	45	66.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.681.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	60.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.421.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.451.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	13.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.349.399.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.880.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.580.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	153.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.608.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.090.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.418.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.529.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	34.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.031.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	14.031.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.900.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	48	58.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.314.897.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.314.897.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.729.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.729.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				373.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	373.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				939.468.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	939.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					793.042.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	793.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.216.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	49.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				220.912.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	220.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				493.980.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	493.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.202.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	13	12.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.732.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	16.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.631.376.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
									93.480.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				93.480.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					148.021.000		
						Persentase tayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar tayanan	%	100	148.021.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	26.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	11	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.820.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	46.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.175.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	14.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.198.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	1.198.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				325.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				873.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	873.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.475.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	185.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.975.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	69.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.462.741.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.120.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				78.120.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					413.066.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	413.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.616.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	8.616.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.100.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				301.820.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	301.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.005.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	7.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				12.025.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	2	12.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					781.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	781.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				267.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	267.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				514.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	514.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.655.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	181.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.405.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.450.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	16.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	80	40.567.506.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.629.533.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	31.629.533.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.860.600.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	200	30.860.600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				712.630.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	712.630.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				56.303.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	56.303.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					118.116.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	118.116.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.116.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	18.116.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					25.058.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0	25.058.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				14.850.000		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	2	14.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.208.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.709.603.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	2	1.709.603.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				21.888.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	21.888.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.905.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	43.905.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.643.810.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	1.643.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					766.944.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	766.944.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74.758.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	74.758.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				57.648.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	57.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.250.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	108.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				36.718.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	36.718.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.505.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.640.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	78.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.751.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	8.751.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.648.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	15.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					454.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	12	454.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				13.900.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	13.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				405.200.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	405.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.141.446.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	4.141.446.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.675.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.466.446.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2.466.446.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.722.706.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	57	1.722.706.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				242.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	242.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.023.900.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.023.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				271.406.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	271.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								509.772.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.1	509.772.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						509.772.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80	509.772.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					509.772.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	509.772.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				297.304.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	297.304.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				212.468.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8	212.468.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan									14.620.007.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3.5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB								14.620.007.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	3.9	14.620.007.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						14.235.468.000		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.39	1.467.312.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.467.312.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	30	1.467.312.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				620.812.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	620.812.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				846.500.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di BIKDK	Dokumen	1	846.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	OPD Provinsi
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	6.67	1.894.212.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.894.212.000		
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	160	1.894.212.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.894.212.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	1.894.212.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
						Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2.5	4.437.214.000	Bidang Industri Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.437.214.000		
						Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitas	Orang	22	4.171.367.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.908.047.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	1.908.047.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.263.320.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2.263.320.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih	Orang	40	265.847.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				265.847.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	265.847.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2.5	4.045.065.000	Bidang Industri Non Agro	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.045.065.000		
						Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	112	3.863.966.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2.913.966.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	2.913.966.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				950.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	950.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih	Orang	40	181.099.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				181.099.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	181.099.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	2.391.665.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.391.665.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki	Orang	500	2.391.665.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.391.665.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	2.391.665.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						218.061.000		
						Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	9	205.659.000	Bidang Industri Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					205.659.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	1	205.659.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				205.659.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	1	205.659.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	5	12.402.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					12.402.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	47	12.402.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				12.402.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	1	12.402.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						166.478.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	9.935.000	Bidang Industri Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					9.935.000		
						Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS	Unit	25	9.935.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				9.935.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	9.935.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	6.95	156.543.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					156.543.000		
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	200	156.543.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				15.982.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	15.982.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				140.561.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIIInas	Dokumen	1	140.561.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)									32.387.954.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.59		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak								32.387.954.000		
						Inflasi pangan bergejolak	%	4	32.387.954.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						32.387.954.000		
						Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	9	32.387.954.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					33.812.000		
						Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya	Komoditi	5	33.812.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.01.000 1			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				33.812.000		
						Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor	Laporan	2	33.812.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					32.354.142.000		
						Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya	Unit	12	420.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.000 1			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				420.000		
						Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	420.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	12	32.353.722.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.000 2			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				32.353.722.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi	Laporan	5	32.353.722.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)									8.336.943.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.59		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB								8.336.943.000		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	4.83	8.336.943.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						493.755.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8.6	346.679.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					346.679.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	4.6	346.679.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				346.679.000		
						Jumlah dokumen penerbitan SKA	Dokumen	105000	346.679.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	130.953.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					130.953.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Unit	2	130.953.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				130.953.000		
						Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Dokumen	2	130.953.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	10	16.123.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					16.123.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi	Orang	5	16.123.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.02.1.03.0003			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				16.123.000		
						Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Laporan	1	16.123.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						159.476.000		
						Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	15	159.476.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					159.476.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih	Orang	25	159.476.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0002			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				159.476.000		
						Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	159.476.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1.000.000		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	0	1.000.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					1.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi	Orang	0	1.000.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi				1.000.000		
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	0	1.000.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						581.343.000		
						Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	4.05	581.343.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					581.343.000		
						Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	2	94.819.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
		3.30.05.1.01.0004			Peningkatan Citra Produk Ekspor				94.819.000		
						Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Komoditi	4	94.819.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor	Orang	1430	40.500.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal				40.500.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Orang	30	40.500.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	1	446.024.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0001			Pameran Dagang Internasional/Nasional				411.699.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Orang	4	411.699.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0003			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				34.325.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Orang	50	34.325.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						2.245.897.000		
						Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1.05	762.059.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					415.362.000		
						Jumlah Laporan Aduan Masyarakat	Laporan	3	133.981.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				133.981.000		
						Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Dokumen	3	133.981.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi	Orang	150	281.381.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				281.381.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Kelompok	1	281.381.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					184.751.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Standarisasi Industri	Orang	31	184.751.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				184.751.000		
						Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan	Sertifikat	1	184.751.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					161.946.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang)	Unit	30	161.946.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				161.946.000		
						Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	1	161.946.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	1.57	434.876.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					434.876.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	2167	434.876.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				51.250.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	2017	51.250.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				383.626.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	150	383.626.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	0.1	1.048.962.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1.048.962.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	2400	1.048.962.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				153.445.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	980	153.445.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				170.901.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	1400	170.901.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				724.616.000		
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	20	724.616.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						4.855.472.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	15	4.855.472.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					317.397.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Orang	2	317.397.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				317.397.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Unit	1	317.397.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					4.523.075.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Dokumen	1	4.523.075.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				4.523.075.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	Kelompok	3	4.523.075.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					15.000.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	50	15.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0005			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				15.000.000		
						Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat	Laporan	1	15.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
JUMLAH									104.243.592.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.071.900.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								2.071.900.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.071.900.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						2.071.900.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	312.748.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					312.748.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	162.719.000		
		4.01.06.1.02.000 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				162.719.000		
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	162.719.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	150.029.000		
		4.01.06.1.02.000 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				150.029.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	150.029.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	330.555.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					330.555.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	165.469.000		
		4.01.06.1.02.000 2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				165.469.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	165.469.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	165.086.000		
		4.01.06.1.02.000 2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				165.086.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	165.086.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	1.428.597.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.428.597.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	99.972.000		
		4.01.06.1.02.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				99.972.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	99.972.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	123.639.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				123.639.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	123.639.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	1.204.986.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.204.986.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2	1.064.270.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	140.716.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									441.074.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								441.074.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	441.074.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						441.074.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	441.074.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					441.074.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	441.074.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				401.074.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	307.040.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	94.034.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.512.974.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.810.651.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								2.810.651.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	2.810.651.000		
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.810.651.000		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	100	1.250.599.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					1.250.599.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	1.250.599.000		
		4.01.05.1.02.000 1			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.250.599.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	12	373.419.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	340	877.180.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	100	229.541.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					229.541.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	229.541.000		
		4.01.05.1.02.000 2			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				229.541.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/ Kota	35	112.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	12	117.541.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100	788.346.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					788.346.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	374.261.000		
		4.01.05.1.01.000 3			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				374.261.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	224.642.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	149.619.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	51.844.000		
		4.01.05.1.01.000 2			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				51.844.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	51.844.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	362.241.000		
		4.01.05.1.01.000 1			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				362.241.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	142.684.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	219.557.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	100	542.165.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					542.165.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	542.165.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				542.165.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	115	176.102.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	120	202.863.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	120	163.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									424.518.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								424.518.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	424.518.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						424.518.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	424.518.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					326.480.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	326.480.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				326.480.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Orang	900	326.480.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					98.038.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	98.038.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.946.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	87.946.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.092.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	10.092.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									3.235.169.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									1.715.689.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								1.715.689.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	1.715.689.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.715.689.000		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98.8	358.078.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					358.078.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	128.896.000		
		4.01.08.1.01.000 1			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				128.896.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	128.896.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	229.182.000		
		4.01.08.1.01.000 1			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				229.182.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	229.182.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95.5	244.467.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					244.467.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	244.467.000		
		4.01.08.1.01.000 2			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				244.467.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	4	244.467.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	86	448.842.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					448.842.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	136.753.000		
		4.01.08.1.02.000 1			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				136.753.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	136.753.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	92	312.089.000		
		4.01.08.1.02.000 2			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				312.089.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	312.089.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	592.231.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					592.231.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	134.779.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				134.779.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	134.779.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	307.616.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				307.616.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	307.616.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	149.836.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				149.836.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	149.836.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	72.071.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					72.071.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	72.071.000		
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				72.071.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	72.071.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									558.700.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								394.150.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	394.150.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						394.150.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	394.150.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					394.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	394.150.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				318.821.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	318.821.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.329.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	75.329.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								164.550.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	164.550.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						164.550.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	164.550.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					164.550.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	164.550.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				99.004.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	4	99.004.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.546.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	6	65.546.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.274.389.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.163.360.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								2.163.360.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.163.360.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						2.163.360.000		
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	252.192.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					252.192.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	252.192.000		
		4.01.06.1.03.000 2			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				252.192.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	252.192.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	678.682.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					678.682.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	575.679.000		
		4.01.06.1.03.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				575.679.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	575.679.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	103.003.000		
		4.01.06.1.03.000 3			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				103.003.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	103.003.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	35.950.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					35.950.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	17.540.000		
		4.01.06.1.03.000 4			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				17.540.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	17.540.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	18.410.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDanEvaluasiKebijakan				18.410.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	18.410.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	300.770.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					300.770.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	144.773.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				144.773.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	144.773.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	155.997.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				155.997.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	155.997.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	895.766.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					895.766.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	407.265.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				407.265.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	407.265.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	488.501.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				488.501.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	488.501.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									162.384.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								162.384.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	162.384.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						162.384.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	162.384.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.384.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	162.384.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.191.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	142.191.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.193.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	20.193.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.325.744.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									413.371.924.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								413.371.924.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	413.371.924.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						413.371.924.000		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	83	365.719.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					365.719.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	110.994.000		
		4.01.04.1.02.000 2			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				110.994.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	110.994.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	104.180.000		
		4.01.04.1.02.000 1			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				104.180.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	104.180.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	150.545.000		
		4.01.04.1.02.000 3			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				150.545.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	150.545.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84	457.259.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					457.259.000		
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	107.473.000		
		4.01.04.1.03.000 1			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				107.473.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	107.473.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	242.430.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				242.430.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8	242.430.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	107.356.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				107.356.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	107.356.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60	412.548.946.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					412.548.946.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	408.012.167.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				408.012.167.000		
						Jumlah fasilitas pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	800	408.012.167.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	4.536.779.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				4.536.779.000		
						Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	2.120.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8	2.416.029.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									385.655.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								385.655.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	385.655.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						385.655.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	385.655.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					385.655.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	385.655.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				337.055.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	337.055.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				48.600.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	48.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									413.757.579.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									1.936.969.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								1.936.969.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	1.936.969.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.936.969.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48.57	59.333.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					59.333.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	59.333.000		
		4.01.02.1.02.000 1			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				59.333.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	59.333.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88.57	107.348.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					107.348.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	107.348.000		
		4.01.02.1.01.000 2			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				107.348.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	107.348.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69.05	132.740.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					132.740.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	132.740.000		
		4.01.02.1.02.000 2			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				132.740.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	132.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	161.405.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					161.405.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	161.405.000		
		4.01.02.1.02.000 4			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				161.405.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	8	161.405.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	121.551.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					121.551.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	121.551.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				121.551.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	121.551.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36.59	137.412.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					137.412.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	137.412.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				137.412.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	137.412.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70	1.047.483.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1.047.483.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	1	1.047.483.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				1.047.483.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	3	1.011.645.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	1	35.838.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91.01	169.697.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					169.697.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	169.697.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				169.697.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	6	169.697.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									554.386.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								554.386.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	554.386.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						554.386.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	554.386.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.503.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	100.503.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				59.765.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	59.765.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.738.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	40.738.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					453.883.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	453.883.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				413.622.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	273.176.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	140.446.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.261.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	10.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.491.355.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									256.919.743.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								256.919.743.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	256.919.743.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						256.919.743.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	8.536.652.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.952.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	38.952.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				38.952.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	38.952.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	21.700.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					710.000.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	710.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				660.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	410.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					7.766.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	7.766.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				3.896.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	3.896.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				2.070.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	2.070.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.800.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	1.800.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	28.602.179.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					113.125.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	113.125.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				13.125.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	13.125.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					25.451.984.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	25.451.984.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				373.166.000		
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	373.166.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				21.498.850.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	21.498.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.579.968.000		
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	3.579.968.000		
				Fasilitasi Keprotokolan					3.037.070.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	3.037.070.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.617.008.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	2.617.008.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				370.062.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	370.062.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				50.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	219.780.912.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99.862.359.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	99.862.359.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.829.615.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	97.829.615.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.640.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.640.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				92.744.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	92.744.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					889.757.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	889.757.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				592.679.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	592.679.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				297.078.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	297.078.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					13.134.725.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	13.134.725.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				408.107.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	408.107.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				806.337.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	806.337.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				452.229.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	452.229.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.088.816.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	9.088.816.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.029.236.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.029.236.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37.732.234.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	37.732.234.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.500.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	1.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.232.234.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	36.232.234.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.488.908.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	28.488.908.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	7.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.232.763.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	1.232.763.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.756.145.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	18.982.093.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	198.552.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	575.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.482.544.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	13.482.544.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.448.107.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	2.448.107.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				87.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	87.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.366.226.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	1.366.226.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.981.404.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	8.981.404.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				349.307.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	349.307.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.170.385.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.170.385.000		
		X-XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2.743.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X-XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				23.427.291.000		
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	23.427.291.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									256.919.743.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									3.246.217.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								3.246.217.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	3.246.217.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.246.217.000		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	698.403.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					698.403.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	698.403.000		
		4.01.03.1.01.000 1			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				431.051.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	431.051.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.000 2			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				143.071.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	Dokumen	4	143.071.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.000			Fasilitasi Penataan Wilayah				124.281.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	124.281.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.040.001.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.040.001.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	139.228.000		
		4.01.03.1.02.000 2			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				139.228.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	139.228.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	464.007.000		
		4.01.03.1.02.000 1			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				464.007.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	464.007.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	436.766.000		
		4.01.03.1.02.000 3			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				436.766.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	436.766.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.507.813.000		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.507.813.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	1.131.875.000		
		4.01.03.1.03.000 1			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				1.131.875.000		
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	10	374.817.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	6	757.058.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	142.746.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				142.746.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	4	76.954.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	65.792.000		OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	233.192.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				233.192.000		
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	78.093.000		OPD Provinsi
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	67.648.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	87.451.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									711.956.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								711.956.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	711.956.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	711.956.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					711.956.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	711.956.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				675.230.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	429.655.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	245.575.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36.726.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	13.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	23.726.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									3.958.173.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									1.761.081.000		
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil					Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
									1.761.081.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	1.761.081.000		
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.761.081.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	801.986.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					801.986.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	801.986.000		
		4.01.07.1.01.000 1			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				220.056.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	132.017.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	88.039.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.000 2			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				443.046.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	365.029.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	78.017.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.000 3			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				138.884.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	138.884.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	485.247.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					485.247.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	485.247.000		
		4.01.07.1.03.000 1			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				105.276.000		
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	105.276.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.000 2			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				110.216.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	110.216.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.000 3			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				269.755.000		
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	269.755.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	473.848.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					473.848.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	473.848.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				130.282.000		
						Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	130.282.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				299.083.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	299.083.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				44.483.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	44.483.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									135.353.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								135.353.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	135.353.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						135.353.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	135.353.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					135.353.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	135.353.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111.913.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	111.913.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.440.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	23.440.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									1.896.434.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									237.239.989.000	Sekretariat DPRD	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								60.347.775.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	60.347.775.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						60.347.775.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	60.347.775.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.275.674.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.275.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.275.674.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.275.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					544.232.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	544.232.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				124.448.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	124.448.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				419.784.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100	419.784.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.023.546.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.023.546.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				279.083.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	279.083.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				187.269.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	187.269.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				324.084.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	324.084.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.326.040.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.326.040.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				690.130.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	690.130.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				216.940.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	216.940.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.463.225.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	148	20.463.225.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.639.680.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	6	14.639.680.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.163.948.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	10	2.163.948.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				449.206.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	4	449.206.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				685.788.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	45	685.788.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.524.603.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	108	2.524.603.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.906.712.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	22.906.712.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				129.807.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	129.807.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.439.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	3.439.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				976.538.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	976.538.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.361.367.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	18.361.367.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.166.385.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	160	10.166.385.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				546.253.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	546.253.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.833.442.000		
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	72	2.833.442.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				36.815.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	36.815.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.964.050.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	3.964.050.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.785.825.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	63	2.785.825.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.968.001.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.968.001.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.401.880.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	4	1.401.880.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								176.892.214.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	176.892.214.000	Sekretariat DPRD	
									176.892.214.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	176.892.214.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					817.739.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	817.739.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				566.015.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	566.015.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				251.724.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	251.724.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.968.070.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	19.968.070.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.959.622.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	111	18.959.622.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.008.448.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	1.008.448.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					156.106.405.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	156.106.405.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				156.106.405.000		
						Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	120	156.106.405.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									345.746.422.000	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	91		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia								244.768.029.000		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	76	244.768.029.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						244.768.029.000		
						Persentase layanan bagian humas	%	95	244.768.029.000	Bagian Humas	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					115.755.914.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	115.755.914.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.04.0004			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2.173.208.000		
						jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	42	2.173.208.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0005			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				454.190.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	454.190.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0006			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12.042.361.000		
						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Dokumen	6	12.042.361.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0007			Penyusunan Program Kerja DPRD				101.086.155.000		
						Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	7	101.086.155.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					129.012.115.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama	Dokumen	12	129.012.115.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.07.0002			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				129.012.115.000		
						jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	12	129.012.115.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik								100.978.393.000		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	76	100.978.393.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						100.978.393.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	100.978.393.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					6.042.442.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA	Dokumen	23	6.042.442.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.01.0001			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6.042.442.000		
						jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	Dokumen	23	6.042.442.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.910.534.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	2	1.910.534.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.02.000			Pembahasan APBD				1.910.534.000		
						jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	2	1.910.534.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					11.573.528.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	11.573.528.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.834.052.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	1.834.052.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.662.625.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	1.662.625.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.664.860.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	1.664.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.920.319.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	1.920.319.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1.745.982.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	1.745.982.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.149.830.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	1.149.830.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				1.595.860.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	25	1.595.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Peningkatan Kapasitas DPRD					3.592.781.000		
						Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	6	3.592.781.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				3.592.781.000		
						Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	3.592.781.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					51.543.046.000		
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	51.543.046.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
						Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	10.761.502.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		
						Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	175.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				40.606.544.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	40.606.544.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					552.860.000		
						Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	21	552.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				552.860.000		
						Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	21	552.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Tugas DPRD					25.763.202.000		
						Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	33	25.763.202.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				25.763.202.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	33	25.763.202.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									582.986.411.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									32.872.919.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72.5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								32.468.965.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84.25	32.468.965.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						32.468.965.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	32.468.965.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.510.109.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	21.510.109.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.986.738.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	119	20.986.738.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				319.680.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	319.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				138.814.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	138.814.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				42.009.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	42.009.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				22.868.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	22.868.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					220.837.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	220.837.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				187.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	187.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				33.837.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	33.837.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					274.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	274.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				88.791.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	88.791.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				82.026.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	45	82.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				103.983.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	125	103.983.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.919.719.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.919.719.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.837.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	44.837.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.256.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	112.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.654.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	42.654.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.096.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	61.096.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.756.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	99.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				27.673.000		
						Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	27.673.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	34.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45.856.000		
						Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	45.856.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				951.291.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	951.291.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				150.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	10	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				950.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	24	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.857.764.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	3.857.764.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.422.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	14.422.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.003.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.003.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.840.342.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.840.342.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.385.736.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1475	3.385.736.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				574.959.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	46	574.959.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				19.216.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	425	19.216.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				185.134.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	440	185.134.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				255.272.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	215	255.272.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				34.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.825.892.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.825.892.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				205.067.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	125	205.067.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				286.196.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv	Unit	92	286.196.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								403.954.000		
						Indeks Manajemen Risiko	%	2.92	403.954.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						403.954.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	403.954.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					403.954.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	403.954.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				261.731.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	261.731.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				142.223.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	142.223.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas									10.285.989.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan								2.492.528.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	2.492.528.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.348.187.000		
						Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	1.348.187.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.348.187.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi	Dokumen	4	1.348.187.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				402.734.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	402.734.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				945.453.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi	Dokumen	105	945.453.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.144.341.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	295.130.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					295.130.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	1	75.508.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				75.508.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan	OPD	3	75.508.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Laporan	1	72.740.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				72.740.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	OPD	1	72.740.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH	Laporan	1	146.882.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				146.882.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH	OPD	3	146.882.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	251.018.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					251.018.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes	Laporan	1	61.283.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				61.283.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes	OPD	13	61.283.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos	Laporan	1	53.876.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				53.876.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial	OPD	11	53.876.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS	Laporan	1	135.859.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				135.859.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual	OPD	5	135.859.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	598.193.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					598.193.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker	Laporan	1	263.899.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				263.899.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	OPD	6	263.899.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI	Laporan	1	148.347.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				148.347.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	OPD	3	148.347.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan movev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut	Laporan	1	185.947.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				185.947.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut	OPD	4	185.947.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan								7.793.461.000		
						Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	7.793.461.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						3.953.810.000		
						Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	3.953.810.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					3.483.524.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi	Dokumen	3	3.483.524.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				3.483.524.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	3	3.483.524.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					470.286.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	470.286.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				351.256.000		
						Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	351.256.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				119.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	Buku	1	119.030.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.839.651.000		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	1.200.826.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.200.826.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Dokumen	1	349.259.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				349.259.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	4	349.259.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Dokumen	1	412.198.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				412.198.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	Laporan	4	412.198.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH	Dokumen	1	439.369.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				439.369.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH	Laporan	4	439.369.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	1.520.760.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.520.760.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos	Dokumen	1	542.267.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				542.267.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	542.267.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes	Dokumen	1	650.571.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				650.571.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes	Laporan	4	650.571.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS	Dokumen	1	327.922.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				327.922.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual	Laporan	4	327.922.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	1.118.065.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.118.065.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker	Dokumen	1	200.352.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				200.352.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	Laporan	4	200.352.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI	Dokumen	1	667.728.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				667.728.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	Laporan	4	667.728.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut	Dokumen	1	249.985.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				249.985.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut	Laporan	4	249.985.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									43.158.908.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									225.743.618.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								225.368.861.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	225.368.861.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225.368.861.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	95	167.436.499.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					137.672.447.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	137.672.447.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				136.927.111.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	605	136.927.111.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				634.767.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	634.767.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.569.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	110.569.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					372.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				372.400.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					334.144.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	334.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				284.144.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	284.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.744.549.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	7.744.549.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.067.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	85.067.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				341.623.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	341.623.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.031.807.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.031.807.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				39.821.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	39.821.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				490.314.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	490.314.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				719.917.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	719.917.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.842.128.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.842.128.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.890.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	3.890.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.952.128.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1.952.128.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.463.499.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	13.463.499.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	6.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.117.240.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.117.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.306.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	9.306.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.033.239.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	2.033.239.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.007.332.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.007.332.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				526.070.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	526.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				745.120.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	745.120.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				65.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				671.142.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	671.142.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	95	1.385.799.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				32.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.800.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					201.664.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	100	201.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.125.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.796.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				86.042.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	86.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.214.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.417.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	56.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					824.986.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	824.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	148.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.601.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.585.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	670.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					317.349.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	317.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.787.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	140.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.541.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	31.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.621.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	87.621.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	95	1.977.558.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.887.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	44.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.887.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	44.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	16.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.100.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	16.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					237.236.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas	%	100	237.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.310.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				114.976.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	114.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	7.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.298.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	1.298.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.280.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.925.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	230.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.036.070.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.036.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.060.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	381.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.540.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	17.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.036.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	140.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.454.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	31.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.030.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	127.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	%	95	1.425.963.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.950.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	34.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.950.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	34.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.089.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang	%	100	160.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.439.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	15.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.119.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	23.119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.852.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	10.852.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				580.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				47.169.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	47.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.310.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	15.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.620.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	47.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					901.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	901.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	183.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				717.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	717.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.524.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	315.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				54.956.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	54.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.823.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	146.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	30.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	%	95	1.683.620.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.759.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora	%	100	169.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.686.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	10.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.407.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	35.407.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.409.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	7.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				552.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				53.732.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora	Paket	1	53.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.025.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	11.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.948.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	50.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.160.761.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Laporan	4	1.160.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	204.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.280.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	3.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				951.261.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	951.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora	Unit	1	300.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.904.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	17.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.116.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	110.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.505.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	38.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.325.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	95.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	20.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95	1.410.417.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.900.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	42.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.900.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					164.396.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali	%	100	164.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.325.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	24.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.070.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				51.571.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	51.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.675.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	9.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.005.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	57.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					892.870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Laporan	4	892.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	154.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				736.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	736.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					310.251.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1	310.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.035.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				182.504.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	182.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.460.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.477.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.935.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	45.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.840.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	19.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	95	2.123.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					218.560.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes	%	100	218.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.882.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	2.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.838.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	25.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	8.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				87.751.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	87.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.660.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	10.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.609.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	81.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.553.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.553.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.921.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				381.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	381.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.169.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.169.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.434.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	299.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.330.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	17.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.005.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	44.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.589.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	71.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.110.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	34.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	95	2.012.965.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				14.600.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					222.697.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap	%	100	222.697.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.794.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.436.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.436.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				90.857.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	90.857.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.226.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	10.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.179.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	71.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.302.760.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	1.302.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				296.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	296.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	2.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.002.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.002.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.708.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	430.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.952.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	37.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.056.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	217.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.450.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	41.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	87.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	%	95	1.359.330.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					181.663.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak	%	100	181.663.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	5.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.890.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	40.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.160.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	11.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				60.928.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	60.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.110.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	8.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.011.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	53.011.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					814.965.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	814.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	162.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.015.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	650.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.502.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	315.502.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.599.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	23.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.771.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	142.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.606.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	34.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.026.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	82.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	95	1.436.160.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					212.309.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan	%	100	212.309.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.183.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	8.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.702.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	41.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				510.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				55.815.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	55.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.340.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	23.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73.459.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	73.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					903.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	903.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	231.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	670.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.551.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	272.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.993.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	18.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	97.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				89.608.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	89.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	95	1.565.953.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.799.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara	%	100	150.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.941.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.998.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	28.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				48.240.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	48.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.260.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.860.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	49.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.049.505.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	1.049.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.530.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4		1.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4		311.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				736.975.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4		736.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.449.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		323.449.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.044.000		
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1		16.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.387.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1		149.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.728.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1		43.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.290.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		56.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95		1.494.523.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4		43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4		43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.114.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar	%	100		178.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.266.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.748.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	33.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.710.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				900.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				63.334.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	63.334.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.906.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	63.906.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.024.420.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	1.024.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	200.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				823.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	823.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					248.629.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	248.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.547.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	131.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.929.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	32.929.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.627.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	52.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.526.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	95	1.368.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.180.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.180.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	8.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.396.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	141.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.157.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.764.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	17.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.864.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.864.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.120.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				61.737.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	61.737.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.923.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.831.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	32.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					848.501.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	848.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	190.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				656.020.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	656.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					328.467.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	328.467.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				129.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	129.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.366.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				125.151.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	125.151.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	95	1.382.691.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.514.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	42.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.514.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.243.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal	%	100	171.243.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.663.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.663.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.506.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.076.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	21.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.973.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.973.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				840.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				62.474.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	62.474.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.585.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	13.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.126.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	41.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					934.178.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	4	934.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.377.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				262.970.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	262.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				669.831.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	669.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.756.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1	234.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.285.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.613.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	83.613.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.787.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.778.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	65.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.293.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.293.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.347.894.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39.110.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	39.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				39.110.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	39.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					196.603.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten	%	100	196.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.150.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.921.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.880.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.868.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	97.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.100.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	21.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.684.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	62.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.770.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	1.770.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				348.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	348.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.421.020.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.421.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.281.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1	331.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.701.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	19.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.363.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	130.363.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.491.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	48.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.298.000		
					Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara		Unit	1	1.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				92.838.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	92.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.590.000		
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	28.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	95		1.457.220.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					33.200.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus		Dokumen	4	33.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33.200.000		
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus		Dokumen	4	33.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus		Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus		Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					187.317.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus	%	100		187.317.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus		Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus		Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.950.000		
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus		Paket	1	9.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus		Dokumen	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				67.601.000		
					Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus		Paket	1	67.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.884.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	12.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.982.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	46.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					852.737.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	852.737.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	202.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				648.026.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	648.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					377.266.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	377.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.226.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	22.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.599.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	133.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.110.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	49.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				24.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.105.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	100.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.226.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	40.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	95	1.612.801.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	39.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				39.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	39.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.250.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.759.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang	%	100	169.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.590.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	34.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				750.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				59.821.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	59.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.463.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	14.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.771.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	41.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.076.327.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	4	1.076.327.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.562.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	212.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				820.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				860.345.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	860.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.265.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	319.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.080.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.793.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	135.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.229.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.100.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				73.160.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	73.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.903.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	45.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	%	95	1.539.123.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.456.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.456.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					191.716.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati	%	100	191.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.223.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	4.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.033.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	50.033.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.950.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	18.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.610.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	67.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.008.761.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.008.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.020.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				272.160.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	272.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				735.581.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	735.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.190.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	276.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	150.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.690.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	55.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.810.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	32.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.240.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	10.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	95	1.409.845.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	25.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					198.481.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan	%	100	198.481.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.163.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	4.163.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	45.380.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.817.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	7.817.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				74.241.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KABUPATEN Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	74.241.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	9.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.980.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	55.980.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					833.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	833.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	186.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	1.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				645.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	645.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					310.324.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	310.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.854.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	22.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.950.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	123.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	46.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.120.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	67.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	95	1.525.397.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.924.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	9.924.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.924.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	9.924.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.237.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang	%	100	171.237.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	9.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	21.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.255.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	3.255.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	1.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				61.922.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	61.922.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.880.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.630.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	68.630.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					971.581.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	971.581.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				246.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	246.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				723.781.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	723.781.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.155.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	330.155.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.979.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	17.979.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				170.156.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	170.156.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	29.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	5.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	22.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.520.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	5.520.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	95	1.323.288.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					228.273.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga	%	100	228.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.252.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	31.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.418.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	8.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				840.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				79.551.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	79.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.990.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	9.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96.222.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	96.222.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					802.322.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	802.322.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.134.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	3.134.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	204.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.921.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	4.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				589.967.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	589.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240.493.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	240.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.168.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	24.168.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.460.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	127.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.572.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	43.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.093.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	16.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawiaan, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	95	1.609.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.485.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.485.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.469.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.780.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	36.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.287.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.609.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				51.253.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	51.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.145.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.145.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.395.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	43.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.168.940.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.168.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.405.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	178.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.735.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	987.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					225.306.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	225.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.667.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	12.667.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.638.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	97.638.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.503.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	16.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.418.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.280.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	95	1.091.703.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.140.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	42.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.140.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					137.840.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang	%	100	137.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.201.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.478.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	26.478.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.999.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				51.150.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	51.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.212.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	42.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					656.908.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	656.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.921.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	151.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				483.487.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	483.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					244.815.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	244.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.445.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.919.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	118.919.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.087.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	49.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.764.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	14.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	95	2.252.169.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					209.927.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang	%	100	209.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.019.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.451.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	34.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.573.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.573.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.884.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	50.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.607.580.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	4	1.607.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	408.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.183.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.183.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					392.562.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1	392.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.320.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				206.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	206.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.830.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.706.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	49.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.291.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	31.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.915.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95	1.250.198.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.288.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	42.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.288.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen	%	100	167.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.843.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.994.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.994.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.990.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	1	1.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				68.348.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	68.348.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.820.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	13.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.045.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	47.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				777.586.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	777.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.240.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	178.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				597.046.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	597.046.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262.884.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	262.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.922.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	29.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.541.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	111.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.699.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	24.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.562.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	56.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.460.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	95	1.551.244.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.020.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.020.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.436.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	100	172.436.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.054.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	6.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.430.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	34.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.030.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	9.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.100.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				70.852.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	70.852.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.790.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	10.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.180.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	39.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.050.193.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	1.050.193.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	2.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	254.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.647.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	86.647.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				706.696.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	706.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	286.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.480.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	34.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.720.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	97.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	44.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.795.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	4.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.600.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	79.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	17.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	95	1.460.501.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				35.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.983.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal	%	100	141.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.941.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	28.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.050.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				900.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.894.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	41.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.593.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	52.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					946.104.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	946.104.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	186.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	2.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				756.404.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	756.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					317.414.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	317.414.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.444.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	27.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.555.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	136.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.663.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	37.663.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.152.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	74.152.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.900.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	33.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	95	1.360.392.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.700.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.561.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung	%	100	152.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.525.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	43.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.640.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.320.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				37.984.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	37.984.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.786.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.823.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	43.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					954.271.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	4	954.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.184.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	181.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				770.887.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	770.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.860.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	218.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.888.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	13.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.596.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	92.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.137.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	21.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.148.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	69.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.091.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	14.091.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.082.421.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.140.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	42.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.140.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.101.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri	%	100	179.101.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.608.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.451.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	34.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.810.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				900.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.730.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	56.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				7.300.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	7.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.302.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.302.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.493.849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	1.493.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.890.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	307.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.147.559.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.147.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					367.331.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	367.331.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.253.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	27.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	154.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.350.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	48.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				86.128.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	86.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	95	1.250.720.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.220.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	42.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.220.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					202.170.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo	%	100	202.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.363.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.363.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.935.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	17.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.013.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X-XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				68.521.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	68.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	62.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	4	716.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	716.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					578.310.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	578.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	283.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	283.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	22.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	116.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	116.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	%	95	24.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
									4.000.000		
									4.000.000		
									4.000.000		
									1.052.241.000		
									42.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.300.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					166.717.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang	%	100	166.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.202.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	19.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.170.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				825.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				67.294.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	67.294.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.785.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.191.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	49.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					673.093.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Laporan	4	673.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.130.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	175.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				496.703.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	496.703.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.131.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang	Unit	1	164.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X-XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.511.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	20.511.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				81.370.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	81.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.350.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	13.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X-XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	%	95	1.397.228.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.700.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.880.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.358.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan	%	100	152.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.686.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	7.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.470.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	21.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.006.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	3.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				950.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				60.800.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	60.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	2.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.346.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	54.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					920.254.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	920.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	205.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				713.184.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	713.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.036.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	280.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.541.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	18.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.640.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	131.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.029.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	27.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.861.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	69.861.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.965.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	16.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	%	95	1.188.765.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					216.047.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga	%	100	216.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.921.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.626.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				900.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				64.342.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	64.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.228.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	13.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.030.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	39.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					642.325.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Laporan	4	642.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.120.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	144.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				497.205.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	497.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					287.843.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga	Unit	1	287.843.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.918.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.918.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.772.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	99.772.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.788.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	37.788.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.386.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.386.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.979.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	32.979.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	%	95	2.088.759.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.750.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	42.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.750.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	42.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.580.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1	%	100	200.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.560.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.375.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	17.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.748.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	16.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.793.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	102.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.120.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.384.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	34.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.575.299.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Laporan	4	1.575.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				329.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	329.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				253.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	253.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				992.049.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	992.049.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.630.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1	264.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.047.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	97.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.193.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.193.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.940.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.450.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	53.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	%	95	1.549.314.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.416.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II	%	100	194.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.650.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	28.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.370.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				90.866.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	90.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.105.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	12.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.220.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	31.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.075.815.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Laporan	4	1.075.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.280.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				365.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	365.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	9.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				699.585.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	699.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					242.083.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II	Unit	1	242.083.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.487.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	21.487.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.175.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	90.175.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.255.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	37.255.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.216.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	49.216.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.150.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.150.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	%	95	1.800.908.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					176.337.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III	%	100	176.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.124.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.284.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	45.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.133.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	21.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.206.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.390.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	32.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.255.707.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	1.255.707.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.280.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				370.712.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	370.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	16.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				867.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	867.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.364.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III	Unit	1	326.364.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.341.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	15.341.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.037.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	107.037.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.983.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	59.983.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				96.823.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	96.823.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	39.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.480.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.480.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95	1.534.051.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.894.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta	%	100	157.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.182.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	6.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				92.646.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	92.646.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	12.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.416.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	35.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.085.408.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.085.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	295.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				789.808.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	789.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					248.749.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta	Unit	1	248.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.704.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	11.704.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.459.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	82.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.927.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit	1	41.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.699.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	64.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.960.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	38.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	%	95	1.569.982.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.969.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal	%	100	163.969.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.124.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	5.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.753.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	60.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.013.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	6.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.040.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	1.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				44.774.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal	Paket	1	44.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.074.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Laporan	4	7.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.191.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan	4	39.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.141.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Laporan	4	1.141.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.202.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal	Laporan	4	3.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				342.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	342.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				796.138.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	796.138.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.473.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal	Unit	1	202.473.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.416.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal	Unit	1	9.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.335.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal	Unit	1	74.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.432.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	38.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				59.650.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	59.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.640.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	5.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								374.757.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.72	374.757.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						374.757.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	374.757.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					374.757.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	374.757.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				202.138.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	202.138.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				172.619.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	172.619.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah									40.964.815.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah	%	-4.58		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah								25.792.688.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-6.19	25.792.688.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						25.792.688.000		
						Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	418.918.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					418.918.000		
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	172.694.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				172.694.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	37	172.694.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	128.723.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				128.723.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	Laporan	37	128.723.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	117.501.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				117.501.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	37	117.501.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi
						Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	14.087.413.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.087.413.000		
						Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun	Dokumen	4	136.086.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0009			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				136.086.000		
						Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	136.086.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang diterapkan	Dokumen	1	510.279.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				510.279.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	510.279.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	13.441.048.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				13.441.048.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	13.441.048.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-17.88	20.949.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.949.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	38193932	20.949.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.949.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	20.949.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-16.45	6.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.550.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	90219289	6.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	6.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-10.82	7.110.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.110.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	51087778	7.110.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.110.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	7.110.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-10.66	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora	Ribu Rupiah	39697055	1.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-14.95	10.869.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.869.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	61032782	10.869.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.869.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	10.869.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	3.88	1.226.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.226.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	106289433	1.226.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.226.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	1.226.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-17.13	6.815.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.815.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	93321700	6.815.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6.815.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	6.815.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-10.87	2.255.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.255.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	98766479	2.255.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.255.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	2.255.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-5.71	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	92204096	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-18.24	1.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.300.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	67643702	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-12.79	30.372.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.372.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	51242376	30.372.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30.372.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	30.372.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-22.24	1.937.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.937.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	83103894	1.937.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.937.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	1.937.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-9.81	1.635.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.635.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	81993413	1.635.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.635.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	1.635.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-16.05	19.062.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.062.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	64396901	19.062.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.062.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	19.062.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-24.11	2.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	84015791	2.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	2.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-7.4	1.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.125.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	56638317	1.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.125.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	1.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-5.8	1.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.950.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	73151811	1.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	1.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-19.71	6.720.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.720.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	33771881	6.720.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6.720.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	6.720.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-21.06	12.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.450.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	35490562	12.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	12.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-13.67	3.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.650.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	83097900	3.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	3.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-16.8	750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					750.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	66851858	750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-15.42	4.001.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.001.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	81692126	4.001.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.001.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	4.001.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	-0.18	9.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.225.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	91635529	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.225.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-14.26	900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					900.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	33135787	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-22.2	1.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	37136088	1.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	1.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-15.2	1.473.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.473.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	36053403	1.473.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.473.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	1.473.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	-8.33	900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					900.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	16286163	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-18.85	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	28599334	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	-11.34	1.804.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.804.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	24022300	1.804.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.804.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	1.804.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	-1.97	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	164145827	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	-17.23	1.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.900.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	119599532	1.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	1.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	-9.08	825.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					825.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	121892087	825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				825.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	-16.61	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	91092331	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	-6.3	8.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.100.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	28483333	8.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	8.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-4.08	164.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					164.625.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	76541836	164.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				164.625.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara	Dokumen	4	164.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-20.64	209.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					209.200.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	172472647	209.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				209.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	209.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-8.17	172.801.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					172.801.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	76299153	172.801.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				172.801.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	172.801.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-25.45	173.430.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					173.430.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	68781306	173.430.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				173.430.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	173.430.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-20.55	147.906.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					147.906.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	117524841	147.906.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				147.906.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	147.906.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	-2	184.062.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					184.062.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	126130429	184.062.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				184.062.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	184.062.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-21.51	170.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					170.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	167265960	170.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				170.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	170.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-19.36	251.872.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					251.872.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	128604974	251.872.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				251.872.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	251.872.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-18.5	160.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					160.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	122049932	160.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				160.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	160.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-18.21	195.965.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					195.965.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	136753441	195.965.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				195.965.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	195.965.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-13.72	179.118.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					179.118.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	132312493	179.118.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				179.118.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	179.118.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-17.46	169.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					169.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	98576138	169.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				169.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	169.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-12.65	197.044.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					197.044.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	110723991	197.044.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				197.044.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	197.044.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-20.04	199.377.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					199.377.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	162251808	199.377.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				199.377.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	199.377.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-25.34	152.241.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					152.241.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	128948257	152.241.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				152.241.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	152.241.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-8.88	166.247.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					166.247.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	123173977	166.247.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				166.247.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	166.247.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-23.45	193.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					193.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	161758234	193.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				193.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	193.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-13.83	206.314.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					206.314.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	111317777	206.314.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				206.314.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	206.314.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-25.68	184.270.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					184.270.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	77402398	184.270.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				184.270.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	184.270.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-30.78	167.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					167.300.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	65413816	167.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				167.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	167.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-26.7	211.975.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					211.975.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	60971426	211.975.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				211.975.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	211.975.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-29.05	206.551.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					206.551.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	135953444	206.551.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				206.551.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	206.551.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-22.94	214.836.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					214.836.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	127474573	214.836.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				214.836.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	214.836.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-20.9	177.975.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					177.975.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	139974313	177.975.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				177.975.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	177.975.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	8.26	158.162.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					158.162.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	126674323	158.162.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				158.162.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	158.162.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-13.32	166.693.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					166.693.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	67101211	166.693.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				166.693.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	166.693.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-26.39	200.295.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					200.295.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	90353455	200.295.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				200.295.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	200.295.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-18.09	175.760.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.760.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	68456347	175.760.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.760.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	175.760.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-69.82	183.681.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					183.681.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	31029340	183.681.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				183.681.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	183.681.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-53	176.132.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.132.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	44338967	176.132.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				176.132.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	176.132.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	-34.02	164.874.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					164.874.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	43427213	164.874.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				164.874.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	164.874.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang I	%	-22.54	240.965.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					240.965.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	219229286	240.965.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				240.965.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	240.965.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	-33.38	229.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					229.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	185538761	229.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				229.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	229.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	-23.28	211.333.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					211.333.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	167766173	211.333.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				211.333.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	211.333.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	-36.56	189.886.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					189.886.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	160446736	189.886.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				189.886.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	189.886.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-53.72	178.982.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					178.982.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	41504238	178.982.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				178.982.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	178.982.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-8.74	195.072.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					195.072.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	80671606	195.072.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				195.072.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	195.072.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	73	4.159.260.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.159.260.000		
						Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB	Dokumen	1	1.237.859.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				1.237.859.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1.237.859.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana	Laporan	2	1.948.939.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.948.939.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	1.948.939.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB	Laporan	1	899.707.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				899.707.000		
						Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak	Dokumen	12	899.707.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan	%	100	72.755.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.001.1			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				72.755.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen	1	72.755.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								15.172.127.000		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	3.19	15.172.127.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						15.172.127.000		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13.21	231.357.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					231.357.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	14730	231.357.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				231.357.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	231.357.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	13.46	301.529.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					301.529.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	28340	301.529.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				301.529.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	301.529.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	15.87	294.732.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					294.732.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	17280	294.732.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				294.732.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	294.732.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	13.64	377.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					377.850.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Unit	11720	377.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				377.850.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	377.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	13.53	330.454.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					330.454.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	17540	330.454.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				330.454.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	330.454.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	13.72	499.610.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					499.610.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	28500	499.610.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				499.610.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	499.610.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	13.57	308.074.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					308.074.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	29420	308.074.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				308.074.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	308.074.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	13.67	332.751.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					332.751.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	22400	332.751.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				332.751.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	332.751.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	13.66	456.060.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					456.060.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	21950	456.060.000		
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				456.060.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	456.060.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	13.32	372.610.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					372.610.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	23230	372.610.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				372.610.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	372.610.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	13.52	339.026.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					339.026.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	17050	339.026.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				339.026.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	339.026.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	13.59	299.726.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					299.726.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	17530	299.726.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				299.726.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	299.726.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	13.45	348.953.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					348.953.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	19400	348.953.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				348.953.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	348.953.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	13.67	395.325.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					395.325.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	26000	395.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				395.325.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	395.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	13.63	319.362.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					319.362.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	15730	319.362.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				319.362.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	319.362.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	13.58	328.584.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					328.584.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	17000	328.584.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				328.584.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	328.584.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	13.46	418.960.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					418.960.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	21220	418.960.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				418.960.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	418.960.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12.72	293.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					293.544.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	14700	293.544.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				293.544.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	293.544.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	13.37	466.690.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					466.690.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	23000	466.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				466.690.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	466.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13.41	409.079.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					409.079.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	16210	409.079.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				409.079.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	409.079.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	13.71	245.281.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					245.281.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	9900	245.281.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				245.281.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	245.281.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	14.95	246.101.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					246.101.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Unit	10670	246.101.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				246.101.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	246.101.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	13.33	319.543.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					319.543.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	19740	319.543.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				319.543.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	319.543.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	13.54	374.878.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					374.878.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	17890	374.878.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				374.878.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	374.878.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	13.62	332.774.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					332.774.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	17880	332.774.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				332.774.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	332.774.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	13.63	471.606.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					471.606.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	25820	471.606.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				471.606.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	471.606.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	13.36	227.758.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					227.758.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	9140	227.758.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				227.758.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	227.758.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	13.46	364.387.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					364.387.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	14250	364.387.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				364.387.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	364.387.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13.46	220.380.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					220.380.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	9740	220.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				220.380.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	220.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	13.43	302.390.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					302.390.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	3240	302.390.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				302.390.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	302.390.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	13.51	201.880.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					201.880.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	6900	201.880.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				201.880.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	201.880.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	12.67	134.790.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					134.790.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	4430	134.790.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				134.790.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	134.790.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	14.69	389.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang 1	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					389.200.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1	Unit	23740	389.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				389.200.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	389.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	13.55	249.876.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					249.876.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	18120	249.876.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				249.876.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	249.876.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	13.55	151.870.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					151.870.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	16400	151.870.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				151.870.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	151.870.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	13.57	419.970.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					419.970.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	16810	419.970.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				419.970.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	419.970.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19.19	278.490.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					278.490.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	9890	278.490.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				278.490.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	278.490.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6.16	11.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	3964000	11.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				11.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	11.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-11.62	16.485.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.485.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	728000	16.485.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.485.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	16.485.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	6.02	24.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					24.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	400000	24.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				24.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	24.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	14.7	6.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.450.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	100000	6.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	6.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	4.47	6.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	183000	6.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	6.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	9.04	675.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					675.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	256000	675.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				675.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	675.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	1.96	8.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.400.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	3908500	8.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				8.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	8.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	10.32	9.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.900.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	241000	9.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	9.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-18.49	9.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	825000	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	-36.58	600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	8000	600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	0.57	6.675.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.675.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	412000	6.675.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.675.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	6.675.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-6.13	9.121.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.121.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	735000	9.121.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.121.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	9.121.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	46.01	4.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	106000	4.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	-19.12	11.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	450000	11.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				11.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	11.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	-11.69	7.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	7000	7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	19.78	13.042.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.042.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	910000	13.042.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				13.042.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	13.042.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	-16.31	9.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	70000	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	14.1	18.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	390000	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	10.84	8.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.850.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	255000	8.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				8.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	8.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	9.39	12.825.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.825.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	475000	12.825.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				12.825.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	12.825.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-0.16	7.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.650.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	113000	7.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	7.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	6.82	9.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.540.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	95000	9.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.540.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	9.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	-9.87	10.725.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.725.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	128100	10.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				10.725.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	10.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	-4.52	3.525.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.525.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	7500	3.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.525.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	3.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-36.8	5.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.475.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	177000	5.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.475.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	5.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	13.54	7.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.950.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	415000	7.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	7.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	7.59	13.725.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.725.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	305000	13.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				13.725.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	13.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-10.05	9.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	292000	9.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	9.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-4.24	3.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	560000	3.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	3.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	-12.71	7.831.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.831.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	96000	7.831.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.831.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	7.831.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	2.58	9.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	50000	9.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	9.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	-1.43	5.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.475.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	565000	5.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.475.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	5.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	29.26	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	470000	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	0.55	5.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.625.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	50000	5.625.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.625.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	5.625.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	3.19	707.998.000	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					707.998.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah	Dokumen	4	268.143.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				268.143.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	268.143.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana	Laporan	4	174.295.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				174.295.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	174.295.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain	Laporan	4	265.560.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				265.560.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	265.560.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	50.65	41.668.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.668.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	123836	41.668.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.668.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	41.668.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	50.49	89.875.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					89.875.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	322090	89.875.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				89.875.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	89.875.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	28.3	44.230.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					44.230.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	86759	44.230.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				44.230.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	44.230.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	36.52	35.420.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					35.420.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	139633	35.420.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				35.420.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	35.420.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	33.86	44.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					44.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	130074	44.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				44.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	44.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	99.22	96.789.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					96.789.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	244798	96.789.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				96.789.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	96.789.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	62.45	71.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					71.100.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	200980	71.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				71.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	71.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	21.12	27.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.900.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	102309	27.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	27.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	49.43	67.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					67.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	213520	67.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				67.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	67.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-35.64	53.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	158049	53.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				53.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	53.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	57.87	39.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					39.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	121991	39.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				39.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	39.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	67.7	61.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					61.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	186369	61.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				61.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	61.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	97.38	63.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					63.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	154098	63.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				63.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	63.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	9.49	52.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					52.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	180652	52.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				52.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	52.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	36.63	51.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	150808	51.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				51.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	51.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	72.07	116.560.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					116.560.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	340918	116.560.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				116.560.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	116.560.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	20.24	30.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.700.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	132220	30.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				30.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	30.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13.97	24.061.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					24.061.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	77691	24.061.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				24.061.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	24.061.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	77.29	72.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					72.750.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	195950	72.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				72.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	72.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	68.68	51.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.050.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	123100	51.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				51.050.000		
						Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	51.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	112.93	52.886.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					52.886.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	142448	52.886.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				52.886.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	52.886.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	30.48	27.040.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.040.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	101433	27.040.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.040.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	27.040.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	54.53	40.375.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					40.375.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	216552	40.375.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				40.375.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	40.375.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	62.8	42.810.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					42.810.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	109680	42.810.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				42.810.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	42.810.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	12.09	37.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.250.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	120188	37.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				37.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	37.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	158.84	91.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					91.650.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	209726	91.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				91.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	91.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	68.67	93.270.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					93.270.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	132740	93.270.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				93.270.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	93.270.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	63.29	65.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					65.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	226220	65.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				65.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	65.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	3.15	26.304.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					26.304.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	107120	26.304.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				26.304.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	26.304.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	63.16	77.707.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					77.707.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	100146	77.707.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				77.707.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	77.707.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	27.06	19.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	78636	19.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	19.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-2.74	25.253.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.253.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	67644	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				25.253.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	37.74	146.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					146.200.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	444784	146.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				146.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	146.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	13.64	50.198.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					50.198.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	232762	50.198.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				50.198.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	50.198.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	6.32	65.411.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					65.411.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	277720	65.411.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				65.411.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	65.411.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	34.94	73.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	235468	73.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				73.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	73.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	75.92	42.878.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					42.878.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	305729	42.878.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				42.878.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.878.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH									266.708.433.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									44.778.943.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								44.395.852.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81.1	44.395.852.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						44.395.852.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	35.103.650.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.362.467.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	22.362.467.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.565.574.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	20.565.574.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.671.658.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.671.658.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.035.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	30.035.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				95.200.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	95.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					62.810.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	62.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				62.810.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	62.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.836.707.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.836.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				225.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				375.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				360.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				220.264.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	220.264.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				551.707.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	551.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				304.736.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	304.736.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.117.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	521	1.117.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	60	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.082.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	1.082.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.866.664.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4.866.664.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.764.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	6.764.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.009.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	4.009.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.857.502.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	326	3.857.502.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.475.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	2.475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				234.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.148.502.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	1.148.502.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	9.292.202.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					456.590.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	456.590.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	85.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				221.300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	221.300.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.740.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	32.740.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.550.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	117.550.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.561.054.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.561.054.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	800.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.205.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.205.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.355.254.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.355.254.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.274.558.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	5.274.558.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	104.600.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				84.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	84.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.190.558.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	2.190.558.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.895.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	2.895.400.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								383.091.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	1.29	383.091.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						383.091.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	383.091.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					383.091.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	383.091.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				196.126.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	196.126.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				186.965.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	186.965.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									7.116.052.366.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.91		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								7.116.052.366.000		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	7.110.038.292.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						7.110.038.292.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	7.101.818.456.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					7.101.818.456.000		
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	7.101.818.456.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.582.121.004.000		
						Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	1	2.582.121.004.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		
						Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				4.494.697.452.000		
						Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	4.494.697.452.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	833.671.000	SEKRETARIAT	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					833.671.000		
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	833.671.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				164.377.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	164.377.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				164.377.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturananaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	164.377.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				164.377.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	164.377.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				304.567.000		
						Terlaksananya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	304.567.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				35.973.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	35.973.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	7.386.165.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					7.386.165.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	4.250.834.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				64.143.000		
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	64.143.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4.186.691.000		
						Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Dokumen	2	4.186.691.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	2.342.038.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				64.143.000		
						Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	64.143.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.277.895.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.277.895.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	Dokumen	35	793.293.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				793.293.000		
						Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	793.293.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	4.147.033.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4.147.033.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	4.147.033.000	Bidang Akuntansi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					4.147.033.000		
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Dokumen	1	711.113.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				238.237.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	1	238.237.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				472.876.000		
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	472.876.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Dokumen	1	1.805.470.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1.137.934.000		
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1.137.934.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				667.536.000		
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	667.536.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Dokumen	1	1.630.450.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				123.444.000		
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	123.444.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.507.006.000		
						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.507.006.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase realisasi APBD	%	93.75	1.867.041.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
									1.867.041.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	1.867.041.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1.306.519.000		
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	2	380.878.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				380.878.000		
						Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	380.878.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Dokumen	1	388.947.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				388.947.000		
						Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	388.947.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Dokumen	1	536.694.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				222.329.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	49	222.329.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				314.365.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	314.365.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					560.522.000		
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Dokumen	2	560.522.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				560.522.000		
						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	560.522.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									4.757.454.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89.86		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								4.757.454.000		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	4.757.454.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						4.757.454.000		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	1.760.083.000	Bidang Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.760.083.000		
						Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Angka	72.46	1.658.510.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.658.510.000		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.658.510.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	%	100	101.573.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				101.573.000		
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	42	101.573.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	89.86	1.024.451.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.024.451.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Dokumen	1	1.024.451.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				316.251.000		
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	316.251.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				350.000.000		
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	42	350.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				358.200.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	358.200.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPMD) tepat waktu	%	100	1.972.920.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.972.920.000		
						Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	1.972.920.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				542.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	542.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				289.840.000		
						Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	289.840.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				121.220.000		
						Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	121.220.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.019.860.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	1.019.860.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									7.165.588.763.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									31.106.030.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								30.753.449.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	30.753.449.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.753.449.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	92	30.723.449.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.682.015.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	25.682.015.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.817.097.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	24.817.097.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				801.290.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	801.290.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				29.337.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	29.337.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.190.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	9.190.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.101.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	25.101.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					9.218.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	9.218.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				9.218.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	9.218.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					120.720.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	120.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				102.026.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	102.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				18.694.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	18.694.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					728.856.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	728.856.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				81.125.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	81.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.632.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.632.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				123.040.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	123.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.089.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	40.089.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				89.867.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	89.867.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				108.103.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	108.103.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.220.543.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	1.220.543.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				580.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				130.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				150.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				360.543.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	360.543.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.987.627.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.987.627.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.686.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.686.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	710.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.219.441.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	1.219.441.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					824.470.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	824.470.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				169.892.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	169.892.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				455.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	455.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				169.578.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	169.578.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	92	30.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								352.581.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.22	352.581.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						352.581.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3.222	352.581.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					352.581.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	352.581.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				171.562.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	18	171.562.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				181.019.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	23	181.019.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN									5.893.076.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.87		Badan Kepegawaian Daerah	
	Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel								3.918.352.000		
						Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja	Angka	357.5	3.918.352.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.918.352.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	2.813.857.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Mutasi dan Promosi ASN					487.711.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	100	487.711.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				487.711.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	Orang	148	487.711.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					2.157.972.000		
						Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	100	2.157.972.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1.975.177.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	Orang	1000	37.188.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	66	1.937.989.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				23.576.000		
						Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	%	100	23.576.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				159.219.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	1000	6.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokumen	1800	153.219.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					168.174.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	168.174.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				168.174.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	38000	168.174.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	69.635.000	Bidang Mutasi	
				Mutasi dan Promosi ASN					69.635.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	69.635.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.03.02.1.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN				69.635.000		
						Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	Dokumen	350	69.635.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	1.034.860.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.034.860.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	1.034.860.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				54.595.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Dokumen	1	54.595.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				980.265.000		
						Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Orang	400	47.630.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	932.635.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi								1.974.724.000		
						Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi	Angka	75.5	1.974.724.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.974.724.000		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	170.173.000	Bidang Mutasi	
				Mutasi dan Promosi ASN					170.173.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%	100	170.173.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				170.173.000		
						Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1000	170.173.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	377.025.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					377.025.000		
						Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	60	377.025.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				190.866.000		
						Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	%	60	190.866.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				186.159.000		
						Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola	Dokumen	150000	153.099.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang dikelola	Dokumen	16900	33.060.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	611.810.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					611.810.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	%	100	611.810.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				611.810.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	300	357.685.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	400	141.372.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	15000	112.753.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	163.203.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					163.203.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	163.203.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				163.203.000		
						Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	2100	163.203.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	652.513.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					146.160.000		
						Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	146.160.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				146.160.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	300	91.480.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	54.680.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					506.353.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	100	506.353.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				192.847.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	192.847.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				44.300.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	2000	44.300.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				115.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	550	115.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				154.206.000		
						Persentase Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	154.206.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									36.999.106.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN									30.731.723.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.08		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN								30.338.458.000		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17.34	30.338.458.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						30.338.458.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3.5	326.466.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					13.437.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	13.437.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.000 2			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.561.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	1.561.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.000 4			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				11.876.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	15	1.225.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	18	10.651.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					313.029.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	313.029.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.000 6			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				38.282.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	9	38.282.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.000 8			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan				274.747.000		

					Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	16	90.520.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	45.561.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	3	65.572.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	26	73.094.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	1.735.079.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.735.079.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1120	1.735.079.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.735.079.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	660	1.165.612.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	250	314.288.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	210	255.179.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	26.795.153.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					26.795.153.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	5822	26.795.153.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				26.795.153.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	3321	12.220.853.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	200	1.701.333.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	200	2.181.202.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	1.754.576.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1981	8.937.189.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	1.287.516.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					1.287.516.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	17320	1.287.516.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK PILIHAN	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah				1.287.516.000		

					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	5760		410.311.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	5760		358.314.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	5800		518.891.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100		194.244.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis						86.349.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3		86.349.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.01.000 1			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					7.405.000		
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1		270.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	Dokumen	2		7.135.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.000 2			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					78.944.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	17		78.944.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						107.895.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3		107.895.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.000 1			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional					105.875.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1		925.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2		14.698.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40	90.252.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				2.020.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	2.020.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN								393.265.000		
						Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	393.265.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						393.265.000		
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	393.265.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					393.265.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	393.265.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				9.813.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	2	7.139.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	Orang	3	2.674.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				383.452.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	160	383.452.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH									48.963.219.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								48.712.066.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	48.712.066.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.712.066.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	48.712.066.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.786.590.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	27.786.590.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.632.632.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	24.632.632.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.035.030.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	3.035.030.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39.503.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	39.503.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				51.560.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	51.560.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				27.865.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	27.865.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					232.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	232.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				232.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	232.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					39.694.000		
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	39.694.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X-XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				39.694.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	39.694.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					173.612.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	173.612.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24.200.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	24.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				149.412.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	149.412.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.502.850.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.502.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				144.593.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	144.593.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				118.912.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	118.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				241.803.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	241.803.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				245.185.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	245.185.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				47.111.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	47.111.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				92.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	92.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270.346.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	270.346.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				325.095.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	325.095.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.610.937.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	5.610.937.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.685.937.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12	2.685.937.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.915.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	2.915.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.698.290.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.698.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	3.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.642.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.642.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.052.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.052.340.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.668.093.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	3.668.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.574.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	119.574.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				21.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.525.339.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	2.525.339.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.002.180.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	1.002.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								251.153.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	251.153.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						251.153.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	251.153.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					251.153.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	251.153.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				89.326.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	89.326.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				161.827.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	161.827.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									79.694.942.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung									22.564.476.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71.6			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								22.489.202.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	22.489.202.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						22.489.202.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	22.489.202.000	Badan Penghubung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.121.651.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.121.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.073.412.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	52	9.073.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.741.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	37.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.498.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.498.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					276.170.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	276.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				276.170.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	276.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					22.175.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	22.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.175.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	65	22.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.405.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.405.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.941.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.417.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	56.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				270.032.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	270.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.910.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	27.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				599.640.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	599.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.545.335.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	29	4.545.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.891.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	3.891.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				654.335.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	26	654.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.238.837.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.238.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				945.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	945.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	77.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.188.837.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	4.188.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.879.594.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.879.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.018.595.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	34	1.018.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.249.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	13	239.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				36.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	6	36.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				580.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	580.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung								75.274.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	75.274.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						75.274.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	75.274.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.274.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	75.274.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				56.007.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	56.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.267.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	23	19.267.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									3.857.159.000		
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85			
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								3.857.159.000		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	3.857.159.000		
									3.857.159.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	3.857.159.000	Badan Penghubung	
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					3.857.159.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	909.869.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				909.869.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	30	447.132.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	462.737.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	2.842.900.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	
		5.07.02.1.01.0001			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2.842.900.000		
						Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi	Laporan	12	570.040.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung	Orang	3742	2.272.860.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Terpenuhinya fasilitas Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	%	100	104.390.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				104.390.000		
						Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah	Kegiatan	6	104.390.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
JUMLAH									26.421.635.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									29.285.903.000	INSPEKTORAT	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								29.171.131.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,7	29.171.131.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.171.131.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	29.171.131.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.257.377.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	23.257.377.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.249.877.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	131	23.249.877.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				7.500.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	1	7.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					376.672.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	376.672.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				366.672.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	366.672.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					451.186.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	451.186.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.214.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.214.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.120.000		
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1		3.120.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				188.392.000		
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1		188.392.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1		240.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				9.460.000		
					Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		9.460.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.105.612.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2		1.105.612.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				53.000.000		
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1		53.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.052.612.000		
					umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7		1.052.612.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.219.603.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4		2.219.603.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				157.503.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		157.503.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				464.800.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1		464.800.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.040.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		34.040.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.563.260.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1		1.563.260.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.560.181.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	152		1.560.181.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.511.000		
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11		35.511.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				547.575.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23		547.575.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.080.000		
					Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	7		5.080.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				178.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	108	178.200.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				651.745.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	651.745.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				142.070.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	142.070.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								114.772.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	114.772.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						114.772.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	114.772.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					114.772.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	114.772.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				77.725.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	77.725.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.047.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	37.047.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi									6.885.846.000		
						Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3			
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah								2.721.573.000		
						Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	2.721.573.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.721.573.000		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	12.24	1.943.297.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					1.943.297.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	5	1.943.297.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.943.297.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	1.943.297.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	12.24	778.276.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					129.982.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	129.982.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0001			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				129.982.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	129.982.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan dan Asistensi					648.294.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	5	648.294.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				648.294.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	49	648.294.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal								4.164.273.000		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3	4.164.273.000		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						4.164.273.000		
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	84	467.648.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					467.648.000		
						Jumlah Dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran	Dokumen	2	467.648.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				467.648.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	70	467.648.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	86	943.795.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					943.795.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	943.795.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				774.554.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	774.554.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.000			Reviu Laporan Keuangan				169.241.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	169.241.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	86	800.032.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					800.032.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	800.032.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0001			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	100.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				700.032.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	700.032.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	86	959.996.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					959.996.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	959.996.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				959.996.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	959.996.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	86	992.802.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					992.802.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	992.802.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0003			Reviu Laporan Kinerja				157.182.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	60	157.182.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				835.620.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	835.620.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									36.171.749.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik									183.021.876.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.905		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								108.079.103.000		
						Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	3.01	108.079.103.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.712.345.000		
						Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3.1	2.712.345.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.712.345.000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	85	708.867.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				19.352.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	19.352.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0007			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				6.983.000		
						Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	35	6.983.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		8.01.02.1.01.0008			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				25.474.000		
						Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Dokumen	4	25.474.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		8.01.02.1.01.0009			Pelaksanaan tugas Paskibraka				7.972.000		
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka	Dokumen	4	7.972.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		8.01.02.1.01.001			Pembentukan Paskibraka				649.086.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka	Orang	70	649.086.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	%	85	2.003.478.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				1.971.170.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3200	1.971.170.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka				32.308.000		

					Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						
					Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4		32.308.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						103.350.314.000		
					Indeks kinerja ormas	Nilai	77.87		103.350.314.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					103.350.314.000		
					Skor variabel program dan kegiatan ormas	Skor	37.31		101.401.731.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				101.401.731.000		
					Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4		101.401.731.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
					Skor variabel sumber daya ormas	Skor	40.56		1.948.583.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.796.128.000		
					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	3200		1.796.128.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				152.455.000		
					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	200		152.455.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						2.016.444.000		
					Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3.1		1.489.391.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.489.391.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	87	1.489.391.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.489.391.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2400	1.489.391.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Indeks toleransi	%	74.3	527.053.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					527.053.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	87	527.053.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				414.195.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	800	414.195.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				112.858.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	112.858.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> CILACAP
	Meningkatnya Stabilitas Politik								74.942.773.000		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.8	74.942.773.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						40.473.973.000		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	76	40.473.973.000	Bidang Politik Dalam Negri	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					40.473.973.000		

						Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik	%	89.5	1.693.924.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 3				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.693.924.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	3055	1.693.924.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89.5	38.448.508.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 5				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			38.448.508.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	38.448.508.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89.5	331.541.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 2				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			20.159.000		
						Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	4	20.159.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 4				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			311.382.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	120	311.382.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						34.468.800.000		
						Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73.5	34.468.800.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					34.468.800.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	%	77	1.950.274.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.950.274.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3200	1.950.274.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan konflik sosial	%	100	32.518.526.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				149.959.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	149.959.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				31.141.494.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	8	31.141.494.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.227.073.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	5	1.227.073.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									16.240.273.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.5		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								14.504.928.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.15	14.504.928.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.504.928.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	14.504.928.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.912.335.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.912.335.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.551.133.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	62	9.551.133.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				601.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	601.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				601.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	601.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					165.161.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	165.161.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.500.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				65.621.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	65.621.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				84.540.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	110	84.540.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					995.525.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	995.525.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.013.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	16.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				114.471.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	114.471.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				76.675.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	76.675.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				147.648.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	147.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				34.076.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	34.076.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.737.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	50	6.737.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				89.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	89.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				457.742.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	457.742.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.017.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	8.017.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				44.746.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	8	44.746.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					400.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	41	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000		
						Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	27	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.239.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.239.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.483.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				369.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	369.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.866.167.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	1.866.167.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					712.257.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	712.257.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				235.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	21	235.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.921.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	1.921.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.977.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	87.977.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				328.155.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	328.155.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				59.204.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	59.204.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								1.735.345.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.6	1.735.345.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.735.345.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.735.345.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.735.345.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.735.345.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.017.200.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	1.017.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				718.145.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	718.145.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									199.262.149.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									13.652.816.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.2			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								13.454.620.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84.25	13.454.620.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.454.620.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	13.454.620.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.751.827.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	19	9.751.827.000		
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.342.853.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	61	9.342.853.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220.900.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	220.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				93.600.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	93.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				94.474.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	94.474.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					116.783.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	116.783.000		
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.783.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	6.783.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					247.436.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	247.436.000		
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				204.512.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	204.512.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				36.912.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	36.912.000		
		X-XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6.012.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	45	6.012.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					575.922.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	575.922.000		
		X-XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.810.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.810.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.317.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	28.317.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.313.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.313.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				81.085.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	81.085.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.058.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	26.058.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.730.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.730.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.235.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	32.235.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.991.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	6.991.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				74.383.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	74.383.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	7	150.000.000		
		X-XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	7	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.581.119.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.581.119.000		
		X-XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.065.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.065.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X-XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				570.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	570.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				226.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	226.483.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				781.571.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	781.571.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.031.533.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	700	1.031.533.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				307.601.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	307.601.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				51.117.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	56	51.117.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				90.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	90.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				278.695.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	278.695.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				177.485.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	177.485.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.635.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	106.635.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								198.196.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.92	198.196.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.196.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	198.196.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					198.196.000		
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	198.196.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				148.935.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	148.935.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.261.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	49.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah									3.414.678.000		
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	73			
	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah								3.414.678.000		
						Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan	%	100	3.414.678.000		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						3.414.678.000		
						Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	959.316.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					311.497.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi	Dokumen	1	311.497.000		
		5.05.02.1.01.001.2			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				17.987.000		
						Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	17.987.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.001.4			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				293.510.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	293.510.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					647.819.000		
						Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi	Dokumen	1	647.819.000		
		5.05.02.1.04.000.4			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				514.638.000		
						Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Laporan	1	514.638.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.000.5			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				133.181.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	Laporan	1	133.181.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	627.572.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					627.572.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur	Dokumen	1	627.572.000		
		5.05.02.1.01.000.3			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				402.881.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	402.881.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.000.4			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				224.691.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	224.691.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100		966.012.000	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						125.745.000	
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	1		125.745.000	
		5.05.02.1.02.0001			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					125.745.000	
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Dokumen	1		125.745.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						125.745.000	
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1		125.745.000	
		5.05.02.1.03.0005			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					125.745.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1		125.745.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi						714.522.000	
						Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen	1		714.522.000	
		5.05.02.1.04.0002			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					714.522.000	
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1		714.522.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100		861.778.000	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						488.503.000	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	1		488.503.000	
		5.05.02.1.01.0002			Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					164.160.000	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	1		164.160.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0013			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan					324.343.000	
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan	Dokumen	1		324.343.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi						373.275.000	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1		373.275.000	
		5.05.02.1.04.0001			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					373.275.000	
						Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1		373.275.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									17.067.494.000		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:

HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001